KELUAR DARI KETERGANTUNGAN TIMAH

Mencari Ekonomi Alternatif dan
Berkelanjutan di Belitung

Editor:

Nanang Indra Kurniawan

**Keluar dari
Ketergantungan Timah:
Mencari Ekonomi Alternatif
dan Berkelanjutan
di Belitung**

**Keluar dari
Ketergantungan Timah:
Mencari Ekonomi Alternatif
dan Berkelanjutan
di Belitung**

**Editor:
Nanang Indra Kurniawan**

POLGOV
Research Center for Politics and Government

**Keluar dari Ketergantungan Timah:
Mencari Ekonomi Alternatif dan Berkelanjutan di Belitung**

Hak cipta @ Penerbit PolGov, 2022

All rights reserved

Editor: Nanang Indra Kurniawan

Penyunting Bahasa: Dias Prasongko

Desain Sampul: Yohanes Paulus Mahadma Khrisna

Tata Letak Isi: M. Baihaqi Latif

Penyelaras Akhir: Jejek Dari Santoso

Cetakan I, Maret 2022

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung Research Centre for Politics and Government (PolGov). PolGov adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam lima tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi; 2) Politik Desentralisasi; 3) Tata Kelola Industri Ekstraktif; 4) Tata Kelola Pemilu; dan 5) Tata Kelola Perbatasan.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<https://dpp.fisipol.ugm.ac.id/>

<https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/>

Telp/Fax: (0274) 552212

Email: penerbit.polgov@ugm.ac.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur

Editor: Nanang Indra Kurniawan

Cet. 1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Februari 2022

xxii + 168 hlm; 21 x 15 cm

ISBN: 978-602-53626-4-4

1. Sosial/Politik

I. Judul

Kata Pengantar

Buku ‘Keluar dari Ketergantungan Timah: Mencari Ekonomi Alternatif dan Berkelanjutan di Belitung’ yang ada di hadapan para pembaca adalah produk refleksi dan pembelajaran kolektif dari komunitas akademik di dua institusi perguruan tinggi, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) serta Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), bersama dengan masyarakat di Belitung yang telah berinteraksi dalam kunjungan lapangan mahasiswa pada tanggal 31 Oktober—3 November 2019. Kunjungan lapangan tersebut adalah bagian dari kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh DPP UGM di dalam program studi Magister Politik dan Pemerintahan, dengan konsentrasi keilmuan Politik Sumber Daya Alam, dan bermaksud untuk membantu mahasiswa memahami dinamika pengelolaan sumber daya alam di Belitung. Dengan observasi yang dilakukan, mahasiswa dan dosen yang terlibat diajak untuk menulis sebuah cerita ringan dan populer sebagai refleksi dari perjalanan tersebut.

Buku ini berisi potongan cerita dari upaya masyarakat Belitung mendiversifikasi mata pencaharian mereka dari sektor ekstraktif yang mengandalkan timah ke sektor non-ekstraktif. Hal ini karena Belitung merepresentasikan realitas yang menarik terkait kehidupan perekonomian masyarakat pasca-tambang. Dengan ketersediaan sumber daya ekstraktif yang semakin terbatas, pemerintah dan

masyarakat mulai menekuni dan mengarusutamakan berbagai alternatif sumber ekonomi yang melimpah di wilayah tempat mereka tinggal. Sektor pariwisata, perkebunan, dan kelautan adalah beberapa di antara pilihan menjanjikan yang dapat membantu masyarakat mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Belitung dan dianggap memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam jangka waktu panjang.

Sektor pariwisata mendapatkan posisi khusus dalam konteks ini. Meski pendapatan masyarakat masih didominasi oleh penghasilan dari sektor pertambangan, pengembangan Belitung sebagai kawasan pariwisata sudah mulai diinisiasi sejak tahun 1992 dan berkembang pesat mulai tahun 2008 hingga sekarang. Pemerintah daerah maupun nasional, meski masih diuntungkan dari sektor pertambangan tersebut, sudah mulai memberikan dukungan bagi proyek-proyek pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang pariwisata. Di saat yang sama, masyarakat juga sudah mulai giat membangun destinasi pariwisata berbasis komunitas yang dianggap akan lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi pengembangan ekonomi lokal. Diversifikasi ini menjadi hal yang menarik untuk ditelaah karena ia merekam tensi sosial-politik dan tarik-menarik yang terjadi, baik antara pemangku kepentingan serta wacana-wacana terkait sumber ekonomi yang dianggap paling tepat untuk masyarakat Belitung, maupun antara pemangku kepentingan serta wacana-wacana yang muncul dalam dinamika pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata itu sendiri.

Melalui pengalaman masyarakat dalam beralih ke ekonomi non-ekstraktif, kami berkesempatan untuk menyaksikan bagaimana wajah Belitung sebagai 'Pulau Timah' telah berubah, dan bagaimana perubahan tersebut diiringi dengan sinergi dan tensi yang tetap

terasosiasi dengan kepentingan masyarakat terhadap penambangan timah. Timah tidak lagi menjadi satu-satunya sektor sentral yang mendefinisikan Belitung sebagai sebuah ruang, namun ia tetap menjadi elemen yang konstitutif secara politik, ekonomi, dan kultural dalam pengorganisasian masyarakat di Belitung. Upaya masyarakat untuk bergerak meninggalkan timah dan mencari alternatif sumber perekonomian, karenanya, menjadi pembelajaran berharga karena masyarakat di berbagai sektor ekonomi di Belitung menghadapi dinamika yang berbeda-beda di dalam perubahan sosial tersebut.

Tujuan dari penulisan buku ini ada dua. Pertama, mendokumentasikan pengetahuan lokal dan refleksi personal yang didapatkan mahasiswa dan dosen dari kunjungan lapangan ke Belitung. Meskipun interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di Belitung sudah diinisiasi sejak 2018 melalui berbagai diskusi, riset lapangan, pelatihan, dan obrolan-obrolan di warung kopi, penulisan buku ini diinisiasi oleh kunjungan riset lapangan dan kajian data sekunder yang dilakukan mahasiswa pada bulan November 2019. Berbekal jejaring dan pengalaman yang dimiliki DPP UGM, mahasiswa dan dosen diberangkatkan ke Belitung untuk melihat dan berinteraksi secara langsung dengan berbagai segmen masyarakat yang berkuat dengan ekonomi ekstraktif dan non-ekstraktif di dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa mahasiswa dan dosen sudah pernah mengunjungi Belitung dan beberapa lainnya adalah pengalaman kali pertama mengunjungi pulau tersebut. Kesan-kesan dan refleksi yang ditangkap oleh mahasiswa dan para dosen tersebut kemudian kami dokumentasikan sebagai sebuah pembelajaran interaktif yang dirangkai dengan sudut pandang keilmuan masing-masing dan kesan personal mereka terhadap Belitung.

Kedua, mendukung pemerintah dan komunitas di Belitung untuk mempromosikan dan mengembangkan aktivitas ekonomi alternatifnya. Buku ini bermaksud memberikan kembali pengetahuan dan refleksi yang dihasilkan kepada komunitas dan pemangku kepentingan di Belitung. Dengan adanya buku ini, kami berharap dapat berkontribusi menginformasikan dan mempromosikan pada khalayak luas terkait alternatif perekonomian yang tengah digeluti masyarakat di Belitung. Informasi-informasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat luas untuk mencari tahu, mengunjungi, dan memulai interaksi dengan para pemain di level domestik yang sedang berjuang mengarusutamakan sektor ekonomi non-ekstraktif dan berkelanjutan dalam skema dan lanskap ekonomi di Belitung. Buku ini juga diharapkan dapat memantik diskusi lebih jauh dan menghadirkan solusi-solusi praktis yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai kemungkinan konflik, sekaligus mendorong berbagai sinergi lintas sektor yang memungkinkan adanya kolaborasi proyek-proyek ekonomi alternatif.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para kontributor buku dan rekan-rekan kami di Belitung atas ilmu dan pengalaman berharga yang kami dapatkan dari pertemuan-pertemuan di lapangan, baik formal maupun informal. Di masa depan, kami berharap dapat melakukan kerja-kerja kolaborasi bersama dengan pemerintah, masyarakat, maupun komunitas masyarakat sipil di Belitung untuk mewujudkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan menyejahterakan bagi seluruh pihak.

Yogyakarta, Februari 2022

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix

Bab 1. Pendahuluan

Mendorong Ekonomi Alternatif Berkelanjutan: Upaya Masyarakat Belitung Keluar dari Ketergantungan Terhadap Pertambangan Timah	1
---	----------

Nanang Indra Kurniawan

- Menegosiasikan Ekonomi Non Ekstraktif di Belitung 6
- Mengelola Dilema dalam Diversifikasi Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan..... 10
- Tentang Buku Ini..... 12
- Daftar Pustaka..... 14

BAGIAN 1

BELITUNG SEBUAH PULAU YANG KAYA SUMBER DAYA ALAM

Bab 2. Belitung dan Wisata Kopi	19
--	-----------

Agung Widiyantoro

- Belitung dalam Sejarah Kolonial..... 21
- Sejarah Kopi di Belitung..... 22
- Kopi dan Pembauran Etnis..... 24

• Kopi Tradisional yang Bersanding dengan Kopi Modern	26
• Kedai Kopi sebagai Ruang Sosial	27
• Solidaritas dan Jaringan Kedai Kopi.....	29
 Bab 3. Pengelolaan Taman Wisata Batu Mentas dalam Memaksimalkan Potensi Alam untuk Melindungi Alam....	33
<i>Zanjabil Al-Falah</i>	
 Bab 4. Belajar dari Bukit Peramun: Peran Teknologi dalam Wisata Hutan Berbasis Komunitas	41
<i>Tadzkia Nurshafira</i>	
• Sejarah Bukit Peramun: Respons atas Kekeringan Air Bersih	42
• Bekerja di Sektor Tambang sebagai “zaman jahiliyah”	45
• Pengembangan Aktivitas Pariwisata Bukit Peramun .	47
• Empat Tahap Pengelolaan Pariwisata Bukit Peramun	53
• Teknologi Pengelolaan Pariwisata di Bukit Peramun	55
• Tantangan dan Masa Depan Bukit Peramun: Pariwisata dan Investasi	61
 Bab 5. Lubang Membawa Berkah: Cerita dari Open Pit Nam Salu, Dulu dan Sekarang.....	67
<i>Syahran Firdaus</i>	
 Bab 6. Pelangi Penuh Mimpi: Laskar Pelangi dan Pulau Belitung	75
<i>Susmriti Shrestha</i>	

Bab 7. Tarsius yang Misterius	81
<i>Muhammad Djindan</i>	

BAGIAN 2

DINAMIKA SITUASI SOSIAL POLITIK

Bab 8. Dinamika Antara Manusia dan Timah di Bangka-Belitung.....	93
---	-----------

Wegik Prasetyo

- Pendahuluan..... 93
- Transformasi Material Timah 96
- Masyarakat Bangka-Belitung dan Penambangan Timah 97
- Dampak Penambangan Timah terhadap Perubahan Lanskap Belitung: Cerita dari Lapangan..... 99
- Penutup 102

Bab 9. Kewirausahaan Sosial dan Pariwisata berbasis Komunitas	105
--	------------

Nora Iman Hagesæther

- Kewirausahaan Sosial..... 106
- Pariwisata Berbasis Komunitas 109
- Kewirausahaan Sosial dan Pariwisata Berbasis Komunitas di Belitung 110
- Mencari Alternatif atas Industri Ekstraktif 112
- Daftar Pustaka 115

Bab 10. Peran Perempuan di Belitung: Ekonomi Perawatan dan Penghidupan Keluarga Juru Sebrang dan Perempuan Pengumpul Kerang.....	117
<i>Diana Vela Almeida</i>	
• Petani Perempuan di dalam Kelompok Wanita Tani (KWT)	120
• Arisan Perempuan	124
• Organisasi Perempuan dan Peran Ekonomi dalam Masyarakat.....	126
Bab 11. Potensi Wisata Pantai dan Respons Masyarakat terhadap Tambang Laut di Pulau Belitung.....	131
<i>Daniel Galih I.Y.A.</i>	
Bab 12. Transisi Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Adil pada Ekonomi Migas di Norwegia dan Ekonomi Timah di Belitung	139
<i>Asbjørn Karlsen</i>	
• Sejarah Singkat Industri di Verdal.....	142
• Sejarah Singkat Industri di Belitung.....	144
• Kesimpulan	155
Indeks.....	159
Tentang Penulis.....	163

Bab 1. Pendahuluan

Mendorong Ekonomi Alternatif Berkelanjutan: Upaya Masyarakat Belitung Keluar dari Ketergantungan Terhadap Pertambangan Timah

Nanang Indra Kurniawan

Kepulauan Bangka dan Belitung merupakan wilayah penting dalam sejarah pertambangan timah Indonesia. Pada tahun 2017 Indonesia tercatat sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan produksi sekitar 69,600 metrik ton atau sekitar 25 persen dari total produksi timah dunia (“Indonesian Tin Outlook”, 2018). Menurut laporan US Geological Survey (2021) Indonesia memiliki sekitar 18.6 persen dari total cadangan timah dunia. Kepulauan Bangka dan Belitung memainkan peran penting dalam pertambangan timah di Indonesia karena sekitar 90 persen dari total produksi timah nasional berasal dari kedua kepulauan ini (“The Tin Mines of Bangka Island”, 2015).

Di Pulau Belitung, praktek penambangan produksi timah sebenarnya sudah dilakukan panjang semenjak abad 17. Meski begitu penambangan yang intensif baru terjadi di awal abad 19 ketika Belitung terkoneksi dengan perkembangan eksplorasi timah VOC di kawasan Sumatera Selatan dan Bangka. Di tahun 1822 kapten berkebangsaan Belgia yang menjabat sebagai asisten residen di Belitung bernama JP. De La Montte menemukan potensi kandungan timah yang luar biasa di pulau tersebut. Catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterbitkan pada tahun 2017 berjudul “Citra Kabupaten Belitung Timur Dalam Arsip” menunjukkan bahwa pertambangan skala industrial di wilayah Pulau Belitung baru dilakukan pada tahun 1850 saat Raja Belanda memberikan kesempatan pada orang-orang Belanda untuk mengusahakan timah di Hindia Belanda kecuali di wilayah Pulau Jawa dan Bangka. Di tahun 1860, perusahaan pertambangan Belanda yang bernama *Billiton Maatschappij* didirikan. Perusahaan ini kemudian dikembangkan dalam skema kolaborasi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan swasta menjadi menjadi *Gemeenschappelijk Mijnbouw Maatschappij Billiton* (GMB) (ANRI, 2017).

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, antara tahun 1953-1958, muncul kebijakan untuk menasionalisasi seluruh perusahaan asing yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan tujuan mewujudkan perekonomian nasional yang lebih mandiri. Di sektor pertambangan timah, perusahaan-perusahaan Belanda yaitu *Gemeenschappelijk Mijnbouw Maatschappij Billiton* (GMB), *Banka Tijn Winning Bedrijf* (BTW), serta *NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (NV SITEM) dinasionalisasi menjadi tiga perusahaan negara terpisah. Pada tahun 1961 pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang-Tambang Timah Negara (BPU PN Tambang Timah) dan kemudian melebur ketiganya menjadi

Perusahaan Negara Tambang Timah (PN Tambang Timah) pada tahun 1968. Status sebagai Perusahaan Negara berubah menjadi Perusahaan Persero pada tahun 1976 dan berubah nama menjadi PT Tambang Timah Tbk yang seluruh sahamnya berada dalam tangan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Meski begitu, perubahan status perusahaan ini tidak diikuti dengan perubahan pada kontrol negara pada industri timah. Semenjak pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru, timah diperlakukan sebagai komoditas strategis nasional yang mana pertambangan dan perdagangan timah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Posisi pemerintah daerah di Bangka dan Belitung dalam industri timah sangat lemah bukan hanya karena tidak memiliki kewenangan namun juga karena royalti dan penghasilan lain dari sektor timah mengalir lebih banyak ke pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan yang pada saat itu masih menjadi daerah induk. Proses investasi di industri timah penuh dengan proses birokrasi dan tersentralisasi serta menjadikan posisi PT Tambang Timah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sangat kuat. PT Tambang Timah pada saat itu bahkan menggunakan militer untuk melindungi area-area tambangnya untuk mencegah masyarakat sekitar memanfaatkannya sebagai lahan tambang ilegal. Siapapun yang melanggar hal ini akan diproses secara hukum dan bisa membuat mereka dipenjara (Erman, 2007).

Di Bangka dan Belitung, masyarakat lokal memang mendapatkan keuntungan dari praktek pertambangan timah melalui keterlibatan sebagian warga sebagai pekerja di PT Tambang Timah. Situasi ini berubah di awal dekade 1990 khususnya di Belitung ketika PT Tambang Timah melakukan restrukturisasi di tahun 1990-1994. PT Tambang Timah menghentikan sebagian besar produksinya dan

memberhentikan sekitar 20.000 karyawan perusahaan di Belitung. Kondisi ini telah tidak hanya membawa guncangan ekonomi besar bagi masyarakat namun juga bagi pemerintah daerah yang berupaya untuk menemukan ekonomi alternatif di luar tambang.

Situasi ini berubah ketika pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan liberalisasi sektor timah dengan deregulasi perdagangan timah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/1999 yang menyatakan bahwa timah tidak lagi menjadi komoditas strategis yang dikontrol pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada melemahnya monopoli pemerintah pusat terhadap pertambangan dan perdagangan timah serta membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam sektor timah. Ruang politik bagi pemerintah daerah semakin luas dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa semangat desentralisasi yang membawa implikasi pada pemberian sejumlah kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, salah satunya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Melalui kebijakan ini pemerintah daerah di Bangka dan Belitung mendapatkan kewenangan untuk mengelola sumber daya timah. Ruang politik yang lebih luas melalui desentralisasi ini juga membawa peran strategis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam praktek pertambangan rakyat. Dalam periode ini pula terbentuk kabupaten-kabupaten baru di Kepulauan Bangka dan Belitung serta provinsi baru yang terlepas dari Sumatera Selatan.

Ruang politik yang lebih terbuka ini telah memungkinkan pelaku bisnis swasta dan masyarakat lokal terlibat langsung dalam pertambangan timah di Bangka dan Belitung. Pemerintah kabupaten mulai mengeluarkan izin-izin pertambangan skala kecil yang dikelola masyarakat. Hingga tahun 2015 terdapat setidaknya 1.068

perusahaan pemilik izin usaha pertambangan. Jumlah ini belum termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan yang masih belum tersertifikasi serta aktifitas-aktifitas pertambangan ilegal (Tempo.co, 2015).

Dampak perubahan regulasi ini juga dirasakan di kawasan Pulau Belitung dimana aktivitas pertambangan timah oleh perusahaan tambang dan masyarakat semakin berkembang cepat semenjak awal dekade 2000. Pada satu sisi hal ini memang telah mendorong perluasan aktivitas ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap masyarakat namun pada sisi yang lain juga memberi tantangan baru terhadap tata kelola lingkungan alam di Belitung. Pertambangan timah dilakukan di daratan telah menghasilkan perubahan lanskap yang secara signifikan mengubah lahan pertanian, hutan, kebun, serta pekarangan menjadi area pertambangan terbuka. Ancaman kerusakan lingkungan makin meluas dari hari ke hari seiring dengan ekspansi pertambangan timah.

Semangat desentralisasi dan liberalisasi politik yang berkembang ternyata tidak hanya berdampak pada penguatan peran pemerintah dan masyarakat lokal dalam sektor tambang. Pada periode ini juga muncul dorongan untuk menghadirkan alternatif-alternatif ekonomi baru di luar pertambangan timah. Beragam aktor di Belitung mulai mendiskusikan serta menginisiasi upaya-upaya untuk membangun diversifikasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada timah. Hal ini misalnya bisa dilihat dari beragam praktek di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan laut di Belitung yang dari hari ke hari semakin membawa kontribusi ekonomi yang besar. Perkembangan ini juga diikuti dengan tumbuhnya gagasan tentang pembangunan berkelanjutan yang mendorong berbagai pihak untuk lebih memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan dalam praktek

ekonomi. Hal ini telah melahirkan dinamika baru di Belitung dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi lokal.

Ide tentang ekonomi alternatif yang berkelanjutan ini menemukan momentum di tahun 2014 dengan diundangkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menarik berbagai urusan yang selama sekian lama dilimpahkan kewenangannya kepada kabupaten/kota, termasuk kewenangan di sektor pertambangan. Perizinan pertambangan mulai tahun 2016 dialihkan ke pemerintah provinsi sehingga membuat pemerintah kabupaten di Bangka dan Belitung kehilangan ruang untuk terlibat langsung dalam pertambangan timah.

Menegosiasikan Ekonomi Non Ekstraktif di Belitung

Timah memang telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di Belitung. Meski begitu, perubahan politik, ekonomi, dan regulasi dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan bagaimana ketergantungan terhadap komoditas timah berpotensi menciptakan kerentanan ekonomi. Karena itulah kebutuhan untuk melakukan diversifikasi ekonomi di Belitung menjadi hal yang tidak terelakkan. Hal ini tentu saja tidak dengan mengabaikan fakta bahwa pada skala tertentu pertambangan timah tetap bisa dijalankan dengan penegakkan prinsip keberlanjutan.

Salah satu sektor non-pertambangan di Belitung yang mampu berkembang dalam periode lima belas tahun terakhir adalah pariwisata. Salah satu faktor yang membantu perkembangan ini adalah *booming* novel “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata yang kemudian dibuat film layar lebar pada tahun 2008. Film yang menceritakan tentang kehidupan pendidikan dan masyarakat Belitung ini ditonton 4,7 juta penonton di bioskop dan mampu memperkenalkan keindahan

pulau Belitung kepada masyarakat luas. Dengan peran yang luas dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah pelan-pelan pariwisata di Belitung makin berkembang dan bahkan menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi wisata penting di Indonesia. Untuk Kabupaten Belitung, pada tahun 2014 total kunjungan wisatawan mencapai 281.049 orang, sementara di tahun 2015 sebanyak 251.440 orang. Angka ini meningkat pesat di tahun 2018 dimana jumlah wisatawan yang datang berjumlah 812.567 orang (Harefa, 2020). Peningkatan ini juga berdampak pada Bergeraknya ekonomi masyarakat baik yang terkait langsung dengan pariwisata seperti hotel, restoran, jasa wisata maupun aktivitas ekonomi lain seperti perdagangan, transportasi, dll.

Selain sektor pariwisata sektor pertanian melalui komoditas lada juga mulai muncul menjadi alternatif baru dalam perekonomian di Bangka dan Belitung. Di tahun 2020 Provinsi Bangka Belitung menjadi penghasil lada terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 33.810 ton atau 38,77 persen dari total produksi nasional sebesar 87.202 ton (Katadata, 2021). Mayoritas produksi ini berasal dari kebun-kebun rakyat dan melibatkan sekitar lima puluh tujuh ribu keluarga petani. Di Provinsi Bangka Belitung pusat produksinya lada terletak di Bangka Selatan yang merupakan wilayah penghasil dua pertiga lada Provinsi Bangka Belitung. Di Kabupaten Belitung produksi tahun 2020 tercatat sebesar 6.294,04 ton (Belitung Satu Data, 2021) sementara untuk Kabupaten Belitung Timur sebesar 1.978,48 ton (BPS Kabupaten Belitung Timur, 2021). Ini artinya Belitung menyumbangkan sekitar 24 persen total produksi lada di Provinsi Bangka Belitung. Sepertiga dari komoditas produksi lada dari Provinsi Bangka Belitung ini diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Jerman, Jepang, China dan Singapura dengan harga jual mencapai lebih dari delapan dollar AS per Kg (Kompas, 2021).

Meski begitu upaya untuk mendorong tumbuhnya ekonomi non-ekstraktif ini juga menghadapi tantangan. Potensi ketegangan baru baik di tingkat elit maupun masyarakat mulai muncul seiring berkembangnya wacana ekonomi non-ekstraktif serta dorongan untuk perubahan sektor ekstraktif yang berkelanjutan. Ini ditunjukkan dengan perdebatan yang menguat di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat melihat bahwa Belitung perlu pelan-pelan meninggalkan pertambangan timah dan memperkuat sektor pariwisata, pertanian, dan kelautan karena dilihat secara ekonomis menjanjikan dan secara lingkungan berkelanjutan. Sebagian yang lain memandang bahwa tambang adalah bagian penting dalam kehidupan orang Belitung yang tidak hanya memberi identitas namun juga penghidupan ekonomi. Terlebih lagi cadangan timah juga dianggap masih tersedia dalam jumlah besar terutama di kawasan pesisir laut.

Ketegangan ini misalnya bisa dilihat dalam kasus penolakan tambang timah laut di Belitung pada tahun 2015. Sekitar oleh dua ribu orang yang terdiri dari berbagai macam elemen seperti nelayan, pelaku pariwisata, aktivis lingkungan yang didukung oleh elit lokal di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menentang PT Timah untuk mengembangkan penambangan laut sejauh 0-2 mil dari pesisir pantai. Dalam pengoperasiannya, PT Timah akan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP). Kapal-kapal ini akan mengeruk dasar laut untuk mencari kandungan pasir timah yang berada di sela-sela terumbu karang. Mereka yang berdemonstrasi menganggap bahwa aktivitas Kapal Isap Produksi ini akan mengancam ekosistem laut. Bagi nelayan kerusakan ekosistem laut ini dikhawatirkan akan membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan. Mereka juga khawatir bahwa penambangan timah laut ini akan membawa potensi bahaya baru bagi para nelayan akibat terbentuknya sejumlah busung atau pusaran

air yang dapat membuat perahu nelayan terbalik atau bahkan hancur kala melaut.

Ketegangan antara nelayan dan penambangan timah lautnya sebenarnya bukan hal baru. Aktivitas Penambangan timah laut oleh penambang inkonvensional telah dilakukan dengan menggunakan ponton atau semacam kapal tongkang yang dilengkapi dengan alat untuk mengeruk endapan biji timah yang berada di dasar laut. Kadangkala para penambang ini bernegosiasi dengan nelayan dengan menawarkan bagi hasil yang merupakan kompensasi atas aktivitas yang dianggap mengganggu nelayan. Lebih sering kompensasi ini ditolak karena bagi nelayan pantai dan laut merupakan lahan ekonomi yang penting untuk mereka.

Penentangan terhadap penambangan timah laut juga datang dari pelaku pariwisata yang menganggap kerusakan ekosistem laut yang dihasilkan dari praktek pertambangan juga akan membuat pantai-pantai di Belitung menjadi keruh dan merusak terumbu-terumbu karang. Hal ini dianggap akan mempengaruhi pariwisata Belitung yang bergantung pada keindahan laut dan pulau-pulau kecilnya. Meski begitu, di berbagai kesempatan para pelaku pariwisata juga menyadari bahwa penambangan timah memang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Belitung. Mereka menyatakan bahwa sejauh penambangan dilakukan di darat maka aktivitas itu bisa ditoleransi, namun bila dilakukan di laut mereka menyatakan keberatannya. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi di Belitung ternyata juga bekerja di tingkat bawah. Negosiasi ini juga tergambar dari munculnya ide pengembangan pariwisata di Belitung yang mencoba menyambungkan pariwisata dengan lokasi-lokasi pertambangan baik yang masih aktif maupun tidak dalam kerangka besar pariwisata minat khusus tambang.

Mengelola Dilema dalam Diversifikasi Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Pergulatan pengelolaan sumber daya alam dan perpindahan menuju ekonomi alternatif berkelanjutan perlu memikirkan tiga hal. Pertama, bagaimana sumber daya alam yang ada didistribusikan dan memberi manfaat secara luas kepada setiap elemen masyarakat. Kedua, bagaimana keputusan terkait pengelolaan sumber daya ekstraktif di tingkat lokal diambil secara partisipatif. Ketiga, bagaimana ekonomi lama maupun ekonomi alternatif yang dimunculkan responsif terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi isu penting dalam tata kelola sumber daya ekstraktif di berbagai tempat. Masyarakat dan pemerintah seringkali dihadapkan pada dilema antara ekonomi dan ekologi yang tergambar dari perdebatan antara pilihan pertumbuhan ekonomi atau kelestarian lingkungan.

Buku ini mencoba berkontribusi untuk memahami dilema yang dihadapi pemerintah dan masyarakat terkait dengan tata kelola sumber daya alam sekaligus mengidentifikasi praktek-praktek yang berkembang untuk mengatasi dilema ini. Dalam pengalaman di berbagai negara, dominasi pada satu sektor ekonomi telah membawa pada ketergantungan yang kuat kepada suatu komoditas tertentu dan pada saat yang bersamaan membuka kerentanan secara sosial dan ekonomi manakala sumber daya tersebut berkurang atau mengalami fluktuasi harga. Ini misalnya digarisbawahi oleh John Andrew McNeish dalam *World Development Report 2011* berjudul “*Rethinking Resource Conflict*” yang mencoba menggambarkan bagaimana negara kaya sumber daya mengalami keterpurukan akibat tidak dapat menggunakan kekayaannya untuk mendongkrak perekonomian negara. Melalui kasus di negara-negara Afrika seperti

Angola dan Sierra Leone ia mencontohkan bagaimana ketergantungan pada satu sektor ekonomi bisa berdampak serius terhadap ekonomi sebuah negara. Dampak itu msialnya adalah performa ekonomi yang menurun akibat minimnya investasi pada sektor-sektor yang lain dan bahkan juga konflik sosial. Dalam kasus di beberapa negara Afrika tersebut sumber daya alam yang besar seringkali diikuti dengan tingginya angka kemiskinan dan konflik yang diakibatkan oleh pengelolaan yang tidak tepat serta distribusi kemanfaatan yang tidak merata. Berangkat pada pengalaman ini maka diversifikasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar masyarakat tidak menghadapi problem keterpurukan ekonomi dan masalah-masalah konflik sosial.

Dalam kasus Belitung proses untuk menghadirkan ruang ekonomi alternatif yang berkelanjutan tidaklah pernah mudah. Penambangan timah telah menjadi bagian dari identitas kultural dan membentuk semacam *legacy* bagi masyarakat Belitung untuk diturunkan dari generasi ke generasi. Membangun ekonomi alternatif sangatlah menantang karena penambangan timah adalah aktivitas yang mudah dilakukan dengan keuntungan yang bisa didapat cepat. Mengakarnya tradisi menambang timah ini juga telah menciptakan jaringan kepentingan antar aktor yang saling terkait kuat satu sama lain. Dalam situasi semacam ini transisi menuju ekonomi alternatif bisa dianggap mengancam praktek ekonomi yang sudah ada dan seringkali tidak dianggap menjanjikan keuntungan yang besar. Ketakutan atas hilangnya ceruk ekonomi inilah yang barangkali mendasari perilaku resistensi atau penolakan sebagai tindakan rasional yang mereka tempuh. Dilema-dilema ini harus terus dicarikan solusinya agar tidak memunculkan persoalan lain yang lebih besar.

Upaya diversifikasi ekonomi dan transisi menuju pembangunan berkelanjutan karenanya harus dilakukan secara berkeadilan dan

memiliki legitimasi yang kuat. Diversifikasi dan transisi ekonomi ini perlu memang perlu memperhatikan kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta memastikan penambahan nilai ekonomi di tingkat lokal. Meski begitu suara dan pandangan dari berbagai pihak harus menjadi landasan penting dalam perubahan ini. Dalam perspektif ini, seperti bahwa ‘transisi menuju pembangunan berkelanjutan’ saja tidak cukup. Dibutuhkan ‘transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang adil’. Proses politik yang partisipatif diharapkan akan dapat memfasilitasi diversifikasi ekonomi lokal yang terencana dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.

Tentang Buku Ini

Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari dua institusi perguruan tinggi yaitu Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Basis utama data dan informasi yang didapatkan dalam tulisan-tulisan ini berasal dari riset intensif yang dilakukan oleh dosen dan peneliti sejak tahun 2018 maupun kunjungan riset lapangan dan kajian data sekunder yang dilakukan mahasiswa pada Bulan November 2019. Buku ini merupakan produk pembelajaran bersama antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat serta menjadi salah satu upaya dari universitas untuk membangun pertanggungjawaban sosial atas kegiatan akademik yang dilakukan di Belitung.

Isu pokok yang merangkai tema-tema yang ditulis pada dasarnya adalah memproblematisasikan transisi ekonomi ke arah model ekonomi yang berkelanjutan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan baru yang muncul dari proses tersebut sekaligus

menjelaskan mengapa proses itu terjadi. Meski begitu, tulisan-tulisan dalam buku ini tidak disusun untuk menjadi sebuah literatur yang tekstual dan akademik secara ketat. Buku ini lebih diletakkan sebagai upaya reflektif dari komunitas akademik di UGM dan NTNU untuk memahami dan menyelami perubahan sosial di Belitung. Tulisan-tulisan dalam buku ini lebih ditempatkan sebagai dokumentasi mengenai kesan dan pembelajaran interaktif antara kampus dengan masyarakat sehingga tidak berpretensi menjadi referensi yang secara komprehensif menggambarkan kompleksnya dinamika sosial dan ekonomi di Belitung.

Para penulis yang berkontribusi dalam buku ini merupakan dosen, peneliti, dan mahasiswa dari UGM dan NTNU yang memiliki latar belakang berbeda-beda yaitu Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Geografi. Hal ini membuat nuansa, arah, dan penekanan pada masing-masing tulisan tidak dapat dilepaskan dari cara pandang khas yang ada dalam disiplin ilmu tersebut. Selain itu, tulisan ini juga didasarkan pada kedalaman riset yang berbeda-beda. Sebagian merupakan dosen dan peneliti yang sudah melakukan kajian intensif tentang Belitung, sementara sebagian lainnya merupakan mahasiswa yang sedang memulai mengembangkan kapasitas risetnya.

Dalam buku ini pembaca akan menemukan dua segmen besar. Segmen pertama adalah tulisan-tulisan yang berupaya untuk menegaskan daya tarik Belitung sebagai sebuah pulau yang kaya akan sumberdaya alam. Tulisan-tulisan di segmen pertama ini disusun dalam rangka membantu para pihak di Belitung untuk mempromosikan beragam keunikan yang ada di pulau ini kepada khalayak luas serta menguraikan pelajaran-pelajaran penting yang didapat para penulis dari kunjungan mereka ke Belitung. Segmen

kedua berisi tulisan-tulisan yang berupaya tidak hanya merefleksikan tapi juga menganalisis dinamika sosial dan politik di Belitung.

Kontribusi-kontribusi tulisan dalam buku ini diharapkan akan membawa diskusi baru untuk memahami diversifikasi ekonomi dan transisi ekonomi ekstraktif ke non-ekstraktif serta negosiasi dan tensi konflik didalamnya. Harapannya buku ini menjadi semacam *lesson learned* dan harapan baru bagi masyarakat yang saat ini tengah berjuang untuk memunculkan alternatif perekonomian di luar ekonomi ekstraktif.

Daftar Pustaka

- Albar, A. (2018). 'Indonesian Tin Outlook'. COO – PT Timah Tbk. Dipresentasikan di Shenzhen, China. 16-18 September. Diakses pada 30 September 2021 dari <https://www.internationaltin.org/wp-content/uploads/2018/09/3.3-Indonesia-Tin-Outlook-Alwin-Albar-PT-Timah-Tbk.pdf>
- ANRI. (2017). Citra Kabupaten Belitung Timur dalam Arsip. Jakarta.
- Ardian, D. (2015). 'The Tin Mines of Bangka Island'. *Bloomberg*. 26 Agustus. Diakses pada 28 September 2021 dari <https://www.bloomberg.com/news/photo-essays/2015-08-26/the-tin-mines-of-bangka-island>
- Belitung Satu Data. (2021). Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020. Diakses pada 28 September 2021 dari <https://data.belitung.go.id/dataset/data-luas-tanam-produksi-dan-produktivitas-lada-menurut-kecamatan-di-kabupaten-belitung-tahun-2020>

- BPS Kabupaten Belitung Timur. (2021). Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2021. Diakses pada 30 September 2021 dari <https://belitungtimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/ae69567f079cc53c1600f1e3/kabupaten-belitung-timur-dalam-angka-2021.html>
- Erman, E. (2007). Deregulation of the tin trade and creation of a local Shadow State: A Bangka case study. In H. S. NORDHOLT & G. van KLINKEN (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (pp. 177–202). Brill. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76x39.13>
- Harefa, M. (2020). Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(1): 65-77. Doi: 10.22212/jekp.v11i1.1487
- Helabumi, R. (2021). ‘Pasang Surut Lada Bangka Belitung’. Kompas. 14 Maret. Diakses pada 30 September 2021 dari <https://jelajah.kompas.id/jalur-rempah/baca/pasang-surut-lada-bangka-belitung/>
- McNeish, John-Andrew. (2011). *Rethinking Resource Conflict*. Washington, DC: World Bank. Diakses pada 1 Oktober 2021 dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9192?locale-attribute=en>
- Rizaty, M. A. (2021). ‘Bangka Belitung Jadi Penghasil Lada Terbesar Nasional’. *Katadata.co.id*. 14 Mei. Diakses pada 25 September 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/14/bangka-belitung-jadi-penghasil-lada-terbesar-nasional>
- Tempo.co. (2015). ‘95 Perusahaan Tambang Timah di Babel Belum Punya Sertifikat’. 23 November. Diakses pada 27 September 2021 dari <https://bisnis.tempo.co/read/721355/95->

perusahaan-tambang-timah-di-babel-belum-punya-sertifikat

US Geological Survey. (2021). Mineral Commodity Summaries. January. Diakses pada 25 September 2021 dari <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-tin.pdf>

BAGIAN 1

BELITUNG SEBUAH PULAU YANG KAYA SUMBER DAYA ALAM

Bab 2. Belitung dan Wisata Kopi

Agung Widiyantoro

Pulau Belitung merupakan salah satu pulau di Provinsi Bangka Belitung. Popularitas Pulau Belitung melejit pada 2005 ketika novel “Laskar Pelangi” laris di pasaran buku Indonesia sejumlah lima juta eksemplar. Tingginya minat baca atas novel tersebut kemudian mendorong adaptasi cerita dalam novel ke dalam film dengan judul yang sama yakni “Laskar Pelangi.” Film tersebut menceritakan perjuangan anak-anak Belitung dalam mendapatkan akses pendidikan di tengah keterbatasan tenaga pendidik, rintangan medan dan rendahnya minat belajar. Dalam film itu, digambarkan pesona pantai pulau Belitung dengan ombak tenang, batu-batu karang besar yang berjajar seolah membentuk gigi naga dari kejauhan.

Film “Laskar Pelangi” memotret masalah ketimpangan pendidikan Pulau Belitung yang kaya timah. Sang penulis, Andrea Hirata, menuliskan novel ini dari pengalaman pribadi masa kecilnya sehingga narasinya begitu hidup. Tak lupa pula, film ini juga menampilkan keelokan pariwisata Belitung dengan potensi pariwisata pantainya yang terkenal, seperti Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Tinggi dan Pantai Tanjung Pendam. Dari deretan pantai-pantai berpasir

putih di pulau ini, ada yang sudah dikelola secara komersil atau masih belum dikelola oleh pemerintah daerah.

Berbicara tentang pariwisata, Belitung juga menyimpan potensi pariwisata alam lainnya seperti Bukit Peramun yang terletak di Barat laut dari pusat kota, tepatnya di kecamatan Sijuk. Sekalipun pulau Belitung hanya memiliki wilayah seluas 4801 km², pulau ini dapat menjadi destinasi pariwisata yang layak dipertimbangkan atau menjadi salah satu rekomendasi tempat tujuan untuk berwisata.

Ulasan singkat novel “Laskar Pelangi” di atas memberikan satu gambaran singkat tentang Belitung yang tidak hanya menyimpan potensi keindahan alam, namun juga kekayaan alam. Salah satunya adalah timah. Belitung merupakan wilayah pertambangan timah yang pernah berjaya pada masanya. Pusat pertambangan timah pada abad ke-18 yang pada awalnya berpusat di Pulau Bangka kemudian bergeser ke Belitung karena menipisnya deposit timah. Padahal, pada awalnya, dinyatakan tidak ada kandungan timah di Pulau Belitung.

Beberapa hal tersebut menjadi alasan mengapa Pulau Belitung menjadi tempat studi lapangan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya timah. Pada tanggal 31 Oktober 2019, rombongan mahasiswa magister DPP FISIPOL UGM dan mahasiswa magang dari Norwegia berkesempatan mengunjungi pulau tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana tata kelola sumber daya alam serta relasinya terhadap pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Pembelajaran ini dikemas dalam bentuk kunjungan ke wilayah hutan konservasi, wilayah pertambangan timah, wisata alam dan beberapa tempat khas Belitung, salah satunya kedai kopi.

Selain dapat mempelajari tata kelola pertambangan timah, hal menarik lain yang dapat dicermati ketika berkunjung ke Belitung

adalah kedai kopinya yang masih mempertahankan ciri tradisional. Berbagai kedai kopi bertebaran di sepanjang jalan dari bandara Hanandjoeddin hingga ke arah kota. Tampilan kedai kopi yang tradisional memiliki kemiripan dengan kedai-kedai kopi yang berada di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan meja-meja berjajar-jajar, juga menu utamanya berupa kopi hitam yang diseduh dengan cara di-*tubruk*. Selain kopi hitam, kedai kopi di Belitung juga menyediakan menu andalan lain yaitu, kopi susu dan pisang goreng. Dua menu ini, sekalipun menu klasik, adalah menu andalan yang ada hampir pada semua kedai kopi di Belitung.

Belitung dalam Sejarah Kolonial

Catatan perjalanan sejarah Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas satu sama lain. Pada 1709, timah ditemukan di pulau Bangka oleh orang-orang Johor. Kemudian, wilayah Bangka Belitung pada 1910 dikuasai oleh Kesultanan Palembang. Untuk mengelola tambang timah di pulau Bangka, pihak kesultanan mendatangkan ahli pertambangan dari Cina beserta dengan buruh kasar.¹

Pada 1717, Sultan Palembang meminta bantuan VOC untuk menumpas bajak laut di perairan Bangka Belitung serta mencegah penyelundupan timah. Permintaan Sultan Palembang tersebut dikabulkan. Namun, Kesultanan Palembang membayar jasa VOC ini dengan biaya yang amat mahal, yaitu hak monopoli timah kepada VOC. Dampak ekonomi monopoli timah ini berujung pada rusaknya harga timah di wilayah Asia Tenggara sehingga menyebabkan penyelundupan timah kembali terjadi. Salah satu alasan kuat

1 Kamil, A. I. (2019). Kopi: Otentisitas Material Dan Gaya Hidup. *Aceh Anthropological Journal*, 3(2), 129-143. Dapat diunduh pada laman <https://core.ac.uk/download/pdf/329058943.pdf>

penyelundupan timah di luar wilayah kesultanan Palembang ini karena kebutuhan timah yang cukup tinggi pada abad 18. Sebagai pihak yang memiliki hak monopoli, VOC melalui V.D. Bogarts dan Kapten Lombart mendatangi pihak Kesultanan untuk menindak tegas aksi penyelundupan timah tersebut.

Pergantian rezim kolonial pada 18 September 1811 melalui Perjanjian Tuntang mengubah konstelasi di wilayah Bangka Belitung. Inggris mendapatkan wilayah VOC yang meliputi Jawa, Makassar, Palembang, Timor dan daerah lainnya. Raffles memerintahkan pada bawahannya untuk mengakuisisi aset VOC di Sungai Aur dan beberapa tambang timah yang tersebar di Bangka Belitung. Tindakan ini menyebabkan perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II selaku penguasa Palembang.

Pada tanggal 20 Maret 1812, Mayor Jenderal Robert Gillespie berlayar ke Palembang untuk menegosiasikan keinginan Raffles sebelumnya. Menurut catatan sejarah, Sultan Mahmud Badaruddin II tidak berkenan dengan hal tersebut, sehingga Inggris secara sepihak mengangkat Pangeran Adipati sebagai Sultan Ahmad Najamuddin II di tahun 1812 dengan tukar guling Bangka Belitung. Setelah jatuh dalam genggaman Inggris, nama Bangka Belitung kemudian diubah menjadi *Duke of Island* pada tanggal 20 Mei 1812.

Sejarah Kopi di Belitung

Bagi para pecinta kopi, Belitung memiliki tradisi minum kopi atau *ngopi* yang ternyata sudah ada semenjak era pertambangan timah berjaya pada masa kolonial Belanda. Kemunculan kedai kopi di dekat wilayah pertambangan timah dan pabrik timah di Belitung berhubungan dengan permukiman pekerja pertambangan yang berada di Manggar, Tanjung Pandan. Pada waktu itu, keberadaan

kedai kopi di Belitung belum seramai sekarang. Pun, budaya minum kopi belum juga berkembang sebagai budaya *nongkrong* sebagaimana budaya minum kopi sekarang.

Menurut sumber sejarah tutur yang berkembang di masyarakat Belitung, budaya minum kopi berkembang seiring dengan interaksi masyarakat Melayu dengan pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Mereka membawa komoditas kopi dengan sebutan *Qahwah*, yang disajikan dalam bentuk minuman untuk menemani waktu santai. *Qahwah* yang kemudian dikenal sebagai kopi memang berasal dari daratan Ethiopia, berkembang di Yaman dan dibudidayakan ke banyak negara Asia dan Amerika Latin. Perkembangan Islamisasi di wilayah Pasai, Perlak di Aceh turut membawa tradisi minum kopi ini sebagai budaya baru yang disusul dengan penanaman varietas kopi asal Timur Tengah tersebut. Menurut Erwiza Erman dalam tulisannya yang berjudul “Dinamika Komunitas warung Kopi dan Politik Resistensi di Pulau Belitung,” menyebutkan bahwa catatan tertua tentang perkembangan kopi di masyarakat Melayu diiringi dengan proses penyebaran Islam oleh Syekh Abubakar Abdullah dan Datuk Ahmad dari Mempawah.

Pada abad ke-14, sebelum VOC membuka perkebunan kopi secara luas para Haji asal tanah Melayu sebetulnya sudah membawa kopi sebagai oleh-oleh haji dari Makkah. Budaya minum kopi baru tersebar luas di Belitung ketika perkebunan kopi di Lampung mulai dibuka oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada 1699 di Priangan. Ekspansi perkebunan kopi di Pulau Sumatera tidak terlepas dari keberhasilan budidaya kopi oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Priangan dan Pengalengan. Seorang sejarawan Belanda bernama Van Laanen menuliskan bahwa VOC mengambil kopi terbesar dari wilayah Hindia Belanda, Yaman dan Reunion.

Kopi menjadi komoditas unggulan di masa VOC dan di masa Hindia Belanda (1800-1942). Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, kopi dibudidayakan di Jawa melalui *Culturstelsel* (Tanam Paksa). Memasuki masa Politik Etis, pembudidayaan kopi pun sampai Sumatera, salah satunya hingga ke daerah Lampung. Beriringan dengan proses kolonisasi dan imigrasi tahap pertama (berlangsung dari 1905 hingga 1911) di Lampung, para pendatang asal Jawa dan keturunan Tionghoa mulai membuka lahan dan mengembangkan tanaman kopi dengan varietas Arabika dan Robusta. Dua varietas kopi utama ini masih dikembangkan hingga sekarang dan menjadi bahan pokok dari kedai-kedai kopi yang tersebar di Pulau Belitung.

Bisnis warung kopi yang berkembang di Belitung memang bukanlah sekedar bagaimana kopi itu disajikan di warung-warung, namun juga bagaimana kedai kopi itu menjadi ruang interaksi sosial antara penduduk lokal (Melayu) dengan penduduk keturunan Tionghoa di sini. Beberapa pemilik kedai kopi di Belitung adalah warga keturunan Tionghoa. Hal tersebut nampak dari nama-nama kedai yang menggunakan bahasa Cina.

Kopi dan Pembauran Etnis

Pembauran antara etnis lokal dan etnis Tionghoa terjadi di Belitung dalam kurun waktu 1900-1970-an. Proses pembauran ini dipercepat oleh pembukaan lahan pertambangan timah di *Open Pit* Nam Salu, Belitung. Orang-orang Tionghoa didatangkan dari Bangka, Sumatera Utara dan Tiongkok untuk dipekerjakan sebagai buruh kasar selama kurang lebih tiga generasi dan membuat komposisi masyarakat Belitung yang diisi oleh etnis Melayu, Tionghoa, Palembang dan pendatang Jawa dari Lampung.

Hal tersebut mengingatkan pada seorang mantan Gubernur Jakarta yang lahir, besar dan sempat menjadi Bupati Belitung Timur yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Inilah salah satu bukti koeksistensi sosial serta politik multietnis di wilayah Belitung. Meskipun Belitung merupakan salah satu wilayah dengan kebudayaan Melayu yang kental namun, budaya Tionghoa yang dibawa oleh para keturunannya masih dilestarikan dan diterima oleh etnis Melayu yang mendiami wilayah Belitung.

Wilayah Pulau Belitung yang tidak didominasi oleh dataran tinggi sesungguhnya tidak terlalu cocok untuk budidaya kopi. Sepanjang perjalanan dari bandara Hananjoeddin ke tempat penginapan, penulis menjumpai tanaman sawit dan perkebunan karet. Rumah-rumah warga lokal di luar kota masih menggunakan arsitektur tradisional melayu dengan atap mirip atap *limasan* di Jawa. Kedai kopi bertebaran di hampir setiap sudut kota Belitung.

Ada beberapa kedai kopi yang terkenal di Belitung. Namun, di antara sekian warung kopi yang ada di Tanjung Pandan tempat rombongan kami menginap, ada dua kedai kopi legendaris yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, yaitu Kedai Kopi Kong Djie dan Kedai Kopi Senang. Keduanya dimiliki oleh keturunan Tionghoa. Kedai Kopi Djie pada mulanya didirikan oleh Kong Djie, seorang Tionghoa asal Bangka pada 1943 sedangkan Kedai Senang didirikan oleh Ake. Fakta unik tentang Belitung Timur yang jarang diketahui orang bahwa salah satu kotanya yang bernama Manggar dijuluki sebagai kota 1001 warung kopi. Bagi masyarakat Belitung, kehidupan sosial tidak hanya dibangun pada waktu bekerja di pertambangan, perkebunan ataupun di tempat kerja lainnya. Namun, juga di kedai kopi untuk melepas penat setelah bekerja seharian penuh.

Sebagai sebuah ruang publik, warung kopi di Belitung membentuk jejaring pelanggan tetap yang setia dengan menu kopi tradisional. Pergeseran budaya ngopi yang semula identik dengan orang tua kini mulai bergeser setelah hadirnya berbagai kedai kopi modern seperti Starbucks, J.Co dan kafe kecil ala *caffeshop* lainnya. Bagi masyarakat Belitung, budaya minum kopi tidak hanya didominasi oleh etnis tertentu atau kelas sosial tertentu. Warung kopi menjadi tempat bertemunya masyarakat dari berbagai kelompok.

Kopi Tradisional yang Bersanding dengan Kopi Modern

Ada beberapa jenis kopi yang dibudidayakan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Di antaranya adalah Robusta (*Coffea Canephora*) dan Arabika (*Coffea Arabica*). Spesies Robusta mempunyai citarasa lebih pahit dan kadar keasaman lebih rendah daripada Arabika. Dari sisi harga, kopi arabika memiliki harga lebih tinggi karena proses penanaman dan perawatan yang lebih membutuhkan biaya besar.

Ada beberapa cara penyajian kopi seperti *cappuccino*, *espresso* dan *mocha*. Cara penyajian modern tersebut membutuhkan alat seperti mesin, penyaring, dan tambahan *topping* seperti *foam*. Cara penyajian seperti itu umum ditemui di kafe-kafe dengan nuansa modern. Sedangkan untuk kedai kopi di Belitung, pada umumnya menyajikan kopi “tubruk”, yaitu cara pengolahan tradisional dengan cara seduhan atau ditubruk. Metode penyajian ini adalah yang paling praktis dan merakyat. Jenis kopi susu dengan teknik penyajian ditubruk adalah yang paling populer di Indonesia sebelum jenis es kopi susu dan model penyajian yang lain menjadi tren.

Seiring berjalannya waktu, terutama setelah film *Filosofi Kopi* tayang di bioskop, tren ngopi tak hanya dinikmati oleh orang tua

tetapi juga anak muda. Cara penyajiannya pun semakin beragam. Banyak *coffeeshop* modern bermunculan, sebagian juga merupakan cabang atau *franchise* dari *coffeshop* yang ada di Jakarta, Jogja dan Surabaya.

Terdapat keunikan jika jalan-jalan malam di sekitaran pusat kota Belitung, yaitu ada kedai kopi yang menjajakan kopi secara berkeliling dengan menggunakan mobil VW Combi yang ikonik. Namanya Kedai Kopi Nyon-Nyon dan menyajikan kopi *single origin* yang diolah langsung dari biji kopi. Penyajian melalui *single origin* ini menjadi gaya ngopi yang baru setelah film “Filosofi Kopi” rilis. Kopi yang dulu disajikan dengan pengolahan tradisional dengan disangrai lalu digiling menjadi bubuk kopi halus. Setelah mesin-mesin kopi modern seperti mesin press, *mocha pot* dan V60, misalnya.

Melihat hal tersebut, terdapat hal menarik bahwa budaya minum kopi di Belitung ternyata tak monoton atau sebatas kopi tradisional. Semakin beragam penyajian kopi berarti menandakan beragamnya pilihan konsumsi masyarakat. Perubahan sumber pendapatan ekonomi masyarakat Belitung dari yang semula hanya bergantung kepada industri ekstraktif menjadi bersumber pada perkebunan, pariwisata dan perdagangan menyebabkan pilihan konsumsi masyarakatnya semakin beragam dibandingkan pada 1950-an tatkala industri ekstraktif menjadi primadona masyarakat Belitung.

Kedai Kopi sebagai Ruang Sosial

Kedai kopi di Belitung telah berkembang dengan berbagai ragam gaya dan fasilitas serta perbedaan penyajian. Begitu pula halnya dengan kebiasaan “ngopi” dalam masyarakatnya dengan intensitas minum kopi yang tinggi hingga mencapai 5 kali dalam sehari. Kedai kopi bahkan telah bertransformasi menjadi sebuah ruang sosial yang

sangat eksotis di Belitung. Salah satunya, kedai kopi menjadi layar utama bagi penegakan kebijakan populis yang sedang menghangat beberapa saat ini. Hal tersebut bisa kita lihat bagaimana upaya untuk penertiban kehidupan sosial-budaya dan politik dalam arena kedai kopi.

Muncul fakta yang fenomenal yang ada di masyarakat berkenaan dengan konsumsi kopi. Fenomena ini terjadi pada hampir seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Seperti yang telah dikatakan oleh Catherine M. Tucker (2011, 4) bahwa kopi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

“Although rates of consumption fluctuate, coffee is a customary drink and an integral part of life in many societies. Worldwide, only non-commercial water, tea, and milk appear to be consumed more frequently than coffee, although ranks vary. Depending on the year, some sources rank coffee in second place after water, or carbonated beverages above coffee (Beverage Marketing Corporation 2009; Fletcher 2006; Justaboutcoffee.com 2007). Coffee’s presence has become so integral to many people’s lives that most continue to drink it even if prices rise or the economy slows.”

Hal tersebut diatas menandakan bahwa kopi adalah suatu komoditas yang telah menjadi bagian sejarah tersendiri dalam banyak masyarakat di dunia. Begitu juga dengan masyarakat Belitung, bagi penikmat, kopi telah menjadi minuman yang menduduki posisi kedua yang dikonsumsi setelah air putih. Saat ini kopi dan kedai kopi telah menjadi ruang sosial baru. Selain menyuguhkan kopi, the serta makanan ringan, kedai kopi juga menjadi pusat-pusat interaksi sosial karena kedai kopi memberikan kesempatan kepada anggota-anggota sosial untuk berkumpul, berbicara, menulis, membaca, menghibur satu sama lain, membuang waktu atau malah berkencan yang dilakukan secandivdua tautau kelompok-kelompok kecil.

Solidaritas dan Jaringan Kedai Kopi

Pakpahan dan Kristina dalam jurnal yang berjudul “Pengenalan Kuliner Tradisional sebagai Daya Tarik Wisata Belitung” menulis bahwa wisata kuliner tradisional seperti kedai kopi di Belitung memiliki potensi yang besar. Argumen tersebut didukung oleh jumlah kunjungan wisatawan ke Belitung yang tidak hanya datang untuk melihat pantai belaka tetapi juga ingin merasakan kuliner khas Belitung seperti Sop Gangan, Suto Belitung, dan Belacan. Potensi oleh-oleh dan souvenir juga tak kalah besar untuk dikembangkan secara serius mengingat Belitung memiliki bangunan ikonik seperti mercusuar di Pulau Lengkuas. Pulau-pulau kecil yang letaknya berada di sebelah timur Pulau Belitung menyajikan wisata laut serta *snorkeling* yang cukup membuat mata wisatawan dimanjakan dengan keindahan biota dan hewan-hewan bawah laut seperti ikan yang berwarna-warni. Beberapa ikan yang selama ini belum pernah atau masih asing di Jawa ternyata merupakan jenis ikan yang bisa dikonsumsi di Belitung.

Ada sebuah warung makan di Pulau Lengkuas. Warung Makan tersebut menggunakan bahan kayu sederhana dengan alas pasir putih. Salah satu menunya adalah ikan berwarna biru dengan garis kuning di sekujur tubuhnya. Ikan tersebut disajikan dengan cara dibakar dengan bumbu gurih. Jenis ikan yang lezat ini sepertinya jarang sekali ditemui di Jawa, walaupun ada, harganya cukup tinggi.

Selain makanan, kedai kopi dan budaya minum kopi juga menarik untuk dieksplorasi. Arman dalam jurnal berjudul “Kopi dan Geliat Bisnis Anak Muda” menemukan bahwa warung kopi dapat dilihat dalam perspektif bisnis dan komunitas. Sebagai unit bisnis, warung kopi merupakan usaha kecil dan menengah dan berfungsi sebagai

mata pencaharian individu atau keluarga seperti Kedai Kopi Ake dan Kong Djie. Selain sebagai bisnis, warung kopi juga menjelma sebagai komunitas tempat orang Belitung menumpahkan keresahan atau disebut “*budaya berkeluh kesah*”, “*budaya ingin tahu*” tentang kondisi sosial di Tanjung Pandan, Manggar terlebih Belitung secara umum.

Ada beberapa kedai kopi yang sudah berdiri sejak era Belanda datang di Belitung. Menurut salah satu pelayan di Kedai Kong Djie yang terletak di Tanjung Pandan, kedai tersebut pada mulanya hanya menyajikan kopi dan pisang goreng sebagai menu andalannya. Di lain kedai, di kedai kopi Ake misalnya, menu yang disajikan tidak jauh berbeda dengan kedai Kong Djie dan Kedai Tung Tao.

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa kedai kopi di atas tak hanya menyajikan kopi hitam dengan pisang goreng sebagai teman *berkeluh kesah*, melepas lelah dan tempat orang bertemu dengan orang-orang baru untuk diajak berbicara selepas bekerja. Kedai kopi tersebut kemudian berkembang seiring bertambahnya keramaian di Belitung. Solidaritas antar pelanggan warung kopi terjalin dalam sebuah ruang kolektif. Hal tersebut terjadi karena generasi para pekerja yang merupakan anak dari generasi pertama pekerja timah juga masih meneruskan tradisi minum kopi ditemani pisang goreng, roti bakar yang terkesan sederhana dan merakyat sebagai teman ngobrol dari sore hingga malam.

Gambar 1 Salah satu menu kopi susu tradisional dengan pisang goreng sebagai menu andalan. Sumber gambar: Agung Widiyantoro.

Hampir semua kedai kopi yang dijumpai di Belitung menggunakan cara penyajian kopi secara tradisional. Baik Kong Djie, Warung Kopi Ake dan Kedai Tung Tau, semuanya menggunakan cara penyajian yang masih sangat tradisional. Air yang digunakan untuk menyeduh kopi dimasak menggunakan arang sehingga tercium bau gosong yang memberikan sensasi tersendiri bagi rasa kopi saat kita nikmati. Teko yang digunakan pun masih merupakan ketel tradisional yang telah digunakan sejak kedai kopi ini berdiri. Selain rasanya yang unggul, cara penyajian tradisional ini membuat kedai kopi di Belitung layak untuk dikunjungi.

Bab 3. Pengelolaan Taman Wisata Batu Mentas dalam Memaksimalkan Potensi Alam untuk Melindungi Alam

Zanjabil Al-Falah

Sosok penggagas Taman Wisata Batu Mentas yang sekarang diminati banyak wisatawan asing maupun lokal adalah seorang terpelajar bernama Budi Setiawan. Lulus sarjana dari Universitas Padjajaran, Bandung, lalu melanjutkan studi master bidang ekonomi pembangunan di Belanda dengan beasiswa. Pengalaman masa kecilnya memberi inspirasi bagi aktivitasnya dalam mengelola Batu Mentas. Sewaktu kecil, dia biasa melihat alam yang sangat bersahabat. Melihat ikan di air tawar jernih, melihat tarsius di pepohonan, bersantai di pinggir sungai sembari menikmati gemericik air, dan masih banyak lagi. Dia selalu bertanya akankah nanti anak cucunya masih bisa menikmati yang demikian dengan segala masalah yang ada sekarang? Masalah itu datang dari *illegal logging* yang semakin parah menggerogoti hutan, penambang yang rakus akan timah, dan banyak persoalan yang lain.

Untuk memastikan agar anak cucunya dapat menikmati asrinya lingkungan tempat dia lahir dan dibesarkan, mulailah Budi mencari

cara untuk memastikan alamnya tetap indah dan alami. Dimulai dengan mengumpulkan orang-orang di sekitar dia dan merangkul dukungan dari berbagai pihak. Dia menggandeng para pecinta lingkungan lokal, nasional bahkan internasional untuk memperkuat jaringan. Tidak lupa, dia juga mengandalkan pemerintah dan masyarakat lokal untuk menjaga alam taman wisata Batu Mentas yang indah.

Meski demikian, perjuangan awal tidaklah mudah. Di awal perjalanannya, banyak tantangan yang diperoleh, baik berupa ancaman berbentuk fisik maupun non-fisik. Misalnya, Budi pernah diancam akan dibunuh beserta keluarganya jika tetap bersikeras mempertahankan hutan Batu Mentas dari penggalian timah dan pembalakan hutan liar, tetapi saat bercerita Budi tidak mengatakan siapa yang mengancam dan kapan tepatnya.

Istri dan anak-anaknya pernah diungsikan ke rumah mertuanya sampai empat bulan karena beberapa preman mendatangi mereka untuk melukai bahkan membunuh mereka. Pernah juga sarana prasarannya di hutan dibakar habis oleh para preman agar nyali dan semangat Budi mempertahankan hutan bisa luntur. Meski dalam cerita Budi tidak secara rinci menyebutkan para preman diutus oleh siapa dan kapan tepatnya. Alih-alih menyerah, Budi justru semakin menentang pembalakan hutan liar ataupun untuk pembukaan pertambangan timah yang baru.

Selain itu, Budi juga pernah dicemooh dan diremehkan oleh masyarakat sekitar karena pekerjaan yang ia lakukan dianggap tidak memiliki prospek yang menjanjikan. Teman-teman dan orang disekitar Budi pun menyarankan agar lebih baik ia mencari pekerjaan yang lebih jelas dan bisa menghasilkan uang. Meskipun demikian Budi tak pernah menyerah bahkan dengan bangga terus menggeluti

Wisata Batu Mentas. Karena baginya mempertahankan alam dengan semua keasriannya telah menjadi bagian dari semangat hidupnya.

Usahnya untuk terus menghimpun dukungan ia lakukan sebisa mungkin, menghubungi teman kuliahnya semasa di Bandung juga teman kuliahnya semasa di Belanda salah satu cara yang ia tempuh. Sehingga dari beberapa teman yang juga menjadi pemerhati lingkungan ia berhasil mendapat perhatian dari berbagai *brand* terkenal seperti Apple dan Samsung. Lalu dukungan untuk menjaga hutan di Belitung mulai mendapat perhatian yang serius. Itulah awal mula titik terang untuk perjuangan yang dilakukan oleh Budi agar alam asri di Belitung bisa terjaga dari para penambang timah dan penebang hutan.

Seiring dengan berjalannya waktu yang dipenuhi dengan suka duka, semangat dan kegigihan Budi ternyata cukup teruji. Mulailah Taman Wisata Batu Mentas dilirik oleh para wisatawan, baik daerah, nasional, maupun pelancong luar negeri. Dari sini orang-orang yang tadinya ragu mulai paham dan mendukung ide ekowisata yang digeluti oleh Budi.

Untuk saat ini dukungan terus datang baik dari orang sekitar maupun dari pemerintah Belitung termasuk dari organisasi-organisasi peduli lingkungan internasional. Kini, taman wisata Batu Mentas terus berkembang dan semakin baik, menawarkan keasrian yang sangat indah untuk dinikmati para wisatawan. Fasilitas terus dilengkapi untuk memanjakan setiap wisatawan yang hadir. Misalnya, rumah botol yang didaur ulang, meski dibuat dari botol tetapi tetap nyaman dengan tempat tidur yang empuk.

Budi bercerita bahwa dulu, dia mengelola Batu Mentas dengan beberapa temannya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, teman-temannya meninggalkan dia sendirian karena kegiatan ini dianggap

tidak bisa menghasilkan uang secara langsung. Meski demikian, Budi masih terus percaya bahwa suatu saat dia akan dapat menghasilkan uang dari kegiatan yang ia geluti. Di tahun ke-3, mulai terlihat beberapa wisatawan tergiur dengan aneka wisata yang disuguhkan. Keindahan wisata alam Batu Mentas diantaranya sebagai berikut:

1. *Water Tubing*

Pengunjung dimungkinkan untuk menikmati aliran sungai yang cukup tenang. Pengunjung diberikan sebuah pelampung dari ban dalam mobil. Sehingga pengunjung bisa bersantai diatas ban tersebut sembari telentang dengan santai lalu perlahan dihanyutkan oleh air sungai secara perlahan.

2. Pemandangan yang asri

Udara yang bersih dan pemandangan yang hijau memanjakan mata setiap pengunjung. Ditambah sungai mengalir yang kadang menimbulkan suara gemericik karena jatuh dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan benturan ke batu padas yang ada di sekitar sungai. Semakin membuat nyaman bagi pengunjung yang memang ingin menikmati suasana alami itu.

3. *Camping Ground*

Wisata Batu Mentas juga memepersiapkan wilayah yang cukup luas dengan di tumbuhi rumput-rumput pendek yang sangat tepat digunakan untuk *camping*. Pengunjung bisa membawa tenda kemudian membuat sebuah acara bersama kelompok mereka dengan menggunakan fasilitas *camping* yang disiapkan oleh panitia.

4. Tarsius

Ada hewan langka yang menjadi primadona di Belitung. Hewan ini bernama Tarsius. Tarsius juga hidup dan dirawat di Batu

Mentas. Pengunjung bisa melihat Tarsius yang sudah ada di dalam sangkar. Tetapi jika menginginkan langsung melihat di habitatnya juga dimungkinkan. Pengunjung akan ditemani oleh seorang pemandu untuk melihat tarsius di hutan.

5. *Hiking*

Untuk wisatawan yang memiliki minat atau hobi menjelajahi hutan maka wisata Batu Mentas juga bisa menjadi tempat yang cocok. Dengan dipandu oleh orang lokal wisatawan akan diajak menjelajahi hutan dalam beberapa waktu. Bahkan bila menginginkan untuk menginap di tengah hutanpun juga bisa tergantung kesepakatan dengan para pemandu tadi.

6. Kafe di pinggir sungai

Wisatawan juga bisa menikmati minuman dan makanan di kafe pinggir sungai. Ada berbagai minuman dingin maupun hangat serta makanan ringan seperti singkong goreng. Bisa juga memesan makanan berat untuk santap siang dengan menu khas belitung dengan ikan laut dari para nelayan Belitung.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar mulai ikut ambil bagian. Misalnya, menjadi pemandu dalam menjelajahi hutan, mempersiapkan kebun yang akan dipanen, berjualan makanan, dan lain-lain. Budi sangat yakin dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Belitung terutama taman wisata Batu Mentas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat di sekitarnya. Tanda-tanda itu mulai muncul dengan banyaknya wisatawan yang ingin merasakan keasrian Batu Mentas. Ada juga acara menyenatkan diri di hutan selama beberapa malam sehingga para wisatawan merasakan menyatu dengan alam. Tanpa listrik dan sinyal ditemani senter dan gelap serta

sunyinya malam, wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang sulit didapati di kota.

Salah satu andalan Budi untuk mempromosikan taman wisata Batu Mentas adalah tarsius. Menurutnya, tarsius adalah hewan purba yang langka bahkan terancam punah. Sebagaimana dilansir dari laman *Indonesia Tourist News* bahwa Tarsius Belitung mulai dikenali sejak 2006 dan didaftarkan ke IUCN sebagai salah satu satwa yang terancam punah pada 2008. International Union for Conservation of Nature (IUCN) sendiri berdiri pada 1948 dan merupakan otoritas global yang menetapkan status sumber daya alam di berbagai dunia untuk diketahui apa saja yang diperlukan untuk dapat dijaga kelestariannya. Organisasi ini memiliki 1.300 anggota terdiri dari pemerintahan dan organisasi masyarakat. Organisasi itu memberikan pengetahuan dan alat-alat kepada pemerintahan, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan, pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Di dalam IUCN ada 16.000 orang ahli dan enam komisi yang berdedikasi untuk mempertahankan spesies-spesies dalam kategori rentan, kawasan dilindungi, hukum lingkungan, kebijakan sosial dan ekonomi, manajemen ekosistem, serta edukasi dan komunikasi.

Dengan menjadikan tarsius sebagai andalan, taman wisata Batu Mentas jadi lebih cepat dikenal oleh banyak orang karena banyak sekali orang yang ingin melihat langsung monyet hantu ini di habitatnya. Untuk melihat tarsius beraktivitas, harus dilakukan pada malam hari dan ditemani oleh pemandu. Dengan demikian rangkaian ekonominya terjadi, saat menginap wisatawan butuh tempat menginap maka disediakan gubuk penginapan yang layak. Karena menginap juga butuh makan minum disediakan lah sejenis

kafe ala taman wisata Batu Mentas dengan singkong gorengnya yang lezat.

Sebagai Ketua Komunitas Pecinta Lingkungan Belitung (KPLB), Budi juga berupaya meningkatkan daya tarik taman wisata Batu Mentas. Terbukti dengan beberapa wisatawan yang datang jauh-jauh untuk bertanya mengenai tarsius kepada Budi. Relasi yang ia miliki juga bertambah melalui sosial media taman wisata Batu Mentas yang dapat menjangkau wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara.

Kini, meski belum sepenuhnya berganti menjadi ekowisata tapi menurut Budi masyarakat mulai memahami bahwa ekowisata juga memiliki prospek yang menjanjikan jika ditekuni dengan serius. Menjaga alam sekaligus mendapatkan penghasilan pasti lebih menyenangkan daripada menghasilkan uang tetapi merusak hutan dan seisinya. Ini penting untuk dilakukan agar anak cucu turut merasakan kekayaan alam yang indah di Belitung. Demikianlah semangat dan keteguhan seorang Budi Setiawan untuk mewujudkan cita-citanya.

Pelajaran penting yang bisa diambil dari Budi adalah kepeduliannya terhadap lingkungan. Sehingga dia mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk menjaga alam di sekitarnya. Meski berpendidikan tinggi, Budi tidak gengsi untuk memulai sesuatu yang tidak lazim di lakukan oleh kebanyakan orang. Dengan status pendidikan yang tinggi, Budi bisa saja dengan mudah mendapatkan kerja yang lebih mapan baik di kota besar ataupun mungkin perusahaan luar negeri, namun Budi memilih pulang dan menjaga Batu Mentas serta mengembangkannya menjadi tempat wisata.

Poin penting lainnya yang bisa penulis pelajari dari Budi adalah tentang tekad membangun tanah kelahiran menggunakan kemampuan yang dimiliki. Pengalamanya selama menjadi mahasiswa

di Bandung dan di Belanda serta seluruh koneksi yang telah Budi bangun selama kuliah menjadi kekuatan untuk membangun relasi. Sehingga saat Budi menemui masalah dalam menjaga lingkungan Budi menggunakan segenap relasi, pengalaman, serta ilmu yang diperoleh untuk menyelesaikannya. Budi menjadi contoh konkrit bagi setiap pemuda dengan semangat dan tekad yang kuat untuk membawa perubahan. Karenanya, siapapun bisa mengambil inspirasi dari perjuangan orang seperti Budi yang berjuang membangun Taman Wisata Batu Mentas.

Bab 4. Belajar dari Bukit Peramun: Peran Teknologi dalam Wisata Hutan Berbasis Komunitas

Tadzkia Nurshafira

Belitung sering kali dikenal dengan keindahan dan wisata lautnya. Banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri datang ke Belitung untuk melakukan wisata ke pulau-pulau kecil yang ada di kawasan laut Belitung. Para wisatawan tersebut sebagian besar menginap di hotel-hotel yang kian menjamur di berbagai kawasan di Belitung. Meski demikian, Belitung juga menawarkan berbagai bentuk pariwisata non-laut yang tidak kalah indah. Bukit Peramun salah satunya.

Bukit Peramun adalah salah satu destinasi pariwisata berbasis hutan yang terletak di Kecamatan Sijuk, Kab. Belitung. Bagi saya pribadi, Bukit Peramun menjadi destinasi wisata yang sangat menarik karena dua hal. Pertama, ia dikelola dengan mengandalkan teknologi dan, kedua, ia dijalankan dengan prinsip pengelolaan berbasis komunitas.

Saya sangat senang berkunjung ke Bukit Peramun karena bisa banyak mendapatkan pelajaran terkait dinamika pengelolaan

pariwisata di Belitung dari perspektif yang berbeda. Selama ini, ketika saya pergi berlibur ke suatu tempat, saya biasanya menggunakan jasa-jasa akomodasi yang sudah mapan dan mendatangi lokasi-lokasi yang disediakan oleh penyedia jasa pariwisata yang terhubung dalam jejaring yang cukup besar.

Namun, Bukit Peramun menunjukkan bahwa destinasi wisata yang secara geografis terletak cukup terpencil dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat juga dapat menyuguhkan keindahan alam yang sangat asri dengan baik. Dari Bukit Peramun, saya belajar bahwa masyarakat dapat mengembangkan komunitas mereka demi pembangunan bersama di tengah dukungan dari berbagai pihak yang sangat terbatas dan jejaring yang belum terintegrasi dengan kelompok-kelompok pariwisata yang lain. Bukit Peramun juga menunjukkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang dijalankan bersama.

Sejarah Bukit Peramun: Respons atas Kekeringan Air Bersih

Bukit Peramun terletak dalam kawasan hutan produksi dan dikelola berdasarkan izin pembukaan jasa wisata dan jasa lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2013. Bukit Peramun dikelola secara kolektif oleh masyarakat Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kab. Belitung yang tinggal di sekitar kawasan hutan Peramun. Terdapat kurang lebih dua puluh enam (26) orang yang bekerja di Bukit Peramun sebagai pemandu wisata saat ini, dengan Bang Adong sebagai koordinatornya.

Dari total 115 hektare yang ada di bawah pengelolaan Bukit Peramun, hanya 10 persen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan 90 persen harus digunakan untuk tujuan konservasi. Karenanya, pegiat komunitas Bukit Peramun berfokus pada aktivitas

konservasi yang mereka lakukan untuk tujuan kelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Mereka tidak memiliki izin konsesi Hutan Tanaman Industri untuk melakukan penebangan pohon yang, dalam pengelolaan hutan secara umum, sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Kata “peramun” sendiri berasal dari kata “peramoan”, yaitu tempat di mana masyarakat dahulu meramu tanaman herbal yang digunakan untuk tujuan kesehatan dan keperluan melanjutkan hidup. Sekitar 60 persen dari 147 jenis pohon yang ada di Bukit Peramun dapat diolah oleh masyarakat menjadi tanaman herbal untuk, misalnya, menurunkan darah tinggi. Hingga saat ini, masyarakat masih dapat mengambil tanaman tersebut dari dalam hutan. Hal ini dapat dilakukan karena mereka memiliki izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu (HHBK). Selain itu, masyarakat juga secara turun temurun mempelajari pola pengambilan hasil hutan dan tanaman yang berkelanjutan, salah satunya dengan cara pengambilan akar.

Bukit Peramun pada awalnya tidak didesain menjadi sebuah lokasi pariwisata berkelanjutan—ia adalah respons masyarakat atas kekeringan yang terjadi di sekitar Desa Air Selumar. Menurut penuturan Bang Adong, pada 2006, sekitar 200 sumber mata air di Belitung hilang karena aktivitas tambang yang secara aktif dilakukan oleh masyarakat desa. Karenanya, komunitas Bukit Peramun dibentuk untuk melestarikan hutan demi mencegah hilangnya dua belas sumber mata air yang ada di wilayah tersebut.

Para pengelola Bukit Peramun percaya bahwa masalah utama yang akan dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di pulau kecil seperti Belitung di masa depan adalah ketersediaan air bersih. Karenanya, mereka berupaya keras untuk menjaga berbagai sumber mata air yang ada di dalam hutan. Selain itu, masyarakat juga mengamati

punahnya satu jenis kupu-kupu kuning yang sebelumnya kerap ditemui di wilayah tersebut. Berangkat dari hal tersebut, komunitas Bukit Peramun juga berusaha melestarikan flora dan fauna agar dapat terus dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Pada perkembangannya, masyarakat terus mengembangkan hutan dan dikelola menjadi sebuah destinasi wisata berbasis teknologi dan berbasis komunitas. Menurut Denman (2001) dalam Dokumen Pedoman Pengembangan Pariwisata berbasis Komunitas yang diterbitkan oleh *World Wildlife Fund Internasional*, pariwisata berbasis komunitas pada dasarnya menggambarkan peran masyarakat lokal yang sangat besar dalam pengembangan dan kelangsungan aktivitas pariwisata setempat. Dengan kata lain, masyarakat memiliki kontrol penuh dan substansial dalam mengelola daerah wisata tersebut untuk mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi secara kolektif.

Masyarakat di Bukit Peramun terus berupaya menggunakan prinsip ini dalam mengelola hutan. Apalagi ketika pegiat komunitas Bukit Peramun mengalami kendala finansial dalam melakukan aktivitas pelestarian rutin. Pada lima (5) hingga enam (6) tahun pertama sejak 2006, mereka menggunakan uang pribadi untuk menjaga kawasan dan biaya operasional yang lain. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, mereka tidak lagi mampu menanggung sepenuhnya biaya-biaya tersebut. Mereka mulai menjual kerajinan dari buah dan tempurung pohon ulin yang tersedia di dalam kawasan Bukit Peramun kepada masyarakat luas. Meskipun berkontribusi bagi pemasukan komunitas, upaya tersebut masih tidak mampu menutupi seluruh pengeluaran yang diperlukan.

Akhirnya, sejak awal 2017, Bukit Peramun mulai dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata alam berbasis komunitas. Kemunculan film “Laskar Pelangi” yang sangat fenomenal pada 2008 turut

membantu menarik wisatawan berkunjung ke Bukit Peramun. Para pegiat Bukit Peramun mematok harga tiket masuk sebesar Rp 10.000 per orang dan dengan tarif tambahan yang berbeda untuk aktivitas-aktivitas wisata yang ditawarkan. Pendapatan dari tiket tersebut mereka gunakan terutama untuk biaya operasional pelestarian hutan.

Bekerja di Sektor Tambang sebagai “zaman jahiliyah”

Dalam pariwisata berbasis komunitas, peran dan cara pandang dari masyarakat dan pegiatnya sangat vital. Bentuk pariwisata ini hanya bisa berjalan ketika masyarakat memiliki kesepakatan bersama terkait bentuk pengelolaan yang dapat memberdayakan dan memberi keuntungan secara kolektif. Cara pandang mereka terhadap hutan dan pelestarian hutan menjadi penting dalam menentukan bentuk pengelolaan yang dianggap ideal. Latar belakang sosial-ekonomi dan pengalaman mereka juga akan mempengaruhi pilihan mereka untuk menjalankan prinsip pengelolaan berbasis komunitas tersebut.

Sebelum 2006, sebagian besar dari para pegiat Bukit Peramun bekerja sebagai penambang timah dan batu granit atau penebang hutan. Ketika berdiskusi terkait pekerjaan mereka pada saat itu, mereka dengan yakin menyebut periode tersebut sebagai “zaman jahiliyah”—sebuah jaman kebodohan di mana mereka rela mengorbankan kelestarian lingkungan demi mendapat penghasilan tetap yang cukup besar. Karenanya, meskipun saat ini mereka juga memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan lain, tidak ada di antara mereka yang merangkap bekerja di sektor tambang. Mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai sopir truk, nelayan, menanam sayur di kebun, atau bekerja di perkebunan sawit.

*Gambar 2. Para pegiat Bukit Peramun. Sebelah kiri: fot mahasiswa magang di PolGov dan salah satu staf Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Bersama Bang Adong (baju cokelat)
Sumber gambar: Tadzki Nurshafira*

Bagi mereka, bekerja untuk mengelola lingkungan bukan soal menjadi kaya atau miskin—tapi soal menjaga perasaan mereka sendiri. Kebahagiaan yang mereka dapatkan tidak dapat diukur dengan kepemilikan materi. Namun, kebahagiaan didapat melalui keterlibatan mereka dalam menjaga alam. Karenanya, menjaga kelestarian lingkungan sudah menjadi bagian dari identitas yang ingin mereka perjuangkan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Dengan prinsip tersebut, dua tahun awal sejak Bukit Peramun dibuka untuk publik pada 2017, mereka bekerja tanpa mendapatkan kompensasi atau gaji tetap bulanan. Dalam manajemen keuangan, mereka bersepakat bahwa penghasilan yang didapat dari tiket masuk

akan dikumpulkan dalam komunitas dan dikelola secara kolektif untuk keperluan operasional penjagaan kawasan. Baru di tahun ketiga, atau sejak bulan Maret 2019, mereka mulai mendapatkan gaji tetap bulanan sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain menjadi pemandu wisata, para pegiat juga secara aktif menjaga kawasan dengan melakukan patroli agar hasil hutan tidak dirambah, ditebang, atau ditambang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai koordinator, tugas Bang Adong menjadi tidak mudah. Bersama dengan para pegiat lain, ia harus mendorong Bukit Peramun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pegiat Bukit Peramun di tiga ranah berbeda: “kantong”, “otak”, dan “hati.” Hal ini yang ia sebut sebagai tiga bentuk kecerdasan yang harus dimiliki oleh para pegiat komunitas Bukit Peramun. Karenanya, selain mengelola keuangan secara kolektif agar tetap dapat menyejahterakan pegiatnya, mereka juga harus secara aktif berdiskusi terkait pengelolaan lingkungan untuk terus menjaga semangat komunitas.

Pengembangan Aktivitas Pariwisata Bukit Peramun

Dalam menentukan aktivitas pariwisata yang ditawarkan di Bukit Peramun, para pegiatnya melakukan penelitian secara sederhana termasuk secara aktif meminta dan memetakan data ke Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata Kab. Belitung. Ini dilakukan untuk melihat tren, karakter, dan spesifikasi wisatawan yang datang ke Belitung, serta pola manajemen mobilitas turis. Mereka fokus pada apakah turis tersebut datang bersama keluarga atau individu-individu *backpacker*, atau tempat wisata seperti apa yang mereka kunjungi, dan bagaimana ketertarikan mereka pada destinasi wisata berbasis komunitas.

Dari karakteristik yang ditemukan, mereka menentukan paket wisata yang kira-kira akan menarik banyak peminat dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Bukit Peramun. Ini sekaligus menjadi bahan untuk membuat *master plan* atau rancangan utama pengelolaan pariwisata di Bukit peramun. Selain itu, data yang mereka kumpulkan juga digunakan untuk menentukan harga tiket masuk. Karena mereka berupaya mengajak masyarakat lokal untuk turut mengunjungi Bukit Peramun, data pendapatan dan upah rata-rata masyarakat menjadi penting untuk mengukur keterjangkauan harga tiket.

Kemudian, para pegiat komunitas Bukit Peramun juga secara aktif belajar, serta meminta saran dan masukan dari para ahli geologi dan kehutanan, terutama untuk mengetahui sejarah dan asal-usul Belitung, Tarsius, bebatuan dan flora-fauna yang ada di Bukit Peramun. Mereka secara rutin mengirimkan surat pada para ahli atau ke kurator museum yang fokus di sektor tersebut hingga akhirnya mereka datang dan memberikan bantuan ilmu serta berbagi pengetahuan. Karenanya, para pemandu wisata di Bukit Peramun mengandalkan metode *story telling* dalam menceritakan sejarah flora-fauna kepada para wisatawan. Mereka berharap, ketika wisatawan berkunjung ke Bukit Peramun, mereka tidak hanya mendapatkan keindahan alam namun juga ilmu pengetahuan yang mumpuni.

Dalam hal bahasa pengantar yang digunakan dengan para wisatawan, terutama yang berasal dari mancanegara, para pemandu wisata di Bukit Peramun cenderung tidak menggunakan Bahasa Inggris. Karena adanya keterbatasan penggunaan bahasa tersebut, para pegiat Bukit Peramun berupaya menggunakan teknologi untuk mempermudah komunikasi mereka dengan wisatawan asing. Fitur

bilingual—bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris—dalam aplikasi mereka menjadi “*guide virtual*” yang dapat mereka tunjukkan pada wisatawan mancanegara ketika menjelaskan sejarah dan keindahan alam Bukit Peramun. Kadang, mereka juga mengandalkan aplikasi *google translate* jika sangat mendesak. Selain itu, mereka juga mengandalkan apa yang mereka sebut sebagai “bahasa tarzan”, yakni bahasa tubuh atau isyarat, ketika berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Mereka melakukan berbagai cara agar bahasa tidak menjadi kendala dalam komunikasi tersebut.

Hal lain yang juga menarik adalah upaya para pegiat komunitas Belitung untuk mengubah citra dan imaji masyarakat terkait hutan. Dari penelitian mandiri dan informal yang mereka lakukan sebelumnya, mereka menemukan bahwa rata-rata delapan dari sepuluh wisatawan memahami hutan sebagai tempat yang “angker”, “kumuh”, dan penuh dengan binatang buas. Mereka memahami hutan sebagai tempat yang menyeramkan dan tidak dapat dikunjungi karena banyak hal-hal yang tidak diketahui di dalamnya. Karena itu, para pegiat komunitas Bukit Peramun berupaya mengubah pengelolaan pariwisata yang dilakukan menjadi berbasis digital dan dilakukan menggunakan metode-metode yang menyenangkan. Harapannya, supaya teknologi dapat menjadi instrumen yang dapat membantu masyarakat mengubah pola pandangannya terkait hutan.

Gambar 3. Pamflet Paket Wisata Bukit Peramun

Dengan berbagai upaya di atas, para pegiat Bukit Peramun menentukan empat paket wisata utama yang mereka tawarkan. Paket wisata tersebut didokumentasikan dalam pamflet (Gambar 2) yang mereka gunakan sebagai media promosi Bukit Peramun. Pamflet ini disebar ke khalayak luas via media sosial. Versi cetak dari pamflet tersebut juga tersedia dan dapat diambil oleh para wisatawan ketika tiba di Bukit Peramun. Empat paket wisata tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

Pertama, wisata alam. Pada paket ini, wisatawan akan diajak *tracking* dan menyusuri jalur pendakian ke puncak bukit dalam waktu kurang lebih 30 menit. Selama perjalanan, para wisatawan berkesempatan untuk melihat gugusan batu granit berukuran kecil dan hutan kayu ulin yang sudah cukup langka di Belitong. Ketika sampai di puncak, wisatawan dapat melihat keindahan hutan alam, Pulau Lengkuas, serta Laut Cina Selatan dan Natuna.

Kedua, geo-wisata lintas alam. Wisatawan akan menempuh jarak 1,8 km selama kurang lebih dua jam dan berkunjung ke dua belas titik berbeda, beberapa di antaranya kayu seribu akar, gua granit, gua dinosaurus, gua kelayang, gua kelelawar, kawasan hutan ulin, formasi batuan granit berukuran raksasa, dan taman keanekaragaman hayati.

Ketiga, wisata edukasi atau sekolah alam. Paket ini terutama ditujukan untuk memperkenalkan tanaman-tanaman obat herbal yang ada di Bukit Peramun dan sudah digunakan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.

Keempat, pengamatan tarsius liar di malam hari, yang sudah mulai dilakukan sejak 2010. Menurut para pegiat komunitas, hanya di Bukit Peramun para wisatawan dapat melihat dan mendekati tarsius liar dari jarak satu meter, tanpa dikendalikan. Tarsius sendiri adalah primata terkecil di dunia dan salah satu fauna langka yang mendiami Bukit Peramun. Proses sehingga paket ini dapat ditawarkan sangat panjang—perlu waktu dua tahun bagi para pegiat Bukit Peramun untuk melakukan observasi terhadap tarsius liar tersebut. Penelitian itu berupaya melihat secara manual perilaku, daya jelajah, jam keluar, lokasi keluar, dan dalam kondisi seperti apa Tarsius akan muncul. Dari pengamatan itu, pegiat komunitas Bukit Peramun bisa menentukan empat zona lokasi pengamatan tarsius yang dapat dikunjungi wisatawan.

Jika ingin melakukan pengamatan lanjutan yang lebih detail, mereka membutuhkan setidaknya 10 buah CCTV yang dipasang di hutan. Namun, mereka belum memiliki biaya untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan semua upaya pengamatan dilakukan tanpa bantuan dari manapun, mereka membiayai semuanya sendiri. Berkat pengamatan tersebut juga, mereka dapat menentukan durasi dan waktu pengamatan tarsius liar—pengamatan hanya bisa dilakukan tiga kali dalam seminggu di hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan hanya

10 menit untuk tiap kesempatan karena mereka liar dan berpindah-pindah. Jika pengamatan akan dilakukan, sekitar lima belas pemandu akan menyebar di hutan untuk mencari di mana tarsius berada. Meski demikian, hal tersebut tidak terlalu sulit dilakukan karena para pemandu sudah memahami lokasi dan seluk beluk hutan di Bukit Peramun.

Empat paket di atas dapat diambil dan dinikmati oleh wisatawan individu atau keluarga. Terdapat dua paket wisata lainnya, yakni Adopsi Pohon dan Menanam Pohon, yang ditawarkan oleh Bukit Peramun untuk wisatawan dalam kelompok besar, misalnya dari institusi pendidikan atau perusahaan-perusahaan yang mendukung isu pelestarian lingkungan dan ingin mewujudkannya bersama Bukit Peramun. Dua paket wisata ini dapat dilihat di Gambar 4.

Gambar 4. Pamflet Paket Wisata Bukit Peramun sebagai media promosi (halaman 2). Dokumentasi dari Pengelola Bukit Peramun.

Untuk dapat membuat paket tersebut, para pegiat melakukan identifikasi yang cukup intensif dan memakan waktu panjang terhadap flora dan fauna yang ada di Bukit Peramun. Meski para wisatawan hanya membutuhkan sekitar lima menit untuk membaca informasi yang sudah mereka rapikan, butuh sekitar tujuh tahun bagi para pegiat untuk melakukan observasi terhadap flora-fauna tersebut yang telah dimulai sejak 2009 hingga 2016. Mereka mengumpulkannya dalam sebuah *database* berisi nama dan jenis pohon, kegunaan, nama latin, hingga manfaatnya yang kemudian didiseminasikan dengan teknologi sebagai instrumen.

Empat Tahap Pengelolaan Pariwisata Bukit Peramun

Bukit Peramun menggunakan konsep pengelolaan yang berbasis pada tiga hal: hutan untuk penghidupan, konservasi untuk masa depan, dan pariwisata untuk pembangunan berkelanjutan. Melalui prinsip tersebut, pengelola Bukit Peramun membuat empat model tata kelola yang dilakukan sebelum menjalankan aktivitas promosi, sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia dan material yang mereka miliki.

Pertama, tahap pengembangan organisasi. Pada tahap ini, para pegiat Bukit Peramun meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dengan membekali berbagai prinsip dan pengetahuan yang penting untuk menjalankan kegiatan pariwisata. Mereka belajar terkait rutinitas pariwisata, loyalitas, militansi, dan konsistensi pengelolaan. *Kedua*, manajemen lokasi dan risiko. Setelah melakukan pengembangan kapasitas, mereka melakukan survei dan penjelajahan untuk mencari titik mana yang mau ditawarkan untuk pengunjung, daya dukung, serta daya tampung wisatawan yang dapat mengakses Bukit Peramun sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Bukit

Peramun hanya bisa menampung maksimal 1000 orang dalam satu waktu yang bersamaan.

Jumlah itu ditentukan dan dibatasi sebagai cara komunitas Bukit Peramun mengelola risiko dari jumlah pengunjung yang terlalu banyak. Jika jumlah pengunjung melebihi kapasitas pengelolaan sumber daya manusia yang komunitas miliki, area-area konservasi dan perlindungan tarsius akan menjadi lebih padat dan dapat dikunjungi tanpa pengawasan dari para pengelola Bukit Peramun yang bertugas menjaga fungsi konservasi tersebut. Di samping itu, mereka juga melakukan identifikasi flora dan fauna yang ada di Bukit Peramun dan melakukan digitalisasi data yang diperoleh dari identifikasi itu ke dalam bentuk e-book.

Ketiga, aktivitas promosi. Kegiatan ini dilakukan dengan mencetak brosur dan melalui media sosial. Mereka menerima bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjalankan aplikasi pemasaran GoModo. Lewat aplikasi itu, para pengunjung bisa melakukan reservasi, pemesanan, dan pembayaran di aplikasi yang sama untuk masuk Bukit Peramun.

Keempat, pelatihan lanjutan terkait manajemen pelayanan. Bukit Peramun memiliki mitra untuk melatih keahlian tersebut. Mereka juga bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan Kebun Raya Bogor dengan mengirimkan data-data flora dan fauna mereka ke dua institusi tersebut untuk ditelaah secara ilmiah. Selain itu, mereka juga mengirimkan data tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Palangkaraya atau kurator museum. Mereka berupaya untuk mencari ahli-ahli flora dan fauna untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka dan mengintegrasikan sumber daya alam yang mereka kelola dengan pihak-pihak yang relevan. Para pegiat Bukit Peramun percaya bahwa untuk memahami “rumah”

mereka, mereka harus keluar dari rumah itu dan memahaminya dari jauh: hal ini yang mendorong mereka untuk terus belajar dari pihak-pihak di luar Bukit Peramun untuk memahami potensi yang mereka miliki. Saat ini, Bukit Peramun juga baru diresmikan oleh Institusi Pertanian Bogor sebagai salah satu pusat penelitian Fakultas Biologi dan akan terus menambahkan *database* yang sudah mereka punya.

Teknologi Pengelolaan Pariwisata di Bukit Peramun

Pegiat komunitas Bukit Peramun memiliki pandangan yang spesifik terkait bagaimana teknologi dapat menunjang tujuan-tujuan keberlanjutan, tidak hanya untuk kehidupan ekonomi mereka, namun juga untuk tujuan pengelolaan sumber daya alam dalam waktu jangka panjang. Hal ini diiringi dengan kemampuan dari para pengurus untuk fokus tidak hanya pada tuntutan yang muncul dari penggunaan teknologi saat ini, namun juga peluang-peluang perkembangan teknologi yang lebih kompleks di masa depan dan strategi untuk memanfaatkannya. Dalam arti lain, sangat menarik untuk melihat bagaimana masyarakat membuat rencana-rencana jangka panjang, memprediksi tren teknologi yang relevan di masa depan, dan mempersiapkannya di masa sekarang untuk keperluan pengembangan pariwisata Bukit Peramun.

Penggunaan teknologi sebagai instrumen dalam tata kelola pariwisata merupakan cara dari para pegiat komunitas Bukit Peramun untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan masyarakat yang kian bergantung pada penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui telepon pintar (*smartphone*). Karenanya, berbagai data dan informasi yang mereka miliki dimasukkan dalam sebuah aplikasi yang mereka buat dan kembangkan sendiri. Aplikasi ini akan diluncurkan ke publik pada

tanggal 20 Februari 2020 dengan tema seputar “Bukit Peramun 2020 Terasa seperti 2050.” Tema ini dipilih karena para pegiat berupaya menggunakan teknologi yang mereka anggap dapat menjadi sangat relevan di masa depan, meskipun belum banyak digunakan saat ini oleh masyarakat lokal. Secara garis besar, para pegiat Bukit Peramun berupaya menggunakan informasi secara riil untuk perkembangan ekonomi mereka melalui pariwisata, yang mana teknologi akan sangat relevan digunakan untuk pengelolaan pariwisata di masa depan. Mereka percaya penggunaan teknologi dapat memicu revolusi industri 5.0.

Gambar 5. Penggunaan kode batang (QR Code) untuk mempermudah wisatawan mendapatkan informasi terkait peta, flora, dan fauna Bukit Peramun (dalam lingkaran merah). Foto oleh Tadzki Nurshafira.

Sejak 2017, mereka sudah menggunakan teknologi Kode QR (*QR Code*) yang tersedia dalam papan pengumuman di depan pintu masuk Bukit Peramun. Papan-papan berisi Kode QR juga ditempel di jenis flora dan fauna yang berbeda-beda. Kode QR sendiri merupakan kode matriks yang berasal dari kata “Quick Response”—isi kode dapat diurakan dengan cepat dan tepat. Dengan menggunakan

smartphone, para wisatawan dapat memindai kode tersebut dan langsung mendapatkan informasi terkait peta lokasi Bukit Peramun serta penjelasan terkait flora dan fauna di dalamnya (Gambar 3). Penggunaan Kode QR juga terlihat dalam pamflet promosi Bukit Peramun (Gambar 2). Upaya ini dianggap dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses media sosial dan informasi *online* terkait Bukit Peramun.

Meski demikian, mereka menemukan bahwa masyarakat atau wisatawan yang datang ke Bukit Peramun jarang memiliki keinginan untuk membaca. Setelah melakukan evaluasi, mereka melihat bahwa perlu ada unsur-unsur yang menyenangkan dan menantang, dalam informasi yang diberikan kepada wisatawan agar mereka dapat menerima informasi tersebut dengan lebih baik.

Sebagai solusi, pegiat komunitas Bukit Peramun berupaya menggunakan metode lain yang dapat memunculkan unsur audiovisual. Teknologi yang mereka pilih adalah titik-titik berisi hologram yang juga dapat dipindai melalui aplikasi *smartphone* (Gambar 4). Berbeda dengan Kode QR, informasi yang muncul dari pemindaian titik hologram tersebut tidak hanya berupa tulisan, namun video dan audio yang dapat dinikmati wisatawan dengan bahasa pengantar bilingual. Aplikasi yang digunakan untuk pemindaian tersebut bernama KEPO (Kenali Pohon) dan Peramun Hill—dengan dua aplikasi ini, wisatawan hanya perlu mengarahkan *smartphone* mereka pada gambar titik-titik yang berisi algoritma yang sudah dikode dan diterjemahkan dalam sebuah naskah digital.

Gambar 6. Titik-titik hologram (empat titik) yang dapat dipindai melalui aplikasi KEPO dan memunculkan informasi audiovisual terkait flora-fauna Bukit Peramun (lingkaran merah). Foto oleh Tadzki Nurshafira.

Mereka juga akan meluncurkan aplikasi “Mini Zoo Virtual” untuk fauna-fauna yang ada. Mereka tidak dapat membuat satu aplikasi yang terintegrasi karena tiap aplikasi memiliki fungsi dan syarat teknologi yang berbeda-beda, misal dengan GPS atau satelit. Meski demikian, satu aplikasi biasanya hanya dapat menampung informasi terkait tiga puluh jenis pohon. Untuk mengakses lebih banyak informasi, wisatawan perlu meningkatkan (*upgrade*) versi aplikasi mereka dengan memberikan donasi sebesar Rp 10.000 untuk pengembangan Bukit Peramun dan komunitasnya. Menurut informasi dari para pegiat Bukit Peramun, aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi di dunia yang fokus menampung informasi terkait pohon, atau flora dan fauna, dalam suatu ruang spesifik.

Tidak hanya itu—mereka juga menggunakan teknologi untuk membuat *name tag* atau tanda pengenal bagi para pemandu. Wisatawan dapat memindai *name tag* tersebut dan menemukan informasi terkait pemandu tersebut, termasuk nama, latar belakang, hingga keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Fitur ini juga dapat disambungkan langsung ke media sosial seperti Facebook dan Instagram, sehingga dapat memudahkan wisatawan jika ingin mengajukan kritik dan saran ke manajemen dengan merujuk pada pemandu spesifik. Hal ini juga sangat penting bagi proses pengawasan dan evaluasi bagi para pemandu. Selama ini, testimoni ditulis secara manual dalam sebuah buku yang ke depannya akan didigitalkan menggunakan *tab*.

Seluruh aplikasi yang akan diluncurkan ini dikembangkan oleh anggota komunitas sendiri dengan Bang Adong sebagai pelopornya. Menjadi menarik untuk melihat latar belakang dari Bang Adong sebagai salah satu tokoh yang memelopori komunitas Bukit Peramun dan penggunaan teknologi di dalamnya.

Bang Adong sudah berkecukupan di dunia pembuatan perangkat lunak, desain grafis, dan pengembangan teknologi sejak lama. Sekitar tahun 2000-an, Bang Adong bekerja sebagai *developer game online* di Jakarta. Namun, karena pada rentang waktu tersebut *game online* belum menjadi tren yang diminati masyarakat, pekerjaannya tidak begitu menghasilkan. Akhirnya, ia pulang ke Belitung pada 2005. Ia mencoba peruntungannya dengan bekerja di sektor tambang selama sekitar enam bulan. Namun, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak memiliki ilmu dan kemampuan di sektor tersebut. Akhirnya, ia mulai membuat komunitas Bukit Peramun yang berfokus di isu penjagaan kawasan hutan. Hingga saat ini, ia juga masih bekerja di bidang desain grafis melalui penawaran jasa daring. Ia juga memiliki kontrak dengan

beberapa distro di bidang *fashion*, yakni sebagai desainer grafis bagi model-model pakaian yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Dengan modal tersebut, Bang Adong secara aktif dan otodidak terus mempelajari perkembangan teknologi tidak hanya untuk masa sekarang, namun juga prediksi bentuk-bentuk teknologi yang relevan dan digunakan di masa depan. Ia menggunakan pendekatan berbasis riset mandiri untuk melakukan pengembangan tersebut—tidak dalam suatu lembaga formal. Hal ini yang kemudian menjadi kunci penggunaan teknologi dalam tata kelola pariwisata di Bukit Peramun.

Di samping itu, dalam pengembangan Bukit Peramun sebagai wisata hutan berbasis digital, tidak ada lembaga di luar komunitas, baik dari sektor pemerintahan maupun privat, yang mensponsori pengembangan teknologi tersebut. Sejauh ini, terdapat beberapa bantuan dalam bentuk pelatihan bagi para pemandu, namun tidak secara finansial. Misalnya, terdapat binaan dari salah satu bank swasta untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemandu dalam hal memberikan pelayanan jasa pariwisata. Meski demikian, bagi mereka, teknologi dapat mempermudah mereka untuk menyampaikan pesan bahwa “keberadaan hutan sama penting dengan fungsinya.” Karenanya, mereka tetap berupaya mengembangkan teknologi sebagai instrumen yang dianggap paling efektif untuk mengenalkan hutan dan pohon itu sendiri, meski dengan biaya yang sangat terbatas. Untuk membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi, mereka akan menggunakan empat komputer dengan fungsi yang berbeda-beda. Hal ini mereka lakukan karena mereka tidak memiliki biaya untuk membeli satu perangkat komputer yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk membuat aplikasi tersebut.

Ke depannya, Bukit Peramun akan menggunakan pola *start up* yang lebih luas. Mereka melakukan evaluasi terkait teknologi yang

mereka gunakan saat ini dan mereka memprediksikan bahwa aplikasi yang mereka pakai hanya dapat bertahan hingga 1.5 tahun ke depan karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Setelah durasi waktu tersebut, mereka akan melakukan riset kembali untuk mencari teknologi baru yang lebih mutakhir untuk digunakan dalam tata kelola Bukit Peramun. Sebagai contoh, mereka berencana menggunakan sensor panas tubuh untuk menampilkan informasi terkait flora dan fauna Bukit Peramun, sehingga informasi akan keluar ketika para pengunjung mendekati objek flora dan fauna yang dimaksud. Mereka juga berupaya mengembangkan sensor audio untuk tujuan yang sama.

Tantangan dan Masa Depan Bukit Peramun: Pariwisata dan Investasi

Para pegiat Bukit Peramun percaya bahwa pariwisata bisa menjadi solusi ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat Belitung. Hal ini sejalan dengan pembangunan pariwisata Belitung yang terlihat dari beberapa hal. Seperti munculnya rute penerbangan baru dari luar negeri langsung ke Belitung, pengembangan bandara internasional, penetapan Belitung sebagai 10 destinasi wisata baru yang menjanjikan oleh Presiden RI, penunjukan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Belitung, pengintegrasian Belitung dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kemudian, ada pula pengintegrasian Bukit Peramun dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Belitung sebagai kawasan wisata dan dalam Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPERKAB). Dengan berbagai kemajuan ini, para pegiat Bukit Peramun percaya bahwa sektor pariwisata yang sedang dikembangkan akan memajukan mereka dalam jangka panjang.

Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Bukit Peramun. Para pegiatnya percaya bahwa kira-kira butuh sepuluh tahun lagi untuk menjadikan pariwisata di Belitung berkelanjutan. Adapun tantangan yang dihadapi ada tiga. *Pertama*, keterbatasan pemahaman terkait pariwisata yang dialami oleh berbagai operator dan pengelola sektor pariwisata. *Kedua*, tidak terintegrasinya pihak-pihak yang bekerja di sektor tersebut. Dalam arti lain, mereka belum memiliki jejaring yang solid dan bisa diandalkan: mereka bekerja secara terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. *Ketiga*, budaya dan cara pandang masyarakat Belitung yang masih mengandalkan tambang dan hanya ingin mencari penghidupan dengan menjadi pekerja tanpa membuat usahanya sendiri. Mereka percaya bahwa “mining culture” atau budaya tambang yang melekat dengan historisitas Belitung memiliki implikasi pada level moralitas masyarakat, di mana masyarakat hanya mau mendapat uang secara instan dan cepat. Padahal, membangun sektor pariwisata membutuhkan waktu yang lama, serta harus pelan-pelan dan membutuhkan konsistensi. Karenanya, masyarakat yang bekerja di sektor ini tidak akan mendapatkan keuntungan secara langsung dan cepat. Kesadaran ini yang belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di atas, para pegiat Bukit Peramun melakukan berbagai cara. *Pertama*, mereka terus melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya sektor pariwisata. Mereka percaya bahwa masyarakat yang saat ini masih bekerja di sektor tambang pasti akan pindah ke sektor pariwisata di masa depan. Hal ini dikarenakan deposit timah mereka akan berkurang dan lama-kelamaan habis. Ketika masyarakat tidak lagi bisa mendapatkan uang dari tambang, mereka akan masuk ke

sektor wisata. Pegiat Bukit Peramun juga percaya bahwa kesadaran masyarakat terkait kerusakan lingkungan dari pertambangan timah akan semakin meningkat, sehingga mereka tidak akan lagi bergantung pada tambang timah.

Mereka percaya bahwa masyarakat akan menyadari bahwa jika pohon dilestarikan dan dikonservasi, pariwisata akan menyejahterakan dan memberi keuntungan ekonomi jangka panjang bagi mereka. Pohon akan “lebih mahal” kalau dipelihara dan dilihat sebagai objek wisata dibandingkan dengan ditebang untuk keperluan jangka pendek. Wisatawan akan membayar untuk melihat flora dan fauna setiap hari, sehingga sumber pemasukan dari flora-fauna tersebut dalam sektor pariwisata tidak akan ada habisnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan cara pandang dari para pegiat Bukit Peramun. Awalnya, mereka membangun Bukit Peramun untuk menjaga sumber air bersih mereka, namun, dalam perkembangannya, mereka menyadari bahwa secara rasional pariwisata lebih mensejahterakan mereka. Para pegiat Bukit Peramun meyakini bahwa masyarakat lama-kelamaan juga akan menyadari hal tersebut.

Kedua, mereka mengajukan rekomendasi ke Bupati dan Wakil Bupati Kab. Belitung untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan semua operator wisata membawa turis mereka ke objek wisata berbasis komunitas sehingga mereka bisa lebih berkelanjutan. Hal ini karena, menurut mereka, dari 480.000 pengunjung yang datang ke Belitung tiap tahunnya, jumlah wisatawan yang datang ke Bukit Peramun sebagai destinasi wisata berbasis komunitas tidak sampai 1000 orang. Mereka yakin peraturan daerah tersebut dapat membantu mengembangkan sektor pariwisata yang ada karena sektor pariwisata memiliki multi efek secara ekonomi.

Dengan pariwisata, akan banyak bisnis kecil lokal yang bermunculan, misalnya penjual bensin dan warung makanan dan minuman lokal yang dibangun warga. Dalam arti lain, banyak kelompok masyarakat yang akan diuntungkan dari ramainya pengunjung yang datang. Para pegiat Bukit Peramun percaya bahwa sistem ini akan memberi kesejahteraan bagi banyak pihak dan masyarakat kecil. Mereka percaya bahwa mereka tidak boleh senang dan bahagia sendiri, mereka harus mendistribusikan kesejahteraan yang didapat ke berbagai lapisan masyarakat. Jika semua berkecukupan, masyarakat akan hidup damai bersama-sama.

Ketiga, mereka mendukung adanya investasi dari pihak luar untuk membangun sektor pariwisata. Bagi mereka, semua pihak, baik yang ada di dalam maupun di luar Bukit Peramun, memiliki peran masing-masing, tergantung bagaimana mereka mengelolanya. Mereka tidak anti investasi, tapi percaya bahwa investasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Misalnya, mereka dapat meminta bantuan dari para investor sesuai dengan rancangan pengembangan Bukit Peramun dan anggaran yang sudah dibuat. Karena Bukit Peramun mendapatkan izin dari kementerian, mereka wajib membuat rencana kerja tahunan yang akan dilaporkan dan diverifikasi oleh KLHK serta Dinas Kehutanan Kab. Belitung. Mereka kemudian akan merancang model pengembangan yang berbeda tiap tahunnya sesuai dengan perubahan karakteristik pengunjung. Sebab, beberapa pengunjung tidak suka berjalan jauh atau *tracking*, karenanya mereka berencana membuat gondola datar pertama di Indonesia untuk mengatasi situasi tersebut. Mereka kemudian merancang konstruksi, model, dan rencana biaya yang dibutuhkan. Namun, karena tidak punya

sumber dana yang cukup, mereka berharap investor atau pemerintah bisa membantu mereka mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, dalam membuat rancangan anggaran, mereka akan memilah kegiatan apa saja yang bisa didanai secara swadaya oleh masyarakat dengan kekuatan manajemen mereka, dan kegiatan apa saja yang harus menggunakan skema kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembiayaannya. Mereka akan menyusun pola investasi dan skala usaha yang terukur, serta menggunakan model *Memorandum of Understanding* (MoU) yang spesifik dan sesuai dengan konsep yang mereka inginkan. Upaya memilah-milah ini membuat rencana mereka lebih terkelola dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pegiat Bukit Peramun terbuka dengan berbagai pilihan yang dapat membantu mereka. Dengan sistem pengelolaan dan posisi tawar yang cukup kuat, mereka percaya tidak akan “dikebiri” oleh para investor dan dapat memanfaatkan peluang investasi yang datang dengan baik.

Dengan upaya tersebut, bukit Peramun telah menunjukkan bahwa teknologi dan keterbukaan terhadap investasi dapat sejalan dengan pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang mengandalkan teknologi. Ide-ide yang muncul dari teknologi dan pembiayaan dari investor atau pemerintah dapat menjadi peluang bagi berbagai komunitas pariwisata untuk mengintegrasikan diri dengan perkembangan masyarakat yang semakin terintegrasi dengan dunia global. Identitas budaya, cara pandang, serta keterbukaan para pegiat Bukit Peramun menjadi modal yang kuat untuk mendukung kesiapan mereka berinteraksi dengan berbagai aktor di level lokal, nasional, maupun global. Walau perkembangannya berjalan secara perlahan, Bukit Peramun menunjukkan bahwa membangun basis yang kuat “di

dalam” adalah salah satu strategi penting dalam upaya integrasi yang sedang dan akan mereka lakukan. Dengan komitmen dan konsistensi yang mereka miliki, mereka akan terus berupaya untuk menjaga jati diri dan hutan mereka dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk teknologi dan investor. Banyak yang percaya bahwa “negosiasi” dengan faktor-faktor eksternal tersebut akan berjalan mulus di masa depan sejauh mereka tetap membangun basis yang kuat dalam komunitasnya dan tetap berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pariwisata bagi kehidupan ekonomi mereka di masa depan.**

Bab 5. Lubang Membawa Berkah: Cerita dari *Open Pit* Nam Salu, Dulu dan Sekarang

Syahran Firdaus

Mendengar nama Belitung, memori saya tidak pernah bisa jauh dari rangkaian *scene* tentang Film “Laskar Pelangi.” Film fenomenal yang begitu banyak dipuji orang karena kekuatannya dalam mengajak anak-anak muda menggapai mimpinya di tengah berbagai keterbatasan. Bukan hanya tentang mimpi, satu hal yang membuat saya terngiang adalah film ini menawarkan keragaman identitas yang begitu cair. Penerimaan orang-orang Belitung terhadap etnis Tionghoa dan etnis pendatang lainnya tentu menjadi barang mewah yang langka saat ini. Bahkan saya terus terbayang tentang sosok Ahok yang begitu terkenal di Belitung. Sosok politisi keturunan Tionghoa asal Belitung yang sudah kita kenal sepak terjangnya. Betapapun kontroversial sosoknya selama ini, yang jelas dia adalah bukti bahwa Belitung pernah melahirkan sosok politisi yang tumbuh di tengah kuatnya sentimen ras. Berbekal dua memori tersebut, saya sudah mendapat sedikit gambaran kalau Belitung ini pasti memiliki kultur toleransi dan keterbukaan yang tinggi.

Dengan modal kuat berupa ingatan tentang “Laskar Pelangi” dan sosok Ahok yang kontroversial, saya seperti sudah yakin bahwa pulau ini akan menawarkan kisah menarik untuk didengarkan. Mulailah saya untuk mencari-cari informasi kondisi Belitung, ciri khas daerah ini, kultur masyarakatnya, dan lain-lain. Setidaknya misi saya saat itu adalah mendapat petunjuk baru selain “Laskar Pelangi” dan Ahok. Kemudian muncul begitu banyak cerita tentang timah. Komoditas tambang yang begitu terkenal dan menjadi unggulan Belitung. Semakin banyak referensi yang saya baca, membuat saya semakin penasaran tentang Belitung.

Pada November 2019, saya berkesempatan mengunjungi Pulau Belitung. Belum sampai pesawat mendarat di Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin, saya cukup terkejut melihat begitu banyak lubang bekas galian tambang dari ketinggian. Pemandangan yang cukup langka karena baru pertama kalinya saya melihat secara langsung lubang-lubang seperti itu. Pemandangan ‘selamat datang’ membuat saya semakin penasaran dengan Belitung. Keberadaan lubang-lubang tersebut seakan-akan menjadi penanda bagi memori baru tentang Belitung. Belum selesai rasa penasaran tentang “Laskar Pelangi” dan Ahok, rasa penasaran saya kembali bertambah karena lubang-lubang tersebut.

Hari kedua berada di Belitung, rasa penasaran saya terhadap keberadaan lubang-lubang itu mulai terjawab, khususnya ketika saya berkunjung ke tempat wisata *Open Pit* Nam Salu yang berada di Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur. Berbeda dengan wisata lainnya, *Open Pit* Nam Salu tidak menawarkan panorama indah khas pegunungan ataupun panorama ombak khas pantai. *Open Pit* Nam Salu adalah tempat wisata edukasi sejarah dan geologi yang menawarkan cerita menarik tentang timah dan perkembangannya

di Belitung. Komoditas timah yang sudah menjadi ikon di Belitung memiliki keterkaitan erat dengan konteks sosial budaya masyarakat Belitung. Celah inilah yang dilihat oleh masyarakat Desa Senyubuk untuk mengenalkan Belitung melalui sejarah pengelolaan timah. Keberadaan lubang besar bekas tambang bawah tanah peninggalan Belanda menjadi ikon yang menarik. Bukan hanya karena objek ini langka, tapi narasi di belakangnya mengaitkan tempat ini dengan cerita sejarah yang mengagumkan.

Saat itu saya dan rombongan dipandu oleh Bang Tino, salah seorang pemuda asli dari Desa Senyubuk. Awalnya beliau menceritakan tentang konsep wisata ini. Ide untuk membangun tempat wisata ini muncul karena dulu Kecamatan Kelapa Kampit merupakan salah satu pusat tambang timah di Belitung bagian utara. Sekitar tahun 1800-an, masyarakat di Desa Senyubuk sudah menggantungkan hidupnya melalui eksplorasi timah. Karena potensi timah yang besar, banyak korporasi berdatangan untuk ikut mengeksplorasi timah. Yang menarik, penambangan timah di Desa Senyubuk dilakukan tidak hanya di permukaan tanah, namun juga dilakukan di bawah tanah. Saat itu perusahaan asing asal Belanda menemukan cadangan timah yang cukup besar di Kelapa Kampit. Akan tetapi, karena letaknya berada di bawah permukaan tanah, maka perusahaan menggunakan bom dinamit untuk membuka terowongan-terowongan ke bawah tanah.

Cerita yang saya dengar dari Bang Tino ini semakin membuat penasaran. Satu hal yang membuat narasi ini menarik adalah pengelolaan *Open Pit* Nam Salu ternyata sudah dilakukan secara modern ketika dikelola perusahaan asing dari Australia. Mulai dari teknologi yang digunakan, sistem kerjanya, hingga proses pengangkutan material timah. Saat itu mata saya tertuju pada gua

bawah tanah yang menjadi jalan masuk ke lokasi penambangan bawah tanah. Dari papan informasi yang saya baca, gua ini dulunya digunakan oleh para pekerja tambang untuk mengangkat material. Akan tetapi karena kondisinya saat ini sudah cukup rapuh, maka pengunjung dilarang untuk masuk.

Setelah melihat gua tersebut, saya kembali mendengarkan penjelasan dari Bang Tino. Beliau menjelaskan bahwa kondisi sumberdaya manusia di Belitung saat itu tidak cukup memadai dan belum dapat mengelola sendiri potensi tambang yang ada. Situasi ini diperparah dengan kedatangan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja asing, terutama dari Cina, yang semakin membuat posisi mereka tersingkirkan. Penjelasan ini kemudian mengkonfirmasi rasa penasaran saya terkait awal kedatangan orang Cina di Belitung. Pada periode 1800-an akhir, Belitung kedatangan sekitar 4.000 pekerja dari Cina. Hingga 1930, total pekerja Cina yang datang sebanyak 29.000 orang. Kedatangan orang-orang Cina cukup diterima karena mereka mampu melakukan transfer pengetahuan tentang penambangan kepada masyarakat lokal. Penjelasan ini mungkin menjadi jawaban awal dari pertanyaan saya saat melihat “Laskar Pelangi” dan sosok Ahok. Cairnya relasi yang terbangun antara masyarakat lokal dan pendatang keturunan Tionghoa barangkali terjadi karena para pendatang tersebut dapat menjadi mitra yang baik dalam menambang timah.

Berlanjut ke cerita tentang *open pit*, mengikuti kebijakan mengambil alih aset tambang oleh pemerintah pada 1968, mulailah beberapa perusahaan baru masuk menggantikan perusahaan Belanda yang sebelumnya mengelola area tambang di Kelapa Kampit. Menurut penjelasan Bang Tino, salah satu perusahaan tambang yang berasal dari Australia yaitu Broken Hill Proprietary (BHP) melakukan

eksplorasi di kawasan Kelapa Kampit dan kemudian menemukan lokasi tambang bawah tanah yang saat ini dikenal sebagai *Open Pit* Nam Salu pada 1975. Proses pengeboran yang dilakukan hingga mencapai 300 meter ke bawah permukaan tanah menjadikan lokasi ini memiliki keindahan tersendiri. Mendengar banyaknya informasi dari Bang Tino serta foto-foto di papan informasi, saya cukup takjub membayangkan bagaimana *open pit* ini beroperasi pada zaman dulu. Terowongan yang dibangun, akses gua yang dibor sedemikian rupa, serta pembukaan akses jalan yang terisolir menunjukkan bahwa lokasi tambang ini cukup sulit sehingga pastinya membutuhkan ilmu dan modal yang besar untuk mengeksplorasi timah yang ada di bawah tanah.

Saya dan rombongan lalu berjalan menuju lokasi *open pit* yang sudah membuat saya penasaran sejak pertama kali menginjakkan ke Belitung. Perjalanan dari tempat registrasi wisata ke lokasi lubang tersebut tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit dengan jalan kaki. Kondisi di sekitar pun sangat sepi, tidak ada bangunan dan tampak seperti hutan yang dibelah oleh jalan setapak. Begitu sampai di lubang *open pit* tersebut, saya cukup kaget melihat besarnya lubang tersebut dan kedalamannya. Airnya sudah tampak berwarna hijau, beberapa papan informasi ditancapkan agar pengunjung mematuhi aturan selama berada di lokasi. Bang Tino kembali bercerita, dia menunjuk lokasi gua bawah tanah yang diceritakan sebelumnya. Di situlah salah satu pusat aktivitas para penambang. Dari gua tersebut terdapat terowongan yang terhubung dengan lokasi awal kami melakukan registrasi. Bahkan terdapat semacam *lift* manual yang berfungsi untuk mengangkat material tambang dari bawah tanah. Saya mulai sedikit membayangkan proses kerja para penambang di lokasi *open pit* ini. Gambaran tentang lubang-lubang yang terbuka luas mulai terbayang dipikiran saya. Penjelasan Bang Tino memang cukup runtut dan

komprehensif sehingga membuka pemahaman saya tentang *Open Pit* Nam Salu.

Aktivitas pertambangan di *open pit* Nam Salu berhenti total pada 1993. Harga timah yang mulai menurun disertai dengan menurunnya hasil tambang membuat perusahaan menghentikan aktivitas penambangan. Lokasi tambang *open pit* Nam Salu menjadi tidak bertuan dan tidak terurus. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat di Desa Senyubuk berinisiatif untuk mengubah bekas lahan tambang menjadi tempat wisata edukasi. Menurut penjelasan Bang Tino, beberapa pemuda melihat potensi cerita *open pit* ini untuk dijual sebagai representasi pengelolaan tambang di Belitung. Letaknya yang berada di bawah tanah tentu akan menjadi nilai tambah untuk menarik banyak wisatawan. Sejak saat itu, beberapa pemuda mulai menata kawasan tersebut agar menjadi lebih ramah terhadap wisatawan. Bekas kontainer disulap dan dijadikan menjadi *basecamp* pengelola wisata. Papan informasi dibuat di beberapa titik, foto-foto arsip dipajang, serta beberapa alat pengaman seperti rompi dan helm disediakan.

Pengunjung yang datang ke *open pit* didominasi oleh pelajar, mahasiswa, bahkan pengamat ataupun dosen yang tertarik dengan sejarah pengelolaan tambang timah di Belitung. Cerita tentang *open pit* ini bahkan sudah terdengar hingga ke luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Jika melihat sekilas, lokasi wisata *open pit* ini cukup sederhana, fasilitasnya pun tidak semewah layaknya fasilitas wisata pada umumnya. Akan tetapi cerita yang dikembangkan dan kemudian dilekatkan dengan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar telah menjadi nilai tambah bagi lokasi wisata ini. Dampaknya pun cukup dirasakan oleh masyarakat

sekitar. Beberapa rumah masyarakat diubah menjadi *guest house* untuk mengakomodir wisatawan yang ingin menginap. Sajian makanan khas desa setempat juga disajikan untuk lebih mengenalkan budaya masyarakat Belitung.

Open Pit Nam Salu memang menarik, jika dulu lubangnya membawa berkah karena timahnya, saat ini *Open Pit* Nam Salu telah bertransformasi menjadi tempat wisata edukasi untuk mengenalkan sejarah pertambangan di Belitung. Setidaknya ingatan saya tentang Belitung tidak lagi terbatas pada “Laskar Pelangi” dan Ahok. *Open pit* Nam Salu mampu menjawab rasa penasaran saya saat melihat lubang-lubang bekas tambang dari ketinggian di Belitung. Rangkaian narasi yang tersusun tentang *Open Pit* Nam Salu bukan hanya menjadi representasi Belitung dan komoditas timahnya, akan tetapi ada cerita tentang keharmonisan di antara banyak identitas dalam bekerja sama mengelola potensi lokal. Nilai-nilai yang terkait cairnya relasi antar etnis, suku, dan ras telah menjadi kelebihan tersendiri yang mulai sulit untuk kita lihat saat ini. Setidaknya *Open Pit* Nam Salu telah memberikan contoh yang baik, bahwa sumber daya alam tidak selamanya menjadi arena pertarungan untuk saling memperebutkan atau bahkan saling menjatuhkan, ada kalanya pengelolaan sumber daya alam menjadi instrumen untuk saling bertukar pengetahuan dan memupuk toleransi. Pada akhirnya, lubang yang satu ini telah membawa berkah dulu dan sekarang bagi masyarakat sekitar.

Bab 6. Pelangi Penuh Mimpi: Laskar Pelangi dan Pulau Belitung

Susmriti Shrestha

Belitung adalah salah satu tempat terindah yang pernah saya kunjungi. Berhubung saya berasal dari Nepal, sebuah negara daratan, pemandangan pulau-pulau dan pantai adalah hal yang tidak lazim saya lihat. Dari beberapa pantai dan pulau yang pernah saya kunjungi, Belitung adalah tempat favorit saya. Saya kagum dengan keindahan pantai Tanjung Tinggi dan menikmati pengalaman saya berlayar dari satu pulau ke pulau cantik yang lain. Berkunjung ke Belitung menjadi pengalaman luar biasa saya selama melakukan magang di Indonesia. Selain karena pemandangannya yang luar biasa, saya belajar banyak tentang pulau dan sumber dayanya. Sejarah Pulau Belitung yang melakukan transisi peralihan sektor dari timah ke wisata sangatlah menarik untuk saya. Aktivitas sektor pertambangan masih dapat ditemui di Pulau Belitung, namun skalanya kecil atau sering disebut pertambangan artisanal. Sekarang, pulau ini membuka aktivitas ekonomi baru seperti pertanian dan pariwisata.

Museum Kata Andrea Hirata adalah salah satu lokasi wisata di Belitung yang sangat menarik bagi saya. Museum tersebut mirip seperti bangunan Sekolah Dasar (SD) dengan perpustakaan

yang diwarnai dengan lukisan indah berwarna-warni dan kutipan motivasional ditempelkan dan digantung di dinding. Menurut teman-teman saya, Museum Kata Andrea Hirata terinspirasi dan dibangun sebagai bagian setting film dari novel tulisan Andrea Hirata. Saat mengunjungi museum tersebut, saya merasakan semua orang memiliki keterikatan emosional dengan tempat tersebut. Kebanyakan dari mereka sudah menonton film atau pun membaca novel Andrea Hirata. Hal ini membuat saya penasaran, saya ingin mengetahui cerita di balik itu semua. Akhirnya, setelah saya pulang dari Belitung, saya menonton film “Laskar Pelangi” yang diadopsi dari novel otobiografi Andre Hirata. Sembari menonton film tersebut, saya merenungkan ide-ide yang muncul untuk menulis artikel ini.

Bagi saya, novel “Laskar Pelangi” yang menceritakan kisah 10 anak-anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong tersebut mengajarkan arti penting kehidupan, persahabatan dan pendidikan. Cerita itu berawal pada 1974 yang mana saat itu kehidupan masyarakat di Pulau Belitung didominasi kehadiran PT Timah (dulu dikenal dengan PN Timah). Aktivitas pertambangan tersebut sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat Belitung. Apalagi mayoritas penduduk di Pulau Belitung bekerja sebagai penambang timah. Selain itu, film ini juga mengulas tentang ketimpangan sosial di Belitung antara para pekerja tambang dan kuli-kuli tambang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan anak-anak mereka tidak mampu bersekolah. Sementara, anak-anak dari golongan elite dan kaya dapat bersekolah di SD PN Timah dan memiliki kehidupan yang nyaman.

Hak anak-anak atas pendidikan adalah fokus utama yang dibahas dalam film ini. Ceritanya berkisar pada 10 anak yang hampir tidak bisa melanjutkan pendidikannya, namun dua guru mereka dari

SD Muhammadiyah Gantong bertekad untuk mendidik mereka. SD Muhammadiyah Gantong adalah salah satu SD Islam tertua di Belitung. Mereka tidak memiliki sarana, prasarana dan materi yang sama seperti SD PN Timah tetapi memiliki dua orang guru yang sangat baik dan menjadi teladan. Sekolah mengajarkan siswa untuk mengembangkan nilai-nilai moral, berperilaku baik dan mengembangkan keterampilan intelektual daripada mengajar hanya untuk kehidupan duniawi.

Terkadang, sayapun merasa kehidupan yang kita jalani ini tersesat dan terjebak dalam susunan bata dan tembok sekolah, dan kita kehilangan apa yang sebenarnya penting untuk diajarkan. Kita terlalu fokus untuk menggapai impian materialistis dan melupakan inti dari proses pembelajaran. Sebaliknya, sekolah ini mengajarkan bagaimana memahami arti hidup yang sebenarnya dengan membimbing anak-anak untuk memahami pentingnya sikap jujur pada diri sendiri dan untuk selalu ingat dari mana kita berasal. Hal ini memberi kita catatan penting bahwa setiap orang harus dapat bermimpi: meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki, anak-anak dalam novel “Laskar Pelangi” tetap belajar, bermimpi, dan hidup sebaik-baiknya dengan penuh gairah dan kegembiraan. Sekolah menjadi tempat yang memungkinkan anak-anak untuk mulai memimpikan apapun yang mereka inginkan. Bagi saya, cerita ini telah menunjukkan makna belajar sesungguhnya dan membantu saya menyadari betapa banyak perubahan positif yang dapat dihasilkannya. Dari cerita anak-anak tersebut, saya terinspirasi untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain.

Film ini juga menceritakan sekilas sejarah Belitung. Film ini membantu saya untuk belajar tentang masyarakat Belitung, baik dalam hal gaya hidup, tradisi, maupun nilai yang mereka yakini. Hal tersebut

tidak mungkin saya dapatkan dan pelajari dari kunjungan singkat saya di Belitung. Melalui film ini, saya dapat membandingkan perubahan Belitung dari tahun ke tahun. Jalanan Belitung terlihat sangat ramai dengan pekerja-pekerja dari PT Timah berjalan dengan seragam kantor mereka. Mayoritas penduduk, terutama lelaki, berpakaian sama dengan setelan seragam tambang warna biru. Jalanan sangat sibuk, lebih sibuk dari kondisi saat ini.

Pada bagian awal, film ini juga menekankan kompleksitas yang diciptakan oleh sistem birokrasi di pulau itu. Saya menyaksikan ketika 10 siswa gagal berkumpul dan membentuk kelompok, mereka tidak akan diberi izin untuk bersekolah. Narator sempat menggambarkan PT Timah sebagai tembok yang menghilangkan peluang dan harapan masyarakat. Karenanya, secara halus film ini menunjukkan dua sisi mata uang. Satu sisi memperlihatkan perusahaan besar memberikan mata pencaharian, dan di sisi lain memperlihatkan sedikitnya kekuasaan yang dimiliki masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya dan lingkungan mereka. Narator film tersebut berkata bahwa *“Anak-anak miskin tidak bisa bersekolah di salah satu pulau terkaya di Indonesia.”*

Ketika film “Laskar Pelangi” diproduksi, kondisi Belitung sudah banyak berubah. Meskipun ada beberapa penambang artisanal, PT Timah sudah tidak lagi beroperasi dan penambangan timah sangat berkurang dibandingkan jaman dulu. Film “Laskar Pelangi” mengungkapkan bagaimana penambangan timah membatasi orang untuk melihat masa depan mereka secara lebih luas dan memiliki harapan untuk bekerja di luar tambang. Namun, situasi sekarang sudah berubah sama sekali. Orang menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan dan peluang baru di luar tambang seperti pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Meskipun ada banyak

yang berubah, beberapa aspek penting di Belitung masih tetap sama. Misalnya, karakteristik penting Belitung yang terlihat dalam budaya memancing dan budaya minum teh dan kopi, sumber daya alam yang melimpah, serta masyarakat masyarakat lokal yang mayoritas berasal dari Melayu dan Cina. Ketika saya berada di Belitung, situasi tersebut tidak banyak berubah, dulu dan sekarang. Saya sempat bertemu Kucai, salah satu dari 10 pemeran utama di film “Laskar Pelangi”, dan pengalaman ini membuat kunjungan saya ke Belitung menjadi sangat istimewa.

Nilai dan emosi yang dibangun dalam film ini berhasil menggambarkan Belitung. Setelah menonton film dan merefleksikan ke dalam pengalaman kunjungan saya di Belitung, saya menjadi terikat secara emosional dengan tempat dan pesan yang disampaikan film tersebut. Saya jadi paham, mengapa novel dan film ini berpengaruh sekali terhadap popularitas Belitung. Menurut saya, situasi ini menjadi peluang yang bagus untuk menarik pengunjung ke Belitung, baik pengunjung dari nasional maupun internasional. Belitung memiliki banyak potensi wisata. Baik itu dari kawasan wisata yang sudah ada maupun yang belum dilirik. Dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibentuk pemerintah untuk industri pariwisata, Belitung disebut-sebut akan menjadi seperti Bali di masa depan. Saya berharap Belitung memiliki pembangunan pariwisata berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan sumber daya alam. Apalagi, di era media sosial saat ini, *platform* digital memiliki pengaruh besar dan film seperti “Laskar Pelangi” dapat memengaruhi kunjungan pariwisata secara signifikan.

Negara saya memiliki pengalaman serupa dengan Belitung. Di Nepal, terdapat dataran tinggi dengan struktur tanah yang menakutkan dan keindahan alam, namun sangat sedikit yang

dieksplorasi. Saat ini, ada banyak film dan klip lagu menggambarkan dataran tinggi Lembah Mustang yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan popularitas tempat tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengunjung yang berhasil menangkap dan menyadari keindahannya. Akibatnya, pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional meningkat tajam. Untuk itu, saya sangat percaya bahwa iklan digital, film, dan platform media sosial Youtube lewat *vlog* adalah cara yang efektif untuk menarik perhatian khalayak luas. Dan dalam kasus Belitung, *platform* tersebut menjadi penting karena keindahannya, menurut saya, tidak boleh dilewatkan. Saya pasti akan kembali mengunjungi Belitung dengan membawa keluarga serta teman-teman saya untuk menikmati keindahan Belitung bersama mereka.

Bab 7. Tarsius yang Misterius

Muhammad Djindan

Tarsius merupakan salah satu spesies endemik yang dapat ditemui di Pulau Belitung. Beberapa kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan hidup di pulau ini melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian binatang yang hanya hidup di hutan hujan tropis ini. Catatan singkat ini akan menyajikan hasil review mengenai tarsius yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta informasi yang tersedia dari laman-laman organisasi riset maupun musuem yang memiliki reputasi memadai di bidang satwa atau konservasi lingkungan. Meskipun tidak disusun untuk menyajikan catatan spesifik mengenai tarsius yang hidup di Belitung, tulisan ini diharapkan dapat membantu para pecinta lingkungan untuk mempromosikan pentingnya konservasi tarsius serta memberikan informasi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi wisatawan yang tertarik mengenal binatang ini di Belitung.

Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup, peneliti primata menempatkan tarsius sebagai spesies yang masuk ke dalam kelas mamalia, ordo primata, dan famili tarsiidae. Menurut majalah National Geographic, nama tarsius diambil dari keunikan bentuk

tulang pergelangan kakinya (tarsal) yang panjang dan memungkinkan binatang ini untuk melompat dalam jarak yang relatif jauh. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tarsius dapat melompat dari satu ranting ke ranting lain hingga 6 kali tinggi tubuhnya seperti ninja. Tak mengherankan bila, menurut Wisconsin National Primate Research Center, seperempat berat badan tarsius diisi oleh kaki dan otot kakinya. Berat badan seekor tarsius dewasa sendiri berada dalam rentang 59 gram sampai 150 gram.

Ciri tarsius yang cukup menonjol adalah sifatnya yang nokturnal atau beraktivitas pada malam hari dan arboreal atau hidup di pohon. Karakter ini membuat tarsius menjadi salah satu spesies yang jarang difilmkan hingga beberapa tahun terakhir saat teknologi kamera mampu menangkap gerak mereka dalam kondisi yang minim cahaya. Di tengah sunyinya malam, tarsius memburu hewan berukuran kecil seperti belalang, kecoa, atau kadal kecil.

Untuk menunjang aktivitasnya di malam hari, tarsius dibekali dengan mata berukuran besar dan pendengaran yang sangat sensitif. Menurut beberapa pakar, satu bola mata tarsius memiliki ukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan ukuran otaknya. Mata yang besar dengan ukuran pupil yang juga besar meningkatkan jumlah cahaya yang dapat diserap dan membuat binatang ini dapat beraktivitas dalam kondisi gelap. Selain itu, telinga tarsius mampu menangkap suara berfrekuensi rendah yang berguna untuk mendeteksi binatang buruannya. Keunggulan indra penglihatan dan indra pendengarannya diperkuat lagi dengan keunikan morfologi tulang yang membuat tarsius mampu memutar kepalanya hingga 180 derajat ke semua arah. Kemampuan ini penting untuk menghindari ancaman kucing hutan, ular, atau binatang lain yang merupakan predator bagi tarsius.

Beberapa pandangan yang sering disampaikan untuk menunjukkan keunikan binatang ini perlu diklarifikasi dengan mendalami posisi tarsius dalam sistem klasifikasi binatang. Salah satu pandangan yang keliru adalah pernyataan bahwa tarsius merupakan primata terkecil di dunia. Meski memang benar bahwa tarsius adalah salah satu primata dengan ukuran paling kecil, tarsius bukanlah primata terkecil di dunia karena ukuran binatang ini masih lebih besar (hingga 15 cm) dibandingkan *pygmy mouse lemur* (6 – 7 cm) yang hidup di Madagaskar.

Pendapat lain yang dulu dianggap salah adalah pandangan bahwa tarsius merupakan monyet terkecil di dunia. Beberapa pakar melihat ini kurang tepat karena tarsius dan monyet sempat dikategorikan sebagai spesies dalam sub ordo yang berbeda. John G. Fleagle dalam buku *Primate Adaptation and Evolution* menjelaskan bahwa tarsius, seperti kubung (*lemur*), masuk ke dalam sub ordo Prosimii yang berisi primata purba. Sementara itu, monyet, kera, simpanse, dan binatang lain sejenis merupakan bagian dari sub ordo Anthropoidea yang berisi primata tingkat tinggi yang mulai ditemukan pada zaman Miosen. Pembagian ini dilakukan oleh ahli paleoantropologi karena dua sub ordo ini dianggap mewakili gradasi atau tahapan dari evolusi primata. Pandangan ini dibangun dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarsius dan kubung memiliki karakteristik morfologi yang sama dengan karakteristik fosil primata purba yang hidup di zaman Eosen. Pembilahan antara Prosimii dan Anthropoidea membuat penempatan tarsius ke dalam keluarga monyet sempat dianggap kurang tepat.

Meskipun demikian, analisis biologi molekular yang dilakukan oleh Meireles, Czelusniak, Page, Wildman, dan Goodmant dalam buku *Tarsiers: past, present, and future* menunjukkan pembagian antara Prosimii dan Anthropoidea ternyata tidak dapat mewakili

model evolusi dalam ordo primata dengan akurat. Penelitian terbaru menunjukkan ordo primata lebih cocok dibagi ke dalam sub ordo Strepsirhine yang diisi oleh primata berhidung basah dan sub ordo Haplorine yang digunakan untuk mewadahi primata berhidung kering. Dalam kategorisasi ini, tarsius tidak lagi dikelompokkan bersama kubung ke dalam sub ordo Strepsirhine, namun dimasukkan ke dalam sub ordo Haplorine bersama kera, monyet, dan primata lain yang tidak lagi memiliki ciri morfologi primata purba. Sehingga, menyebut tarsius sebagai salah satu keluarga monyet dengan ukuran terkecil di bumi merupakan pernyataan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada mengatakan bahwa tarsius adalah primata terkecil di dunia.

Penjelasan tentang posisi tarsius di atas merupakan salah satu indikasi bagi pentingnya posisi spesies ini untuk menjelaskan laju dan alur evolusi primata. Di satu sisi, tarsius memiliki ciri primata purba seperti kubung yang juga hidup secara nokturnal dan menunjukkan bahwa binatang ini telah menginjakkan kaki di bumi jauh lebih lama dari primata lain seperti monyet dan simpanse. Namun, tidak seperti kubung yang memiliki hidung basah, tarsius merupakan primata berhidung kering dan memiliki ciri serta bentuk bagian-bagian tubuh yang dekat dengan monyet. Keunikan ini membuat tarsius menjadi spesies yang memiliki posisi kunci bagi usaha untuk memetakan pola evolusi primata.

Perdebatan mengenai taksonomi tarsius tidak hanya terjadi di tingkat sub ordo seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pembaruan kategorisasi bagi tarsius juga terjadi di tingkat genus dan spesies yang penting untuk memahami perbedaan serta persamaan antara tarsius di Kalimantan dan Sumatra, dengan tarsius di Filipina, dan tarsius di

Sulawesi. Pada tahun 1955, pakar primata Inggris bernama William Charles Osman Hill mendetailkan klasifikasi tarsius hingga ke tingkat genus dan spesies. Dalam buku *Primate: Comparative anatomy and taxonomy*, Hill menjelaskan bahwa Tarsius merupakan genus dengan tiga kelompok spesies yang dipisahkan oleh batas geografis: Pertama adalah *Tarsius spectrum* yang hidup di Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (*Eastern Tarsier*). Kedua adalah *Tarsius bancanus* yang tinggal di Kalimantan dan bagian selatan Sumatera termasuk pulau-pulau kecil di antaranya seperti Belitung (*Western Tarsier*). Ketiga adalah *Tarsius syrichta* yang ditemukan di gugusan kepulauan di Filipina bagian selatan (*Philipine Tarsier*).

Taksonomi yang digunakan selama lebih dari setengah abad tersebut diperbaiki ketika Colin Groves dan Myron Shkelle menerbitkan hasil penelitiannya di *International Journal of Primatology* pada tahun 2010. Studi ini menemukan perbedaan karakteristik yang cukup mencolok antara ketiga spesies tarsius di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra, serta Filipina. Mulai dari ukuran gigi, ukuran mata, ukuran tungkai belakang, jumlah kromosom, hingga karakter sosio-ekologis ketiga kelompok spesies tarsius tersebut. Groves dan Shkelle menekankan bahwa perbedaan diantara ketiga kelompok tarsius tersebut tidak hanya terbatas pada lokasi tempat mereka hidup. Lebih jauh lagi, perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi dasar untuk membagi genus yang sebelumnya diseragamkan oleh Hill. Groves dan Shkelle kemudian merevisi genus yang awalnya hanya ada satu (Tarsius) menjadi tiga, yaitu genus Tarsius untuk spesies yang hidup di Sulawesi dan sekitarnya (*Eastern Tarsier*), genus Carlito untuk spesies yang hidup di Filipina bagian selatan (*Philipine Tarsier*), dan genus Cephalopachus untuk spesies yang hidup di sekitar Kalimantan

dan Sumatra (*Western Tarsier*). Pendapat ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar ahli primata dan menjadi acuan dalam buku teks utama seperti *Handbook of the Mammals of the World* yang disunting oleh Don E. Wilson dan Russell A. Mittermeier.

Dengan perbaikan genus tersebut, nama yang disematkan pada tarsius di ketiga lokasi endemiknya pun ikut berubah. Tarsius di daerah timur secara ilmiah disebut sebagai *Tarsius tarsier*, sementara tarsius di Filipina memiliki nama *Carlito syrichta*, dan tarsius yang ada di barat, termasuk tarsius yang ada di pulau Belitung disebut *Cephalopachus bancanus*. Perbedaan karakteristik antara setiap genus yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Ciri	<i>Tarsius tarsier</i> (Sulawesi dan sekitarnya)	<i>Carlito syrichta</i> (Filipina)	<i>Cephalopachus bancanus</i> (Kalimantan, Sumatra, dan Belitung)
Ukuran gigi	Paling kecil	Sedang	Paling besar
Ukuran mata	Paling kecil	Sedang	Paling besar
Ukuran tungkai belakang dan tangan	Paling kecil	Sedang	Paling panjang
Jumlah kromosom	46	80	80

Ciri	<i>Tarsius tarsier</i> (Sulawesi dan sekitarnya)	<i>Carlito syrichta</i> (Filipina)	<i>Cephalopachus bancanus</i> (Kalimantan, Sumatra, dan Belitung)
Karakter sosioekologi	Paling memiliki sifat sosial: berkelompok secara sosial	Menengah: tidak berkelompok di alam bebas namun dapat berkelompok bila berada dalam penangkaran	Paling anti sosial: tidak berkelompok di alam bebas dan tidak dapat hidup secara berkelompok di dalam penangkaran

Tabel 1. Perbandingan ciri tiga genus tarsius (diadaptasi dari artikel Groves dan Shkelle)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tarsius yang ada di Belitung memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan tarsius yang ada di Sulawesi maupun di Filipina. Meski ukurannya termasuk yang paling besar, tarsius di Belitung merupakan jenis tarsius dengan karakter yang paling lembut, suka hidup menyendiri, tidak bisa berada dalam situasi yang penuh tekanan, dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Kerumitan karakter tarsius ini menjadi salah satu faktor yang membuat penangkaran tarsius menjadi sebuah usaha yang tidak mudah. Bahkan, menurut National Geographic, hanya ada enam kebun binatang di dunia yang memiliki spesies tarsius di dalam koleksinya.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) membagi status konservasi spesies di dunia ke dalam sembilan kategori yaitu: punah (*extinct*), punah di alam liar (*extinct in the wild*), terancam punah/kritis (*critically endangered*), genting atau terancam (*endangered*), rentan (*vulnerable*), hampir terancam (*near threatened*), berisiko rendah (*least concern*), informasi kurang (*data deficient*), dan belum dievaluasi (*not evaluated*). Setiap kategori mewakili status keberadaan spesies di muka bumi berdasarkan penelitian para pakar. Misalnya spesies dalam status punah berarti spesies ini tidak lagi ditemui di manapun di dunia. Sementara spesies yang punah di alam liar berarti keberadaannya hanya dapat ditemukan di penangkaran.

Menurut hasil penilaian IUCN yang terakhir diperbaharui pada tahun 2015, jumlah populasi tarsius yang ada di Belitung berada dalam kondisi yang terus menurun. Dengan data tersebut, status konservasi tarsius Belitung saat ini masuk dalam kategori rentan atau *vulnerable*. Ancaman utama bagi keberlangsungan populasi hewan ini adalah rusaknya habitat asli mereka karena alih fungsi hutan yang biasanya dilakukan untuk ekspansi perkebunan. Menurut IUCN, di beberapa tempat ancaman bagi tarsius juga datang dari praktik jual beli tarsius secara ilegal untuk dijadikan sebagai binatang peliharaan. Terakhir, beberapa kelompok masyarakat secara keliru melihat tarsius sebagai hama bagi tanaman petani atau simbol hewan yang membawa kesialan. Persepsi-persepsi semacam ini juga turut mengancam keberadaan tarsius di alam liar.

Di Belitung sendiri paling tidak ada dua tempat yang menjadi lokasi penangkaran tarsius yang dalam bahasa lokal disebut sebagai *pelilè'an*, yaitu di Bukit Peramun dan di Taman Wisata Batu Mentas. Dua lokasi penangkaran tarsius yang dikelola oleh kelompok masyarakat ini merupakan alternatif tujuan wisata selain pantai dan

pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Belitung. Saat mengunjungi Batu Mentas di sekitar pertengahan 2018, penulis masih ingat kehangatan suasa hutan yang hanya berjarak sekitar 30 menit dari bandar udara Belitung. Walau saat itu kami mendatangi Batu Mentas pada siang hari, penulis cukup beruntung karena dapat melihat secara langsung beberapa ekor tarsius yang sedang tidur di atas pohon. Memang saat itu pengelola Batu Mentas sedang berusaha mengembangbiakkan tarsius di dalam lingkungan yang dapat dikontrol. Sehingga, kami dapat mengamati beberapa ekor tarsius yang dipisahkan di dalam beberapa sangkar. Walau berada di dalam lingkungan yang terkontrol, binatang ini nampak tidur dengan cukup damai karena sangkar yang terbuat dari kain tipis dan transparan seperti kelambu ini memiliki ukuran cukup besar. Selain itu, di dalamnya terdapat pohon-pohon yang tumbuh secara alami dan menjadi tempat binatang ini hidup.

Saat itu, Budi Setiawan, pengelola Batu Mentas yang juga menjadi pelopor konservasi tarsius tidak menjelaskan berapa banyak jumlah tarsius yang masih hidup di Pulau Belitung. Menghitung populasi binatang ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena mereka hanya aktif di malam hari dan pada siang hari mereka tidur di dalam rimbunnya batang pohon-pohon besar. Terlepas dari hal ini, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang semakin hari semakin cepat dan pembalakan kayu yang dilakukan secara ilegal di pedalaman hutan merupakan dua ancaman utama bagi tarsius di Belitung. Perluasan perkebunan kelapa sawit serta penggundulan hutan akan menghancurkan habitat alami binatang ini dan mengganggu kondisi mereka. Apalagi tarsius yang ada di Belitung merupakan tarsius yang memiliki karakter paling rentan: tidak dapat hidup dalam tekanan yang berlebihan, cenderung hidup menyendiri, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Sehingga, menurut Budi, salah satu kunci untuk menjaga populasi tarsius yang menurut

IUCN semakin menurun adalah dengan mempertahankan hutan hujan tropis di Belitung dari alih fungsi lahan dan meminimalisir/mengatur kontak antara tarsius dengan manusia.

Di atas semua hal yang sudah kita pelajari mengenai tarsius, para pakar mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah soal tarsius masih berada di tahap permukaan. Masih ada banyak sekali misteri mengenai tarsius yang belum dieksplorasi. Mulai dari posisi tarsius dalam taksonomi makhluk hidup dan peran persisnya dalam evolusi primata, variasi jenis spesies atau sub-spesies tarsius di dalam satu genus, hingga ke perilaku sosio-ekologisnya yang juga berbeda di setiap tempat. Dengan demikian, penelitian-penelitian lanjutan untuk menawab perbagai isu hal yang belum dieksplorasi ini menjadi agenda yang perlu dipikirkan oleh semua pihak. Ini semua hanya dapat dilakukan bila kita mampu menjaga dan meningkatkan jumlah populasi tarsius yang ada melalui upaya konservasi yang sistematis dan terukur.

BAGIAN 2

DINAMIKA SITUASI

SOSIAL POLITIK

Bab 8. Dinamika Antara Manusia dan Timah di Bangka-Belitung

Wegik Prasetyo

Pendahuluan

Ketika mendengar kata Bangka dan Belitung, salah satu hal yang terlintas di kepala adalah timah. Kedua pulau tersebut merupakan pusat penambangan timah di Indonesia. Timah telah menjadi bagian hidup masyarakat Bangka dan Belitung sejak lama. Tepatnya sejak awal abad ke-16, masyarakat di Kepulauan Bangka dan Belitung telah melakukan penambangan timah. Mereka terutama mengekstraksi timah sebagai bahan baku koin dan peralatan rumah tangga. Sejarawan Erwiza Erman mencatat bahwa dari abad ke-15 hingga abad ke-17, dalam upacara keagamaan dan pertunjukan ritual di daratan Tiongkok, instrumen dan ornamen yang terbuat dari timah Bangka dan Belitung sangat melimpah. Demikian pula, kerajaan kolonial Belanda di kawasan itu memperlakukan timah sebagai salah satu komoditas terpenting dari kawasan Timur. Mereka menggunakan timah sebagai bahan pembuatan wadah yang membawa rempah-rempah dan penyimpanan daun teh dari Timur ke Eropa.

Sejarah kedua pulau tersebut memang tidak terlepas dari sejarah panjang penambangan timah yang ada di sana dan berpengaruh terhadap banyak aspek, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Timah telah menjadi komoditas yang menjadikan Bangka dan Belitung masuk ke dalam perdagangan internasional baik di Asia pada abad ke-18 maupun di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19 dan 20. Timah juga yang mendorong perubahan tata kelola pemerintahan Bangka dan Belitung di masa lalu. Pembentukan kampung-kampung di Bangka dan Belitung merupakan contoh nyata bagaimana politik “resettlement” Belanda untuk memperluas daerah eksploitasi timah. Selain itu, pembentukan kampung juga ditujukan untuk mempermudah kontrol atas pendudukan, penghitungan tenaga kerja, dan penarikan pajak. Perubahan tata kelola pemerintahan juga mencakup reorganisasi sistem pemerintahan Bangka dan Belitung serta pemisahan urusan pemerintahan dengan urusan manajemen timah pada 1913. Tidak mengherankan kalau komoditas ini menjadi salah satu faktor yang menentukan perjalanan sejarah kedua pulau tersebut.

Dalam perkembangannya kini, timah menjadi salah satu komponen kunci bagi perkembangan teknologi. Hal ini tidak terlepas dari sifat material timah. Timah memiliki titik leleh yang rendah dan merupakan penghantar alur listrik yang baik sehingga menjadi logam yang populer untuk mematri. Dengan karakteristik itu pula, timah menjadi sumber utama penyolderan dalam pembangunan sirkuit elektronik. Seiring dengan semakin pentingnya peran timah, khususnya sebagai konduktor teraman untuk komponen listrik dan perangkat digital, komoditas ini menjadi salah satu komponen penting dalam perkembangan teknologi.

Kebutuhan akan timah juga meningkat seiring dengan tingginya permintaan pasar internasional dan kebutuhan manusia akan teknologi. Berdasarkan data *International Tin Association* (ITA) terjadi peningkatan 3,2 persen konsumsi logam timah pada 2017 dibandingkan pada 2016. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan industri elektronik. Pada 2015, tercatat total produksi timah dunia sebesar 339,54 Kton yang sekitar 20 persennya disuplai oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara produsen timah terbesar di dunia setelah Cina. Timah dari Bangka dan Belitung sebagian besar beredar secara global, sedangkan timah yang ditambang dari Cina sebagian besar digunakan untuk keperluan domestik.

Negara	Unit	Total Produksi
Cina	Kt	162,00
Indonesia	Kt	69,50
Malaysia	Kt	30,26
Thailand	Kt	10,50
Negara lain di Asia	Kt	8,40
Total Produksi Asia	Kt	280,66
Bolivia	Kt	15,33
Brazil	Kt	11,10
Peru	Kt	20,52
Total Produksi Amerika Selatan dan Tengah	Kt	47,15
Belgia	Kt	8,86
Polandia	Kt	2,07

Negara	Unit	Total Produksi
Rusia	Kt	0,20
Total Produksi Eropa	Kt	11,13
Afrika dan Australia	Kt	0,60
Total Produksi Global	Kt	339,54

Sumber: Laporan Tahunan 2017 – PT Timah Tbk

Kebutuhan global atas timah diprediksi akan terus meningkat karena sampai saat ini belum ada logam lain yang menyerupai sifat materialitas timah dalam penyolderan. Pada 2018, para peneliti dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), merilis daftar logam yang permintaannya akan sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Dalam daftar ini, timah menempati peringkat tertinggi sebagai logam yang permintaannya diprediksi akan meningkat.

Transformasi Material Timah

Sejak masyarakat adat di Pulau Bangka dan Belitung menemukan timah, komoditas ini telah berubah menjadi sesuatu yang disebut Jane Bennett dalam buku *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things* sebagai *vital material*. Gagasan Bennett tentang vitalitas material mewakili upaya filosofis untuk memikirkan kembali tentang hubungan materi dengan kehidupan dalam masyarakat modern. Materi seringkali dianggap sebagai benda pasif yang kecil dampaknya atau tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan. Hal ini ditentang oleh Bennet yang berargumen bahwa kumpulan benda/materi tidaklah pasif ataupun tidak berdampak, tetapi memiliki kapasitas untuk menyusun jaringan aktor yang kompleks.

Yang saya maksud dengan “vitalitas” adalah kapasitas benda - makanan, komoditas, badai, logam - tidak hanya untuk mencegah atau menghalangi keinginan dan rancangan manusia, tetapi juga untuk bertindak sebagai seperti perantara atau memaksa dengan trajektori, kecenderungan, atau tendensi mereka sendiri. (Bennet, 2010; diterjemahkan oleh penulis)

Pada masa awal penemuan timah di Bangka-Belitung, Orang Lom; suku tertua di Pulau Bangka, menggunakan timah untuk mereproduksi benda-benda yang mewakili identitas budaya mereka. Dandanan yang dikenakan oleh masyarakat adat menandakan nilai mereka sebagai makhluk budaya. Dalam konteks tersebut timah mungkin dianggap bukan sebagai komoditas dengan nilai moneter, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya. Di masa kini, hubungan manusia dengan timah dari Belitung telah menjelma menjadi komoditas yang bernilai moneter, sumber daya yang dapat menghasilkan uang bila dieksploitasi. Timah telah menyebar ke seluruh dunia dan mengalami perubahan manfaat karena sifat materialnya. Timah menjadi salah satu bahan terpenting dalam komponen elektronik sebagai bahan solder. Penyolderan membentuk kemajuan teknologi yang mewakili perkembangan budaya dan teknologi kita di zaman sekarang. Dengan kata lain, konsumsi dan komodifikasi timah global tidak hanya berkontribusi pada transformasi geologi yang terjadi di Bangka dan Belitung, tetapi juga interaksi sosial antara materi anorganik dan manusia.

Masyarakat Bangka-Belitung dan Penambangan Timah

Di masa kini, ada dua kategori penambang: penambang inkonvensional *artisanal* dan penambang skala industri yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Penambangan inkonvensional adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan penambangan

timah lokal berskala kecil yang semakin aktif setelah reformasi. Penambang skala kecil ini menggunakan teknik penambangan tradisional dengan menuangkan air bertekanan ke atas endapan kasiterit untuk memisahkan bijih timah. Perantara lokal kemudian membeli bijih timah yang sudah disaring dan mendistribusikannya ke perusahaan peleburan. Sedangkan penambangan skala industri yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan merupakan penambangan dalam skala besar yang menggunakan teknik penambangan modern. Pada 2016, terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OP dan IUP OPK) yang telah memiliki smelter sebanyak 29 perusahaan, yang mana sebagian besar berlokasi di Bangka Belitung.

No	Kabupaten	Provinsi	Jumlah Smelter
1	Bangka	Bangka Belitung	8
2	Bangka Barat	Bangka Belitung	1
3	Pangkalpinang	Bangka Belitung	12
4	Bangka Tengah	Bangka Belitung	1
5	Belitung	Bangka Belitung	2
6	Belitung Timur	Bangka Belitung	2
7	Karimun	Kepulauan Riau	2
8	Lingga	Kepualaan Riau	1
Total			29

Sumber: Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tahun 2016

Dampak Penambangan Timah terhadap Perubahan Lanskap Belitung: Cerita dari Lapangan

Ketergantungan terhadap timah sangat terlihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bangka Belitung. Sekitar 20 persen dari total PAD Provinsi Bangka Belitung berasal dari pertambangan timah. Selain itu, saat ada moratorium penghentian ekspor timah, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung langsung turun drastis dari 5,3 persen ke 2,6 persen. Ketergantungan terhadap timah membawa dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan di Belitung. Misalnya, debu-debu kaolin yang dapat mengganggu pernafasan, deforestasi dan degradasi hutan, hingga banjir sebagai akibat dari partikel lumpur sisa tambang yang mempercepat sedimentasi di daerah aliran sungai.

Gambar 7. Proses pengolahan timah rakyat dan dampak terhadap lingkungannya.

Salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan lingkungan terparah adalah Kabupaten Belitung Timur. Laporan Mongabay menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami persoalan lingkungan akibat rusaknya sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS). Ada dugaan kuat bahwa kerusakan DAS disebabkan oleh aktivitas penambangan timah, serta pembukaan lahan perkebunan skala besar, seperti perkebunan sawit. Selain menyebabkan banjir, kerusakan DAS di Kabupaten Belitung Timur

juga menyebabkan hilangnya hutan mangrove dan menurunnya kualitas sumber air. Banjir besar pertama Kabupaten Belitung Timur, tercatat pada Juli 2017 dengan ketinggian air berkisar 2-3 meter. Penelitian Universitas Bangka Belitung (UBB) yang berjudul “Analisis Banjir Belitung Timur” mencatat sekitar 152.477,70 hektar lahan yang terdampak banjir pada tahun tersebut.

Kerusakan lingkungan lain terlihat dari bekas tambang yang tidak direklamasi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga akhir 2019 tercatat ada 12.607 lubang tambang di lahan lebih dari 15.000 hektare. Dari 200.000-an hektare lahan kritis, reklamasi baru dilakukan di lahan seluas 2.200 hektare. Walhi Bangka Belitung menjelaskan bahwa proses pengangkutan timah menyebabkan 320.000 hektare lahan darat dan sejumlah wilayah pesisir menjadi lahan kritis. Tercatat dari bulan April hingga Agustus 2019, 24 warga meninggal dunia karena tenggelam dibekas galian lubang tambang. Selain itu, di dalam lubang tambang yang berisi genangan air, nyamuk malaria berkembang biak cepat dan menjadikan Bangka Belitung menjadi daerah endemik malaria.

Ketergantungan terhadap tambang timah bukanlah hal baru bagi masyarakat Belitung. Masyarakat Belitung sudah menikmati keberlimpahan atas timah sejak masa kolonial Belanda. Bahkan beberapa kawasan di Belitung sudah memperoleh aliran listrik saat daerah-daerah lain belum mendapat bisa mengakses listrik.

“Kawasan di sini sudah teraliri listrik sejak dulu, bahkan sejak jaman Belanda. Bahkan kami sudah bisa membeli barang elektronik seperti kulkas maupun televisi model terbaru, yang jika rusak tidak bisa diperbaiki karena tidak tersedia tempat perbaikannya” – kata salah satu warga Belitung yang kami datangi kediamannya untuk makan siang bersama.

Pernyataan itu juga sekaligus menyiratkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat waktu itu (saat tambang timah sedang berjaya) mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat mampu membeli barang-barang tersier dan didukung oleh listrik yang memadai. Selain itu, masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja timah juga mendapat tempat tinggal yang sangat memadai. Untuk ukuran rumah jaman dahulu, rumah-rumah para pekerja ini sudah bertembok beton, beralas ubin, dan beratap genteng. Saat ini rumah-rumah tersebut telah diakuisisi oleh keluarga mantan pekerja dan sebagian difungsikan sebagai *homestay*.

Gambar 8. Salah rumah mantan pekerja PT Timah. Dokumentasi pribadi.

Permasalahan muncul ketika terjadi krisis industri timah dunia akibat hancurnya *International Tin Council* (ITC) pada 1980-an. Krisis tersebut membuat PT Timah selaku perusahaan tambang yang mengelola industri timah melakukan perubahan fundamental. Perubahan yang dilakukan oleh PT Timah salah satunya adalah

penghentian penambangan timah di kawasan Belitung. Dengan berhentinya penambangan timah di Belitung, seluruh struktur ekonomi masyarakat yang bergantung terhadap penambangan timah juga ikut mati. Sebagian masyarakat tetap tinggal walau berganti profesi, sebagian yang lain memilih keluar Belitung untuk mencari pekerjaan lain. Namun, restrukturisasi perusahaan yang dilakukan pada 1990-an membuat PT Timah kembali ke Belitung.

*Gambar 9. Lubang bekas tambang Open Pit Nam Salu, Belitung Timur.
Dokumentasi Pribadi.*

Penutup

Penambangan timah di Belitung yang masih berjalan hingga saat ini, merupakan hal kompleks. Di satu sisi, kepergian PT Timah dari Belitung meninggalkan rasa trauma bagi sebagian masyarakat. Rasa trauma ini turut mendorong sebagian masyarakat untuk menggeluti sektor pariwisata daripada tambang. Apalagi sebagian

masyarakat telah memahami bahwa praktik penambangan telah memberikan kerusakan masif pada lingkungan. Namun di sisi yang lain, permintaan global terhadap kebutuhan timah terus meningkat, seiring perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0. Saat ini, timah merupakan material yang tidak tergantikan sebagai bahan penyolderan untuk berbagai perangkat sirkuit elektronik. Hal tersebut membawa dilema masyarakat Belitung dalam menentukan pilihan antara memilih sektor tambang atau non-tambang. Tambang timah memang menawarkan peningkatan ekonomi yang signifikan, namun tambang timah juga menciptakan ketergantungan serta menghasilkan dampak kerusakan lingkungan.

Situasi tersebut harus dikelola dengan bijak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai kepentingan harus diakomodasi secara berimbang dan tentunya memikirkan kepentingan jangka panjang. Pengalaman banyak daerah, baik yang berhasil maupun yang gagal, dalam mengelola dengan bijak kekayaan sumber daya alam dapat dijadikan pelajaran oleh Belitung. Pemerintah harus memiliki *sustainability policy* atau kebijakan keberlanjutan yang berfokus untuk menjaga keberlanjutan temporal dari tujuan ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial di seluruh skala spasial yang relevan. Keberlanjutan, dengan kata lain, adalah distribusi perhatian maupun urusan dari banyaknya agregasi kepentingan. Sedangkan masyarakat, harus memperkuat kontrol publik atas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Kontrol publik memiliki peranan penting, selain berfungsi sebagai *checks and balances*, kontrol publik diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang menyehaterakan masyarakat.

Bab 9. Kewirausahaan Sosial dan Pariwisata berbasis Komunitas

Nora Iman Hagesæther

Selama saya tinggal di Indonesia, saya menyaksikan berbagai komunitas yang bekerja bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk generasi di masa mendatang. Salah satu dari banyak kesamaan yang dimiliki komunitas-komunitas tersebut adalah keinginan mereka untuk mencari alternatif bagi industri ekstraktif, contohnya melalui sektor pariwisata. Meskipun setiap tempat dan komunitas memiliki karakteristik berbeda serta memiliki peluang dan tantangannya masing-masing, hal-hal yang saya pelajari dan alami di Belitung mengingatkan saya pada berbagai tempat lain di Indonesia dan di negara saya sendiri, Norwegia.

Masyarakat yang tinggal di berbagai tempat seringkali menghadapi tantangan yang sama, terutama dalam upaya mereka membangun daerahnya atau meningkatkan kualitas kehidupannya. Karena itu, belajar dari pengalaman satu sama lain dan mendengarkan perspektif yang berbeda menjadi sangat penting dan berguna. Dalam tulisan ini ini, saya berupaya mengkontekstualisasikan pengalaman saya di Belitung dengan perspektif kewirausahaan sosial dan pariwisata

berbasis komunitas. Fokus pembahasan saya terletak pada konflik dan sinergi antara sektor industri ekstraktif dan pariwisata. Saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang bersedia membagi pengetahuan, cerita, dan pengalamannya kepada saya selama melakukan kunjungan ke Belitung. Cerita-cerita tersebut menjadi pengalaman pembelajaran yang sangat bernilai bagi saya baik secara personal maupun profesional.

Kewirausahaan Sosial

Praktik dan pemahaman terkait kewirausahaan sosial bisa jadi berbeda-beda dalam konteks budaya yang berbeda pula. Meski demikian, secara umum, kewirausahaan sosial dapat diartikan sebagai aktivitas inovatif yang dilakukan secara ekstensif untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat baru bagi masyarakat. Kewirausahaan sosial tidak sama dengan menciptakan usaha bisnis komersial dan mendapatkan keuntungan finansial bukan merupakan tujuan utama dari kewirausahaan sosial. Uang tentu saja dapat menjadi alat yang penting untuk mencapai tujuan kewirausahaan sosial atau memberikan efek yang positif bagi komunitas lokal.

Seorang wirausahawan sosial adalah individu yang memutuskan untuk berusaha dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk menciptakan perubahan positif bagi komunitasnya atau kondisi lingkungannya di tingkat lokal. Namun, seorang wirausahawan seringkali dilihat sebagai seorang manusia luar biasa yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus. Diskursus terkait kewirausahaan telah banyak dikritik karena upayanya mendefinisikan pengusaha secara sempit hanya sebagai seorang individu—seringkali laki-laki—yang selalu menggunakan baju formal dan necis.

Pada kenyataannya, wirausahawan bisa jadi laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, dan dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Terdapat beberapa karakteristik dan strategi umum yang dapat dilihat dalam berbagai proyek kewirausahaan sosial yang dianggap berhasil. Wirausahawan sosial seringkali adalah individu yang memiliki ikatan kuat dengan suatu tempat dan komunitas lokal, serta dengan jejaring nasional dan internasional pada saat yang sama. Karakteristik paling penting yang dimiliki oleh seorang wirausahawan lokal adalah kemampuannya untuk melibatkan dan menyatukan berbagai aktor dan sumber daya berbeda untuk mencapai suatu tujuan yang berorientasi pada kepentingan sosial maupun lingkungan.

Kewirausahaan sosial seringkali dicirikan dengan berbagai bentuk kerjasama baru antara sektor bisnis, politik, administrasi, kerja-kerja relawan, dan pemangku kepentingan lain. Aktor dan pemangku kepentingan yang berbeda-beda seringkali memiliki harapan dan permintaan yang berbeda pula—sesuatu yang pada akhirnya dapat menciptakan gesekan, atau seringkali konflik, di antara komunitas lokal. Situasi kerja bagi wirausahawan sosial bisa jadi sangat sulit dan tidak jarang perubahan yang mereka bawa menghadapi tantangan ataupun permusuhan dari komunitas lokal. Pada beberapa tempat dengan konflik kepentingan yang sangat kuat, wirausahawan sosial kadang menerima ancaman kekerasan atau sabotase dari pemangku kepentingan lain dalam komunitasnya.

Inovasi dan kewirausahaan berbanding lurus dengan terjadinya perubahan, dan ketika masyarakat atau suatu tempat berubah, komunitas lokal perlu melakukan penyesuaian dan menegosiasikan ulang nilai, identitas, dan strategi yang sudah mereka pegang selama ini. Proses ini dapat menghadapi tantangan, karena berbagai aktor

memiliki cara pandang yang sangat berbeda mengenai bentuk pembangunan yang mereka anggap paling menguntungkan bagi komunitasnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karenanya, sangat penting bagi wirausahawan sosial untuk menjangkarkan dan mengaitkan aktivitasnya secara lokal dengan berbagai pemangku kepentingan.

Belitung Geopark adalah salah satu contoh bentuk organisasi yang telah bekerja secara strategis dengan berbagai aktor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di situs web mereka (www.belitonggeopark.net) menyebutkan berbagai mitra dalam proyek tersebut, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta dinas pemerintahan daerah, universitas di level nasional dan internasional, komunitas lokal, sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara, serta media lokal dan nasional.

“Kemitraan Komunitas” atau “*Community Partnership*” telah menjadi fokus utama dalam desain Belitung Geopark sejak ia diresmikan pada 2016, dan hal ini didasari oleh dua prinsip penting: pendekatan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan “perbaikan infrastruktur.” Dalam situs web tersebut, mereka menyebutkan bahwa inklusi masyarakat akar rumput serta kelompok masyarakat dan organisasi lokal menjadi aspek penting di dalam fase perencanaan proyek dan masih memainkan peran sentral dalam pengorganisasian dan pengoperasian Belitung Geopark hingga hari ini. Dalam hal perbaikan infrastruktur, mereka menuliskan: “Pembangunan infrastruktur di dalam Geosites diinisiasi oleh komunitas lokal. Setelah mereka memulai proyek pembangunan

tersebut, konstruksi dan fasilitas yang diperlukan dapat memperoleh dukungan dari Kepala Desa, pemerintah lokal dan nasional, maupun korporasi. Komunitas lokal di Geosites telah menginisiasi proyek urun dana (*crowdfunding*) dalam membangun beberapa fasilitas.”

Pariwisata Berbasis Komunitas

Salah satu konflik kepentingan yang paling umum terjadi pada lokasi yang berupaya mengembangkan sektor pariwisata adalah menentukan bagaimana industri pariwisata tersebut dikelola agar memberikan manfaat yang besar bagi komunitas lokal. Sebagai contoh, akan terdapat ketidaksepakatan terkait siapa yang dianggap tepat mengelola sektor tersebut—apakah hotel, restoran, dan jasa wisata yang ditawarkan harus dibangun, dijalankan, dan dikelola oleh perusahaan bertaraf internasional dengan modal yang besar, atau oleh aktor lokal dalam bentuk pariwisata berbasis komunitas. Sharon Donny dan Nor Ashikin Mohd Nor dari University Utara Malaysia mendefinisikan pariwisata berbasis komunitas sebagai sebuah “platform untuk komunitas lokal menghasilkan keuntungan ekonomi dengan menawarkan produk dan jasa mereka, termasuk komunitas lokal, gaya hidup, sumber daya alam, dan budaya, kepada wisatawan.”

Merujuk pada sebuah publikasi yang diterbitkan ASEAN (2017), pariwisata berbasis komunitas dapat memberikan dampak positif karena ia “memberdayakan komunitas lokal untuk menentukan dan mengamankan masa depan sosial-ekonomi mereka melalui aktivitas jasa pariwisata yang seringkali menghadirkan dan merayakan tradisi dan gaya hidup lokal, berkontribusi bagi konservasi alam dan sumber daya kultural, dan memajukan interaksi tuan rumah dan tamu (wisatawan) yang adil, setara, dan saling menguntungkan.” Sebuah

studi atas Desa Wisata Pentingsari di Merapi yang ditulis oleh Pratama, Halim, Sulistiyanto, dan Setiawan (2019), menemukan bahwa pariwisata berbasis komunitas memiliki dampak yang besar dalam menentukan apakah masyarakat lokal berperan aktif sebagai subjek dan tidak hanya berfungsi sebagai objek dalam berinteraksi dengan wisatawan. Pariwisata berbasis komunitas seringkali ditujukan untuk pasar khusus, seperti wisata petualangan, wisata budaya, ekowisata, dan agrowisata, dan di saat yang sama memanfaatkan produk dan jasa dari masyarakat lokal untuk mendistribusikan manfaat ekonomi yang didapatkan dari keterlibatan mereka dalam sektor pariwisata.

Belitung memiliki banyak pantai, pulau, dan area yang indah dan ideal untuk melakukan aktivitas berbasis air seperti berenang dan *snorkeling* (selam permukaan). Sebagai tambahan, terdapat banyak hutan di pulau Belitung yang menawarkan satwa langka seperti tarsius dan buaya sungai atau buaya air tawar. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif Belitung karena dapat merepresentasikan aspek unik yang berbeda dari tempat-tempat lain di wilayah tersebut. Jika dilindungi dan dikembangkan dengan cara yang berkelanjutan dan demokratis, aspek-aspek keunggulan ini dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi komunitas lokal dan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Kewirausahaan Sosial dan Pariwisata Berbasis Komunitas di Belitung

Dalam kunjungan lapangan ke Belitung, kami berkesempatan untuk mengunjungi Budi Setiawan di lokasi konservasi tarsius yang ia kelola. Budi tidak melihat dirinya sebagai seorang wirausahawan sosial. Namun, dari cerita yang disampaikan terkait dirinya dan kerja-kerja yang telah ia lakukan di Belitung, saya berpendapat bahwa apa yang

Budi lakukan dapat dikategorisasikan sebagai aktivitas kewirausahaan sosial. Budi memiliki akar kultural yang kuat karena ia tumbuh besar dan hidup di Belitung, serta memiliki keluarga yang tinggal di sana. Budi memiliki komitmen yang kuat dan kecintaan yang besar pada Belitung, alam, dan masyarakat di sana, serta menghabiskan banyak waktu dan energi di berbagai proyek yang bertujuan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati, dengan cara-cara yang dapat memberikan efek sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Namun, bukan nilai dan keuntungan ekonomi yang paling penting. Modal finansial yang didapat dari berbagai proyek digunakan sebagai alat untuk memperkuat kerja-kerja pelestarian alam yang ia lakukan di masa depan. Budi memiliki sedikit pegawai tetap, namun ia melibatkan pemandu wisata lokal yang sudah dikenal baik di area hutan dan sungai yang ia kelola. Para pemandu tersebut bekerja sebagai petani atau nelayan sebagai mata pencaharian utama mereka di komunitas tersebut, dan mereka akan dihubungi oleh Budi ketika diperlukan. Dengan menawarkan pekerjaan sebagai pemandu wisata, Budi membantu para petani dan nelayan tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Banyak masyarakat lokal di Belitung tidak memiliki modal finansial. Namun, mereka memiliki sumber daya lain yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan penghasilan dari aktivitas pariwisata. Para petani, contohnya, menjadikan lahan dan aktivitas pertanian mereka sebagai objek wisata—mereka sangat terbuka dengan kedatangan para wisatawan ke ladang pertanian mereka dan mengizinkan wisatawan tersebut untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertanian yang mereka lakukan.

Para nelayan, di sisi lain, sudah memiliki kapal dan peralatan memancing—mereka menggunakan modal tersebut untuk menawarkan aktivitas memancing pada para wisatawan dan menunjukkan pada para wisatawan berbagai variasi margasatwa yang dapat ditemukan di dalam maupun di sekitar sungai. Salah satu contoh menarik yang serupa dapat ditemukan di Filipina, di mana seorang mantan nelayan, yang dulunya berburu ikan paus, kini mengelola jasa perjalanan yang mana wisatawan dapat melihat ikan paus tanpa mengganggu atau merusak habitat paus tersebut. *The Guardian* menjelaskan bahwa “Para nelayan yang beralih menjadi wirausahawan tersebut, dan di saat yang sama berkontribusi secara finansial bagi perlindungan hiu paus yang terancam punah, berhasil menciptakan suatu skema yang membantu mengeluarkan komunitas pesisir mereka dari lingkaran kemiskinan.” Meskipun para nelayan tersebut sebelumnya menjadi ancaman bagi habitat paus melalui, salah satunya, penangkapan ikan yang berlebihan, mereka sekarang terlibat secara langsung dalam melindungi mereka dan kehidupan laut lainnya. Jenis industri pariwisata ini sangat mirip dengan jenis pariwisata berbasis komunitas yang cukup populer di sekitar daerah Merapi, Yogyakarta.

Mencari Alternatif atas Industri Ekstraktif

Sumber daya alam dapat memberikan dampak positif bagi komunitas lokal yang tinggal di sekitar lokasi tempat sumber daya tersebut berada. Ekstraksi dan proses pengolahan sumber daya alam tersebut mengharuskan adanya tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Seberapa besar komunitas lokal mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut akan sangat bergantung pada berbagai faktor. Pada beberapa kasus, ekstraksi sumber daya

alam dilakukan oleh perusahaan internasional berskala besar yang seringkali tidak bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal maupun berorientasi pada tujuan pelestarian lingkungan setempat. Beberapa dampak negatif dapat merusak lingkungan dan memperburuk permasalahan iklim global, mengancam masyarakat adat, melakukan relokasi paksa kepada masyarakat lokal, menciptakan kondisi kerja yang berbahaya, atau memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi tradisional. Hal-hal tersebut adalah beberapa dari alasan utama yang membuat ekstraksi sumber daya alam menjadi isu kontroversial di berbagai tempat, dan seringkali diprotes oleh masyarakat lokal, serta oleh NGO di level nasional dan internasional.

Baik di Norwegia maupun di Indonesia, tantangan utama yang dihadapi adalah keengganan perusahaan yang melakukan ekstraksi sumber daya alam untuk bertanggung jawab melakukan reklamasi area industri mereka ketika sumber daya yang diekstraksi sudah habis, tidak lagi menguntungkan secara ekonomi, atau ketika perusahaan menghentikan operasinya dengan alasan tertentu. Jika tidak ada klausul yang eksplisit dalam kontrak atau perizinan mereka terkait tanggung jawab untuk melestarikan atau memulihkan alam dan ekosistem lokal selama dan setelah aktivitas ekstraksi, perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak merasa menjadi pihak yang diharuskan memikul tanggung jawab itu.

Dampak dari perusahaan yang meninggalkan lokasi ekstraksi tanpa melakukan normalisasi kawasan tidak hanya buruk dalam segi estetika, namun juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, ekosistem alam, dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Beberapa penambangan timah di Belitung dilakukan oleh perusahaan besar berskala internasional, dan mereka dapat dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban jika mereka

dan aktivitas yang mereka lakukan merugikan masyarakat atau alam dalam bentuk apapun. Perusahaan internasional seringkali mencoba untuk menghindari skandal publik, yang kemudian membuat mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal dan memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat. Di Belitung, kita dapat melihat berbagai contoh bentuk pemasaran yang kreatif, di mana lokasi ekstraksi yang tidak lagi aktif dikonversi menjadi destinasi wisata populer.

Pada titik ini, menjadi penting untuk mengandalkan kekuatan lokal dan melindungi hal-hal yang menjadikan suatu tempat atau komunitas unik. Kompetisi di dalam sektor pariwisata, terutama untuk menarik perhatian dan menambah jumlah pengunjung, berlangsung dengan ketat dan para wisatawan akan berupaya mencari destinasi dan pengalaman liburan yang baru, unik, dan menarik. Jika kita melihat Belitung dari jendela pesawat atau citra satelit, kita dapat menemukan efek dari pertambangan timah yang telah dilakukan selama bertahun-tahun di dalam lanskap tersebut. Di antara hutan-hutan yang rimbun, kita dapat melihat *kolong* atau lubang-lubang besar berwarna putih keabuan tempat timah pernah ditambang. Di beberapa tempat, lubang yang telah terbengkalai ini terisi dengan air berwarna biru atau toska dan tampak sebagai danau yang indah. Danau buatan ini kemudian dipasarkan sebagai tujuan wisata dan menarik para wisatawan yang ingin melihat dan mengabadikan fenomena unik tersebut dengan kamera.

Ketika situs tambang yang telah ditinggalkan diubah menjadi lokasi wisata, warga lokal dapat terus menghasilkan pendapatan meskipun aktivitas penambangan sudah tidak lagi berjalan. Di Bangka, kita juga dapat menemukan Museum Timah Indonesia di mana para pengunjung dapat mempelajari metode yang digunakan

dalam menambang timah. Pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat dilihat dan dipelajari oleh para wisatawan di tempat-tempat lain atau di berbagai tujuan wisata yang lebih populer.

Dalam mengembangkan Belitung sebagai destinasi wisata, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu dijaga. Industri ekstraktif tidak serta merta buruk atau harus dihentikan, namun menjadi penting untuk memastikan bahwa industri tersebut tidak merusak modal bagi sektor industri lainnya. Karenanya, wirausahawan sosial memainkan peran penting dalam menyadarkan masyarakat terkait isu sosial dan lingkungan yang terjadi di sekitar sektor industri ekstraktif, pariwisata, atau sektor alternatif lainnya, serta dalam menyatukan berbagai aktor dan sumber daya untuk memfasilitasi perubahan yang positif.

Daftar Pustaka

- Carter, R. W., & Cheatham, K. (2014). *ASEAN Community Based Tourism Standard*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2024.7840/1>
- Pratama, A. A. P. P., Halim, S., Sulistiyanto, & Setiawan, D. (2019). Entrepreneurship Development through Tourism Villages in the Perspective of Defense Economic (Study Case: Penteng Sari, Sleman, Yogyakarta). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 92(Icame 2018), 119–126.

Bab 10. Peran Perempuan di Belitung: Ekonomi Perawatan dan Penghidupan Keluarga Juru Sebrang dan Perempuan Pengumpul Kerang

Diana Vela Almeida

Hari itu adalah hari kedua saya di Belitung, saat Oki (asisten peneliti saya) dan saya pergi untuk mengunjungi Juru Sebrang, sebuah objek geologi di wilayah pantai barat Belitung. Lokasi bekas tambang darat ini kini menjadi tujuan wisata yang ramai dikunjungi orang Belitung terutama saat akhir pekan. Dikelilingi oleh pantai pasir putih, tempat ini dikenal sebagai lokasi untuk memotret matahari terbenam yang indah. Tempat ini juga menjadi area rehabilitasi pasca-tambang dengan kegiatan penanaman mangrove serta budidaya udang dan kepiting.

Saat kami mendekati tepi laut yang saat itu tengah surut, saya terpaku pada sekelompok perempuan dengan anak-anak kecil yang sedang mengumpulkan *kerang bulo* atau kerang bambu. Air yang surut menyingkap permukaan pasir berwarna abu-abu gelap di cakrawala. Tempat ini dipenuhi para perempuan yang tengah mengumpulkan

kerang. Kebanyakan dari mereka saling mengenal satu sama lain dan bertemu di lokasi tersebut. Mereka secara sigap dan tangkas mengisi kantong-kantong plastik dengan kerang-kerang yang nantinya akan mereka jual atau mereka masak di rumah. Saya melangkah mendekati mereka, dengan Bahasa Indonesia yang baru saja saya pelajari, dan saya meminta mereka mengajarkan saya mengumpulkan kerang. Mereka lantas menunjukkan cara mengumpulkan kerang dengan garam yang mereka bawa. Saya melihat pasir pantai yang basah membuat hewan-hewan *mollusca* tersebut melesap ke dalam pasir meninggalkan lubang-lubang yang dapat diamati mata manusia. Lubang-lubang tersebut kemudian dibubuhi garam dan ditancapkan sebilah kayu tipis untuk memancing kerang bambu keluar. Hewan-hewan kecil tersebut merayap ke permukaan lubang dan, sebagai bagian dari permainan, anak-anak bertugas untuk menangkapnya dengan cepat. Anak-anak terhibur dengan permainan itu sekaligus membantu ibu mereka. Terkadang anak-anak lain bermain dengan ikan kecil yang sudah mati. Mereka saling melempar sementara yang lain mencoba menangkis.

Saya terkesan dengan kreatifitas para perempuan yang menggunakan pengetahuan mereka mengenai laut untuk mencari makanan dan memberi makan keluarga mereka; yang lebih menarik lagi, kegiatan ini dilakukan oleh perempuan dan anak-anak. Kegiatan itu juga menjadi ruang bagi perempuan untuk bertemu dan mengobrol dengan teman dan tetangga, saling menghibur satu sama lain sembari anak-anak mereka juga bermain dengan anak-anak lainnya. Saya berpikir, bahwa ini juga merupakan ruang belajar bagi anak-anak untuk mengetahui tentang kerang, laut, serta kehidupan bahari secara umum. Ruang persahabatan ini juga merupakan ruang kerja, karena perempuan (kebanyakan adalah ibu) bekerja untuk membawa pulang makanan. Seorang perempuan, misalnya, berkata

kepada saya bahwa dia dapat mengambil sekitar lima kilogram kerang yang sebagian besar untuk konsumsi rumah tangga. Tapi, terkadang dia juga menjualnya kepada orang lain. Ini hanya satu contoh peran penting perempuan bagi perekonomian rumah tangganya dengan menyediakan makanan. Mereka mengumpulkan kerang yang akan dimakan bersama keluarganya, namun pada saat yang sama mereka juga bersenang-senang saat mengumpulkan makanan tersebut.

Mengumpulkan makanan dan menyediakan makan bagi keluarga adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan di Juru Sebrang ini menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai ekonomi perawatan (*economy of care*), yaitu pekerjaan tidak dibayar yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan untuk menunjang kehidupan keluarga, misalnya produksi pangan. Seperti halnya di Belitung, di sebagian besar belahan dunia perempuan bertanggung jawab atas produksi pangan skala kecil bagi konsumsi rumah tangga. Contoh lain yang lebih luas skalanya adalah petani, seperti halnya pengumpul hasil laut, sebagian besar adalah perempuan yang hidup dan bergantung pada lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka seperti bakau, hutan, atau dataran tinggi. Mereka menciptakan mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk mencari makan dan kebutuhan hidup yang lain bagi keluarganya.

*Gambar 10. Perempuan mengumpulkan kerang bambu di Juru Sebrang.
Foto diambil pada bulan Februari 2020.*

Petani Perempuan di dalam Kelompok Wanita Tani (KWT)

Saat di Belitung, saya juga mengunjungi beberapa kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibentuk pada 2019 oleh kelompok perempuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Air Selumar. Kegiatan yang menerima dana dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian ini bertujuan untuk mengajak perempuan menanam sayuran dan tanaman obat di lahan komunal dan di pekarangan rumah. Di dalam kegiatan ini, sekitar tiga puluh perempuan berkumpul dua kali seminggu, setiap Selasa dan Jumat di lahan yang sudah disepakati untuk menanam tanaman mereka. Mereka bekerja secara kolektif untuk menyiangi dan menyirami tanaman, memupuk, menyemai benih di *polybag*,

memanen dan menjual produk mereka. Mereka juga mengembangkan “toga” di pekarangan rumah mereka sendiri. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, antara lain seperti jahe, lengkuas, kunyit, serai, dan lainnya.

Suatu hari pada Jumat sore, saya pergi mengunjungi KWT. Kegiatan mereka sudah dimulai pada siang hari ketika sekitar dua puluh perempuan berkumpul untuk bekerja di kebun komunal. Kegiatan mereka berlangsung secara organik, dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang memanen tomat, ada yang menyiram tanaman, ada yang memeriksa bibit, dan lainnya mengisi kantong *polybag* dengan tanah untuk menyemai benih. Tidak ada instruksi khusus yang harus diikuti. Jika ada yang harus dilakukan, mereka akan langsung melakukannya. Saya menawarkan diri untuk menyirami tanaman, dan saya ingat perempuan di sebelah saya berseru “Bismillah.” untuk memberkati tanaman sebelum menyiramnya. Kejadian tersebut seketika mengingatkan saya pada semua perhatian dan penghargaan yang mereka berikan pada tanaman mereka, kerja kolektif mereka, dan upaya mereka untuk berbagi tujuan dan upaya komunal dalam rangka menciptakan ruang dukungan di antara mereka.

Selanjutnya, kami semua berkumpul untuk mengisi kantong dengan tanah dan kemudian mereka merencanakan untuk menanam lebih banyak tanaman lain di pekarangan rumah. Kami semua berada di tempat yang sama dan berbagi pekerjaan: sejumlah orang membuka kantong, sebagian lainnya mengumpulkan tanah, dan sisanya memungut dan memindahkan kantong ke lokasi lain. Sembari mengerjakan kegiatan tersebut, para perempuan itu tidak berhenti mengobrol, saling menggoda dan terus bercanda, kami tertawa. Tentu saja, perempuan berperilaku dengan keleluasaan tersendiri di tempat

yang hanya dikelola oleh perempuan. Di akhir pekerjaan, kami duduk dan berbagi minuman dan makanan ringan. Mereka berbicara sejenak tentang rencana kegiatan di minggu berikutnya. Tak lama kemudian hujan mulai turun dan membuat mereka menghilang secepat mereka datang, mengakhiri sore yang ramai dan berisik dengan kesunyian yang datang tiba-tiba.

Para perempuan tersebut terus menerus mengingatkan saya bagaimana kegiatan kecil ini membantu mereka mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Mereka bilang bahwa berkebun membuat mereka dapat menghindari membeli makanan di pasar. Seorang ibu berkata kepada saya, kami melakukan ini “Untuk mendukung ekonomi keluarga kami, sehingga kami mengurangi pengeluaran rumah tangga.” Mereka mengunggah produk kebun di halaman Facebook mereka untuk dijual. Tomat yang mereka panen hari itu misalnya (yang mungkin sekitar lima kilo) akan dijual ke tetangga mereka.

Tidak semua perempuan di desa dapat berpartisipasi di dalam kegiatan ini karena banyaknya waktu yang mereka habiskan di dalam rumah tangga serta karena pekerjaan di KWT yang bersifat sukarela tanpa kompensasi. Namun, kegiatan kecil agroekologi ini tampaknya berhasil. Seorang ibu menyebutkan bahwa “Itulah tantangan dari kesibukan masing-masing.” Memang, perempuan umumnya bertanggung jawab atas kegiatan rumah tangga serta mengasuh anak, dan ini merupakan kegiatan yang menyita cukup banyak waktu di rumah. Saat saya bertanya apa yang dilakukan para perempuan tersebut selain kegiatan KWT, mereka umumnya menjawab ibu rumah tangga. Satu ibu berkata, “Saya hanya melakukan kegiatan utama rumah tangga, seperti mencuci, memasak, berkebun di pekarangan. Itu saja. Masalahnya adalah rumah saya selalu ramai, ada empat anak

yang harus pergi ke sekolah dan saya harus mengurus keempatnya. Ya itu saja. Tidak ada pekerjaan lain, hanya pekerjaan rumah tangga, mengurus rumah.”

Menurut saya, kata “hanya” atau “hanya urusan rumah tangga” tidaklah adil untuk menggambarkan banyaknya tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan seluruh kegiatan tersebut setiap hari. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas sebagian besar urusan rumah tangga, yang merupakan pekerjaan berat dan melelahkan, tetapi juga bekerja untuk membantu anggota keluarga lainnya untuk melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Selain pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah mendapat kompensasi, sejumlah perempuan juga memiliki pekerjaan tambahan, seperti mereka yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, mengelola warung dan menjual makanan, melimbang timah di pertambangan tradisional, atau bekerja di tambang timah konvensional dari pagi hingga sore hari. Setelah mengerjakan pekerjaan di luar rumah, perempuan pulang ke rumah melanjutkan pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. “Karena itu saya merasa lelah,” kata seorang ibu. Situasi ini jamak terjadi seluruh belahan dunia. Estimasi global menyoroti jumlah jam bekerja perempuan setiap harinya lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun demikian, pada umumnya perempuan tidak menerima kompensasi ekonomi untuk pekerjaan yang menopang agar kehidupan keluarga mereka dapat tetap berjalan dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi.

Gambar 11. Anggota KWT. Foto diambil pada Februari 2020.

Arisan Perempuan

Suatu hari, saya diundang ke arisan bulanan kelompok perempuan di desa Air Selumar. Arisan merupakan praktik umum di Indonesia di antara kelompok teman, keluarga, tetangga atau anggota organisasi. Dalam arisan, orang mengelola uang dengan menyimpan dan membuat undian untuk membantu peserta arisan secara finansial. Ketika saya bertanya kepada seorang ibu apa itu arisan, ibu itu menjelaskan, “Tujuan sebenarnya arisan adalah perkumpulan sosial, kita mengocok undian uang tapi tujuannya adalah kita bertemu untuk berbagi ilmu pengalaman, kadang ngomongin masalah anak dan keluarga, apa yang terjadi di rumah tangga kita.” Di dalam Arisan Desa Air Selumar, setiap perempuan akan menyerahkan yang bulanan sebesar Rp 50.000 untuk undian dan Rp 5.000 untuk makanan dan

minuman yang mereka konsumsi selama arisan. Mereka mengundi uang dengan cara menaruh semua nama peserta arisan di dalam wadah, lalu peserta mengambil dua nama dari wadah tersebut secara acak untuk memilih peserta yang mendapatkan uang undian. Arisan dilakukan dalam sejumlah putaran pertemuan sesuai dengan jumlah peserta, sehingga di putaran akhir nantinya mereka semua menerima undian uang. Perempuan yang terpilih dalam undian, memiliki hak untuk memutuskan untuk mengambil uang atau menunda gilirannya pada putaran berikutnya dan memberikan kesempatan pada perempuan lainnya yang sedang membutuhkan uang. Saya pikir arisan merupakan praktik solidaritas finansial di antara para perempuan, di mana mereka saling membantu secara ekonomi dan juga saling memberikan nasihat keluarga.

Siang hari itu semua perempuan dan anak-anak kecil mulai berkumpul. Total ada 32 perempuan yang berkumpul. Mula-mula, empat orang perempuan mengumpulkan uang sesuai dengan daftar peserta yang hadir. Kami memulai pertemuan dengan menyanyikan lagu-lagu dan secara resmi menyapa seluruh peserta. Setelah itu, undian dimulai. Dua perempuan terpilih melalui sistem lotre dan mereka membagi uang yang mereka dapatkan menjadi dua bagian. Nama mereka tidak akan terpilih pada pertemuan berikutnya namun masih harus berkontribusi dengan menyerahkan sejumlah uang pada bulan berikutnya. Ada dua perempuan lainnya yang mendapatkan kado kecil berupa dua wadah plastik.

Dalam pertemuan itu, perempuan juga mendapatkan informasi tentang pemeriksaan kesehatan rutin dan perlunya mengikuti tes Pap-smear (*Papanicolaou Smear*) untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Hal itu menarik perhatian saya. Artinya, menghadiri arisan merupakan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan karena

selama acara berlangsung dua orang perempuan dari puskesmas juga melakukan pencatatan kesehatan semua perempuan yang datang, termasuk berat dan tinggi badan, tekanan dan kadar gula darah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ibu yang menghadiri arisan, “Kita sering ketemu, sering bercanda, ada pertemuan atau kegiatan seperti ini supaya kita dapat ke luar rumah, untuk penyegaran dan bertemu teman. Hal ini membuat hati kami gembira.” Ini pula yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan arisan ini. Meskipun saya belum dapat sepenuhnya memahami Bahasa Indonesia, saya dapat memahami para perempuan ini menemukan ruang untuk persahabatan, berbagi dukungan, perhatian sekaligus juga mendapatkan manfaat pemeriksaan kesehatan untuk mencegah masalah kesehatan.

Gambar 12. Sekelompok perempuan mendatangi arisan. Foto diambil pada Maret 2020.

Organisasi Perempuan dan Peran Ekonomi dalam Masyarakat

Persepsi umum yang keliru tentang perempuan adalah menganggap mereka bertanggung jawab pada urusan rumah tangga dan keluarga, sehingga mereka dianggap tidak selalu terlibat di dalam

ekonomi komersial atau politik formal di suatu tempat. Gagasan ini keliru. Perempuan merupakan poros keluarga, masyarakat dan perekonomian di mana pun. Misalnya, perempuan dalam rumah tangga melakukan kegiatan primer di dalam sistem ekonomi. Perempuan pada kenyataannya mengatur perekonomian rumah tangga, mengelola sumber daya, mengalokasikan pendapatan keluarga dan mengetahui bagaimana membagi waktu untuk melakukan itu semua. Mereka juga bertanggung jawab menjadi tenaga yang menjaga keluarga, menyediakan makanan dan mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, menghasilkan dan mengumpulkan makanan. Seluruh pekerjaan ini dilakukan tanpa bayaran apapun. Perempuan tersebut juga berkontribusi pada pendapatan keluarga dengan bekerja di luar rumah.

Jika merunut sejarah, kita dapat melihat bahwa perempuan bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dan menjalankan pekerjaan rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, merawat anggota keluarga yang sakit, dan secara umum mengurus seluruh kebutuhan keluarga. Pekerjaan tersebut sangat penting bagi masyarakat karena menopang kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan secara umum. Tanpa pekerjaan ini, masyarakat tidak dapat mempertahankan rutinitas keseharian sehingga pekerja, misalnya, tidak akan mampu bekerja di luar rumah dan tidak mendapatkan penghasilan. Ada distribusi tenaga kerja yang tidak adil bagi perempuan di dalam rumah tangga karena mereka biasanya menanggung sebagian besar beban untuk mengurus keluarga. Sebagai contoh, di dalam keluarga tradisional di Belitung, jika perempuan yang menjadi penanggung jawab rumah tangga tidak dapat melakukan pekerjaan rumah, memasak, membersihkan rumah, dan memberi makan keluarga, suami tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk pergi bekerja. Dampaknya, suami tidak akan mendapatkan penghasilan

yang memadai untuk keluarga, anak-anak bisa menjadi sakit dan tidak dapat bersekolah. Sayangnya, pekerjaan perempuan untuk mempertahankan kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga yang tidak mendapatkan kompensasi tersebut tidak pernah dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi formal. Kegiatan perempuan di Belitung menunjukkan pada kita bahwa perempuan setiap hari bekerja lebih banyak daripada laki-laki namun mereka menerima lebih sedikit, atau tidak menerima sama sekali, bayaran sebagai kompensasi bagi pekerjaan mereka.

Di luar urusan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga berperan penting dalam perekonomian keluarga. Berbagai kegiatan perempuan yang saya sebutkan di sini, yaitu perempuan pengumpul kerang bambu di Juru Sebrang, kegiatan KWT di Air Selumar dan arisan perempuan, hanyalah sedikit gambaran tentang ekonomi perawatan yang menjadi bagian dari masyarakat di Belitung. Ekonomi perawatan merupakan bagian dari ekonomi yang berfungsi untuk menjaga kehidupan masyarakat dengan menghasilkan makanan dan mengurangi tantangan keuangan keluarga. Terlebih lagi, ekonomi perawatan juga menjadi ruang dukungan, solidaritas, dan persahabatan. Ketiga ruang tersebut menciptakan relasi yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersenang-senang, bertemu teman dan menerima dukungan serta bagi anak-anak untuk bermain dan memiliki waktu bersenang-senang. Ini merupakan tempat di mana uang tidak mendominasi hubungan di antara orang-orang tetapi hanya digunakan untuk mendukung kegiatan mereka. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang didapatkan oleh perempuan karena mereka telah menciptakan kondisi pendukung dengan menghidangkan makanan ke meja keluarga. Pun, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan untuk menopang kehidupan. Ketiga ruang yang saya sebutkan

tadi merupakan contoh ekonomi perawatan yang sebagian besar diatur oleh perempuan karena secara historis, aktivitas penting ini disandarkan secara tidak proporsional pada bahu perempuan.

Sebagai kesimpulan, berbicara tentang pentingnya ekonomi perawatan sangat penting karena konsep ini membantu untuk mengenali nilai penting pekerjaan perempuan bagi kelangsungan masyarakat yang tidak terkompensasi secara ekonomi. Konsep ini juga membantu untuk mengakui situasi yang tidak adil bagi perempuan yang telah menjalankan kegiatan penting bagi perekonomian di Belitung. Konsep ini juga memperlihatkan perempuan tidak menempati posisi setara di ranah politik dan pemerintahan di pulau ini serta tidak terwakili secara setara di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Para perempuan menghadapi tantangan untuk masuk ke arena politik karena regulasi publik dan persepsi yang dilekatkan kepada mereka. Ibu Melati, Ketua PKK Provinsi Bangka Belitung mengakui adanya kekeliruan persepsi tentang peran perempuan di dalam masyarakat. “Sudah menjadi stigma sejak lama bahwa perempuan tidak dapat memainkan peran yang sama dengan laki-laki [...] meski perempuan merupakan sosok sentral di dalam keluarga yang mengelola keuangan keluarga.”

Perempuan menempati posisi penting di tingkat administratif rumah tangga, namun, ketika memasuki tingkat administrasi di tingkat pemerintahan (dari tingkat desa, secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi), kita melihat kesenjangan antara peran perempuan dan laki-laki di ranah politik. Ibu Melati mengatakan: “Kondisinya memang tidak setara tapi kami ingin agar kondisinya sejajar, artinya keberadaan perempuan di pemerintahan desa dapat diakui. Kami berbenturan dengan budaya yang menempatkan laki-laki selalu memimpin, perempuan berada di belakang. Sekarang ini kita harus

berubah, artinya perempuan dapat setara dengan laki-laki [...] Kami dapat sama (posisinya), setara.” Ibu Melati menyebutkan bahwa perempuan sering kali masih merasa malu untuk berbicara atau tidak percaya diri untuk tampil di ruang publik. Banyak perempuan yang tidak begitu yakin akan kemampuannya, padahal peraturan di Indonesia sudah menyatakan bahwa semua partai politik harus mengajukan perempuan menjadi sedikitnya 30 persen dari kuota calon legislator yang diusulkan di seluruh tingkat pemilu. Meskipun demikian, perempuan tidak selalu menjadi bagian dari agenda politik untuk pengambilan keputusan meski mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kerja keras untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Bab 11. Potensi Wisata Pantai dan Respons Masyarakat terhadap Tambang Laut di Pulau Belitung

Daniel Galih I.Y.A.

Kekayaan sumber daya alam (SDA) menawarkan dua kutub pilihan yang kerap saling berlawanan. Kutub pertama melihat SDA dapat menjadi jalan menuju kemakmuran suatu negara. Namun, tidak menampik kemungkinan bahwa kekayaan sumber daya alam dapat membawa negara menuju kemiskinan. Hal itu sering kita sebut dengan “*resource curse*” atau kutukan sumber daya alam. Resvani dalam artikelnya di laman www.resvani.com berjudul “Kepemilikan Sumberdaya Alam Indonesia” mengatakan bahwa ada dua teori kepemilikan sumber daya alam: *pertama, terra incognita* bahwa sumberdaya alam itu tidak memiliki pemilik, atau merupakan milik oleh Tuhan; *kedua*, menganggap bahwa pemilik sumber daya alam adalah rakyat yang dikelola oleh negara. Undang-undang memang menyebutkan bahwa negara memiliki hak atas kekayaan bumi, air, dan udara yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya.

Belitung merupakan pulau yang kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya timah, Belitung juga menyimpan banyak keindahan alam yang masih asri. Salah satunya adalah potensi pantai dan laut Belitung dengan pasir putihnya yang halus. Seakan memanjakan setiap pengunjung melalui batu-batu, pasir, dan deburan ombak, wisatawan akan diajak mencicipi surga dunia di balik halimun pagi hari di pantai-pantai Belitung: Pantai Tanjung Kelayang, Pulau Kepayang dan pantainya, Pulau Lengkuas dan menaranya yang menjadi ikon tersendiri.

Wisata pantai menjadi salah satu roda perputaran uang di Belitung. Misalnya, Pantai Tanjung Tinggi, yang mewakili sebuah potret memori kecil tentang film “Laskar Pelangi” berikut dengan cerita-cerita indah dan haru di dalamnya. Pantai membuat Belitung dikenal tidak sebatas timah dan tambangnya semata. Keindahan alamnya yang selama ini ditutupi oleh gelimang pundi-pundi rupiah seakan tak mau kalah. Namun, di balik cerita yang indah itu dalam kurun 9 (sembilan) tahun terakhir ini sering terjadi selisih paham antar masyarakat akibat adanya rencana penambangan di laut Belitung.

Pada 2012, PT. Bumi Hero Perkasa (BHP) memulai agenda pertambangan dengan memasang spanduk dan baliho pengumuman rencana kegiatan penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tentunya dengan niat beroperasi di wilayah Kabupaten Belitung. Aktivis pemerhati lingkungan bersama masyarakat melakukan demonstrasi di kantor Bupati Belitung pada Oktober 2012. Demonstrasi ini diinisiasi dan diikuti oleh beberapa pihak serta organisasi seperti Walhi, B-Care, Lembaga Adat Kabupaten Belitung, Persatuan Kedukunan se-Belitung, mahasiswa, Mapala, pelaku pariwisata dan aliansi lainnya. Demo ini dipicu oleh

kemunculan kapal-kapal isap yang menjadi salah satu tanda bahwa tambang laut sudah dimulai. Kapal-kapal isap inilah yang mengambil pasir-pasir di laut dangkal untuk ditambang timahnya. Imbasnya adalah keseimbangan ekosistem biota laut terganggu dan bahkan rusak. Hal ini mengakibatkan banyak nelayan harus berlayar sejauh beberapa mil untuk menangkap ikan, padahal sebelumnya hanya butuh berlayar 50-100 meter saja dari pantai untuk mencari ikan. Seperti yang disampaikan dalam siaran pers Walhi berikut:

“...Tambang di laut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut. Bahkan, yang ironi, menempatkan Provinsi berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Babel.”

Masyarakat pesisir Belitung pun kembali dikagetkan dengan rencana pemerintah yang akan membangun Dolpin Island, pertambangan laut di perairan Olivir, pertambangan di perairan Membalong dan pertambangan di perairan Pering. Lalu pertambangan di perairan Sijuk serta masih ada puluhan perizinan tambang laut yang dalam kasus di Belitung ini, izin operasi dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Puncaknya pada 2019, PT Timah berencana melakukan penambangan di laut dalam Provinsi Bangka Belitung pada 2022. Saat ini, mereka sedang mendesain rekayasa terperinci (Detail Engineering Design/DED), sebuah skema pertambangan laut yang diklaim akan beroperasi secara ramah lingkungan dan PT Timah akan menggunakan sistem *borehole mining* yang sama seperti penambangan di darat. Sistem ini biasanya digunakan untuk proses penambangan minyak dan gas bumi (migas). Menurut pernyataan Sekretaris Perusahaan Timah

Amin Haris Sugiarto seperti dikutip dari media Katadata.co.id, Jumat (18/1) “*Progresnya masih 15%. Nantinya, pada 2020 ada satu unit borehole.*”

Perlu kita ingat kembali bahwa Belitung mulai dikenal oleh publik secara masif bermula dari sinema layar lebar bertajuk “Laskar Pelangi.” Antusiasme masyarakat Indonesia, bahkan dunia terhadap film tersebut sangat besar. Hal ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata dan pergerakan roda perekonomian di Belitung. Masyarakat Belitung seakan mendapatkan ruang ekonomi baru yang cukup menjajikan dari sektor pariwisata. Memang hal ini tidak dengan serta merta menutup tambang-tambang timah di Belitung. Akan tetapi, pariwisata menjadi satu pilihan mata pencaharian lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Tentunya dengan pengelolaan yang baik, dan tetap menjaga kelestarian alam.

Yuslih Ihza sebagai Bupati Belitung Timur pun menyatakan akan terus mengawal pembahasan Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) hingga menjadi Peraturan Daerah. Yuslih menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Kepulauan Babel tentang penolakan tambang laut yang telah dibahas dalam sebuah Panitia Khusus yang dibentuk oleh Bupati dan DPRD Belitung timur. Namun, surat yang dikirimkan pada 1 Mei 2018 lalu, hingga kini belum memperoleh tanggapan. Yuslih menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama DPRD Belitung Timur telah berkomitmen menolak tambang laut dan kapal isap. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Koordinasi Penyelesaian Izin Usaha Penambangan (IUP) di Zona 0 - 2 mil laut dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jum’at (29/6/2018).

Wacana pemerintah dan perusahaan pertambangan timah PT. Kampit Prima Utama pada 19 September 2016 yang akan melakukan penambangan timah di perairan Pering berpotensi memunculkan penolakan dari masyarakat Belitung, termasuk Bupati Belitung Sahani Saleh. Bupati dengan aparat berwajib juga mengancam akan menindak tegas kapal isap produksi (KIP) yang bernama KIP Kamilah yang waktu itu bersandar di perairan Belitung Timur. Aliansi Nelayan Belitung Bersatu dan Gabungan Pecinta Alam Belitung (Gapabel) meminta secara tegas agar zonasi tambang laut dihapuskan. Nelayan dan pelaku pariwisata menolak keberadaan tambang laut. Berita tersebut disampaikan dalam artikel “Koalisi Rakyat Belitung Tolak Penambangan Timah di Laut” di laman www.jatam.org dan artikel di www.posbelitung.co dengan judul “Zonasi Tambang Laut di Belitung Timur Disetujui, Ketua Gapabel Nilai Bakal Hambat Status UGG.”

Masih dalam artikel “Koalisi Rakyat Belitung Tolak Penambangan Timah di Laut”, Rustam Effendie juga menyayangkan adanya rencana penambangan laut dengan kapal isap di laut Belitung. Rustam merupakan salah satu pendiri travel yang memperkenalkan paket-paket wisata di Belitung. Rustam pun pernah mengatakan “Pariwisata ini sudah terbukti menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, belum lagi dampak positif pertumbuhan ekonomi dari bertambahnya uang beredar dari belanja langsung wisatawan setiap minggu di Belitung dan Belitung Timur. Ribuan lapangan pekerjaan itu akan hilang dengan adanya kapal isap produksi, karena kalau laut rusak pariwisata Belitung tidak laku dijual. Saya mendukung pernyataan Pak Bupati, sebelum terlambat masyarakat termasuk pelaku wisata harus bergerak mempertahankan mata pencaharian kita bersama.” Tentunya hal ini juga menjadi keresahan bersama. Akan lebih baik jika rencana-rencana tambang tersebut dapat dikaji ulang dan diputuskan dengan bijak demi kemaslahatan bersama.

Salah satu aktor film “Laskar Pelangi” yang akrab disapa Kucai pun turut menyoal adanya rencana tambang laut dan kemunculan kapal-kapal isap di perairan Belitung. Kucai melanglang buana ke Ibu Kota dan kembali lagi ke negeri timah untuk merintis karir *tour guide* dalam bidang pariwisata di tanah kelahirannya itu. Baginya tanah kelahirannya lebih berarti dari gemerlap Ibu Kota. Isu tambang laut juga tidak menghentikan pekerjaannya, Kucai tetap menjalani kegiatan sehari-harinya dan menjalankan usahanya sebagai *tour guide* untuk para wisatawan. Tantangan dan hambatan memang selalu ada, apalagi jika pertambangan laut itu benar-benar beroperasi. Hal ini berpotensi akan sangat mempengaruhi bisnis *tour & travel* yang ada di Belitung.

Bersama dengan Kucai, penulis mengunjungi beberapa pantai dan pulau kecil di Belitung. Dari perjalanan tersebut, penulis mendapat kesan dan pengetahuan baru tentang potensi wisata Belitung dan juga tambangnya. Kucai cukup dikenal di Belitung. Selain sebagai aktor, Kucai merupakan individu yang peduli dan memahami bagaimana pentingnya merawat alam. Tidak hanya untuk pariwisata, akan tetapi untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab moral masyarakat lokal.

Menikmati sore hari di Pantai Tanjung Tinggi seakan membawa kita masuk ke dalam salah satu *scene* film “Laskar Pelangi.” Batuan dan pasir disambut ombak, mendayu bersama angin yang tenang. Begitulah gambaran yang ditemui ketika duduk di salah satu batu sebesar setinggi atap rumah. Entah Kucai sedang menikmati senja dengan tenang atau gundah. Banyak warga yang mengenalinya, banyak juga wisatawan yang mengajak foto. Sebuah potret bahwa sinema layar lebar bisa membuat perubahan di kehidupan seseorang. Penulis sempat terpikir kelanjutan dari sinema itu, jika saja itu memang ada

di kehidupan nyata, kehidupan yang menanamkan rasa kepedulian terhadap kemanusiaan dan kelestarian alam.

Pada akhirnya apakah tambang ini membawa berkah atau pun bencana, setidaknya apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya-upaya agar anak cucu kita tetap dapat merasakan dan merayakan alam semesta. Lagi-lagi dapat kita ambil hikmah dari secuil cerita di atas bahwa masyarakat tidak tinggal diam atas apa yang menjadi tanggungjawab moralnya. Masyarakat juga sadar betul upaya mereka itu untuk keberlangsungan hidup mereka dan dunia. Kita, sebagai penulis dan pembaca alangkah baiknya juga mengambil pelajaran penting dari peristiwa di atas, bahwa ada banyak kepentingan yang muncul dari sebuah proyek dan bisnis. Terkadang bisnis dan politik memang dibalut menjadi satu hingga terlihat abu-abu. Kita harus memahami tentang perbedaan realitas yang hitam, putih, dan juga abu-abu. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Belitung atas keramahan dan pelajaran kehidupan yang Penulis dapatkan, tanpa usaha dan kepedulianmu mungkin Belitung tidak akan seindah ini. Dan untuk Kucai, terima kasih karena dengan adanya dirimu di Belitung dapat membantu kami mengenali Belitung langsung dari sudut pandang penduduk asli Belitung. Majulah Belitung, Majulah Negeriku.

Bab 12. Transisi Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Adil pada Ekonomi Migas di Norwegia dan Ekonomi Timah di Belitung

Asbjørn Karlsen

Sebagai peneliti Norwegia yang berkunjung ke Belitung pada 2019, beberapa persamaan antara pembangunan di Norwegia dan Belitung terlintas dalam benak saya. Perekonomian di kedua tempat tersebut, cepat atau lambat, akan berhadapan dengan masa depan pasca-pertambangan. Di Belitung, saya banyak mendengar diskusi mengenai masa depan pascatambang, sementara di Norwegia wacana yang mengemuka adalah “kehidupan pascaminyak.” Catatan ini menyajikan refleksi saya mengenai kesamaan dan perbedaan antara Norwegia dan Belitung dengan melihat perkembangan pembangunan dan mata pencaharian di kedua tempat tersebut. Secara lebih spesifik, saya melihat sejarah terkini pertambangan timah rakyat di Belitung dan Kota Verdal di Norwegia yang memiliki ketergantungan pada pertambangan minyak dan gas (migas) lepas pantai.

Perekonomian lokal akan selalu berkembang di tengah tarik menarik antara keberlanjutan dan perubahan. Dalam ekonomi pertambangan, berbagai praktik dan kepentingan tersembunyi cenderung mendorong aktivitas ekonomi untuk bergerak mengikuti jalur lama yang sudah mapan dalam bentuk pertambangan, yang saya sebut *path extension* atau perluasan jalur. Meskipun demikian, masyarakat dihadapkan pada kondisi sumberdaya yang semakin menipis, kerusakan lingkungan, dan harga komoditas yang naik turun mengikuti pasar internasional. Hal ini membuat masyarakat rentan dengan siklus bisnis yang ada. Di beberapa persimpangan, jalur pembangunan ekonomi akan bertemu dengan ide dan visi lain yang dapat menjadi alternatif bagi masa depan industri. Untuk menemukan landasan industri baru yang lebih kuat, perekonomian yang didominasi oleh satu industri saja mesti melakukan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain yang masih terkait - yang saya sebut sebagai *path renewal* atau pembaruan jalur.

Saya akan menjelaskan secara ringkas sejarah industri dan melihat situasi-situasi kritis - turunnya harga minyak dan berhentinya aktivitas pertambangan perusahaan - yang berakibat pada penutupan atau pengurangan aktivitas ekonomi dominan dan berujung pada hilangnya pekerjaan masyarakat. Biasanya, situasi-situasi kritis tersebut direspons dengan beragam inisiatif dan usaha untuk mendiversifikasi ekonomi lokal dengan dukungan dari usaha-usaha publik. Di tengah persimpangan ini, terdapat ketegangan antara pihak-pihak yang mendukung dan menolak dilanjutkannya aktivitas industri yang sudah ada.

Belitung dan Verdal adalah dua daerah yang sangat tergantung pada satu industri (*overspecialized*): pertambangan timah di Belitung dan pertambangan migas di Verdal. Kedua industri tersebut juga

dikenal tidak ramah lingkungan. Pertambangan migas menghadapi tantangan besar dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Transisi menuju perekonomian yang rendah karbon menjadi salah satu agenda penting di tingkat internasional, terutama setelah Perjanjian Paris disepakati pada 2015. Agenda ini berupaya mendorong perbaikan struktur dan mendiversifikasi perekonomian di tingkat lokal. Ketika penambangan timah di darat berpotensi merusak lingkungan dan tata ruang wilayah, penambangan timah di laut dapat memberikan dampak negatif bagi sektor perikanan dan pariwisata. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu keluar dari pola pembangunan yang sudah ada serta dapat memfasilitasi transisi menuju industri yang lebih ramah lingkungan dan menjaga kelestarian alam.

Di satu sisi, transisi menuju pembangunan berkelanjutan akan memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan generasi yang akan datang. Di sisi lain, upaya ini juga akan merugikan pihak lain seperti pekerja perusahaan tambang yang dirumahkan, keluarga mereka, dan masyarakat yang pendapatannya bergantung pada sektor-sektor rentan ini. Tidak mengejutkan bila transisi menuju pembangunan berkelanjutan seringkali mendapatkan penolakan. Terdapat kemungkinan konflik antara perusahaan tambang dan serikat pekerja yang berupaya mempertahankan industri yang sudah mapan di satu sisi, dengan aktivis (wirausaha dari sektor industri yang baru, LSM, dan organisasi lain) yang mendorong pembangunan berkelanjutan di sisi yang lain. Saya membayangkan sebuah kondisi yang lebih berimbang: kondisi yang memastikan transisi menuju pembangunan berkelanjutan berjalan secara adil dan memiliki legitimasi yang kuat dengan cara memperhatikan kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan penambahan nilai ekonomi di tingkat lokal. Dalam perspektif ini, “transisi

menuju pembangunan berkelanjutan” saja tidak cukup. Dibutuhkan “transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang adil” untuk mengkombinasikan tujuan jangka pendek menciptakan lapangan pekerjaan dengan tujuan jangka panjang menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Proses politik yang partisipatif dapat memfasilitasi diversifikasi ekonomi lokal yang terencana dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.

Sejarah Singkat Industri di Verdal

Sejarah industri di Kota Verdal mengalami tiga situasi kritis. Pertama, pengaturan ulang struktur perusahaan migas terjadi pada pergantian abad yang lampau karena harga minyak yang tiba-tiba anjlok. Guncangan ini menimbulkan respons masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah Kota Verdal berkolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan migas dan para pemangku kepentingan lain di tingkat lokal mengajukan bantuan kepada negara untuk merestrukturisasi industri di tingkat lokal dan berhasil. Perusahaan migas direstrukturisasi melalui disintegrasi vertikal dan program restrukturisasi mendorong kewirausahaan dalam sektor usaha-usaha baru (*start-up*) dan usaha-usaha sampingan lain (*spin-off*). Proses restrukturisasi ditunjang dengan program peningkatan kapasitas secara komprehensif bagi pekerja yang dirumahkan untuk memperbaharui basis pengetahuan di tingkat lokal. Kolaborasi antar para pihak, yang dikerangkai dengan diversifikasi ekonomi lokal yang adil dan terencana, berhasil memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Usaha-usaha ini menghasilkan sebuah kawasan industri baru yang diisi oleh 150 perusahaan.

Gambar 13. Platform tambang minyak lepas pantai di Kawasan Industri Verdal. Foto: Eystein Ness.

Kedua, krisis keuangan global pada 2008-2009 yang diikuti dengan turunnya harga minyak mendorong inisiatif sebuah kluster lokal untuk mengembangkan teknologi terbarukan dengan dukungan publik. Proyek Windcluster Mid-Norway mengembangkan jaringan antar perusahaan dan membangun koneksi dengan lembaga riset serta pasar internasional yang baru. Setelah melewati langkah diversifikasi industri ke energi angin lepas pantai, transisi menuju pembangunan berkelanjutan kehilangan momentumnya. Sektor migas kembali bergeliat dan industri yang dominan ini menentukan aturan-aturan pokok dan menghambat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, pandemi COVID-19 yang terjadi bertepatan dengan turunnya harga minyak pada musim semi 2020 menghasilkan guncangan bagi para pemangku kepentingan di sektor migas. Negosiasi antara para pihak yang dominan di parlemen menghasilkan keputusan untuk memberikan keringanan pajak bagi perusahaan migas. Para pihak yang terlibat berargumentasi bahwa bantuan di masa krisis dapat membantu masyarakat yang bergantung pada industri migas seperti Verdal untuk mempertahankan aktivitas ekonomi mereka dan para pemasoknya dapat memperoleh kontrak/

pekerjaan baru dari perusahaan migas. Paket bantuan ini cenderung mendukung jalur migas yang sudah ada dan menghasilkan “perluasan jalur.” Paket bantuan ini diberikan tanpa syarat yang berkaitan dengan transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Terlepas dari paket bantuan tersebut, industri lokal sedang menyiapkan lini produksi secara otonom untuk membangun fondasi dan platform turbin angin lepas pantai dan perikanan lepas pantai yang dapat menjadi salah satu yang terdepan di dunia. Upaya ini belum memberikan hasil dalam bentuk kontrak kerja baru.

Sejarah Singkat Industri di Belitung

Perekonomian Belitung telah bergantung pada komoditas timah sejak era Belanda (pertengahan 1800-an). Setelah perang dunia kedua, penambangan timah, produksi, dan perdagangannya di Pulau Belitung dinasionalisasi. Didirikan sebagai BUMN pada 1958, PT Timah mengontrol seluruh aktivitas pertambangan sehingga masyarakat tidak dapat menambang secara langsung. Pertambangan timah memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat Belitung mengingat semua orang memiliki orang tua, saudara, atau teman yang menambang timah. Paling tidak ada tiga situasi kritis dalam sejarah industri timah di Belitung.

Pertama, seiring dengan turunnya harga timah, penambangan timah melalui perusahaan dihentikan sejak 1996. Direktur PT Timah mengumumkan bahwa penutupan ini dilakukan dengan alasan menipisnya cadangan timah. Meskipun demikian, para pekerja percaya bahwa Belitung masih memiliki cadangan timah di darat maupun di laut. Program restrukturisasi yang dilakukan pada rentang periode 1993-1995 membuat ribuan pekerja dirumahkan. Para penambang timah kecewa dengan kebijakan BUMN ini. Perusahaan tidak melakukan upaya apapun untuk mendiversifikasi

aktivitas ekonominya di Belitung. Kolaborasi perusahaan dengan serikat pekerja hanya berakhir dengan pemberian uang PHK. Serikat pekerja kemudian memobilisasi anggotanya untuk mempertahankan hidup melalui program simpan pinjam. Mereka hanya memperoleh sedikit bantuan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas melalui pelatihan atau pendampingan. Banyak pekerja yang kemudian kesulitan untuk menjadi wirausaha dan sebagian yang lain memperoleh pekerjaan baru di sektor perikanan, perkebunan karet, lada, dan belakangan diikuti dengan kelapa sawit. Perpindahan dengan tradisi penambangan timah yang dominan lebih disebabkan oleh krisis yang diciptakan oleh perusahaan di pasar tenaga kerja yang memaksa para penambang untuk mencari sumber penghidupan yang baru, daripada strategi perusahaan untuk mendiversifikasi ekonomi.

Gambar 14. Open pit – Geosite Nam Salu Geosite. Foto: Asbjørn Karlsen

Sejak saat itu, PT Timah terlibat dalam penambangan timah di Belitung secara tidak langsung dengan cara membeli timah dari Belitung. Perusahaan mengalihkan banyak aktivitas penambangan

dan pengolahan yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh perusahaan kepada pihak ketiga atau masyarakat di Belitung. Sejak saat ini, timah dapat ditambang langsung oleh masyarakat. Tanggungjawab PT Timah sebagai pemberi kerja dalam memastikan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (KKK), termasuk komitmen reklamasi terhadap lubang bekas tambang dilonggarkan.

Kedua, semenjak harga timah yang semakin menurun pada 2011 dan pertumbuhan ekonomi yang juga melambat, semakin banyak orang di Belitung menyadari bahwa masa depan perekonomian tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor pertambangan. Sektor-sektor alternatif seperti perkebunan karet, lada (dalam skala kecil) dan kelapa sawit (baik skala besar maupun kecil) dan perikanan menawarkan kemungkinan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baru. Pemerintah daerah kemudian mengundang investor kelapa sawit. Meskipun demikian, perkebunan baru dan besar yang dimiliki oleh perusahaan asing kerap menimbulkan penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan.

Gambar 15. Tanaman Lada, Foto: Asbjørn Karlsen

Meski banyak masyarakat Belitung memperoleh pijakan ekonomi baru, sebagian besar masyarakat masih mengikuti jalur pertambangan. Karena masyarakat masih menemukan deposit timah, bekas pekerja PT Timah tetap menambang walau menggunakan teknologi yang lebih tradisional bila dibandingkan dengan teknologi yang digunakan sebelumnya saat menjadi pegawai PT Timah. Mengingat keterbatasan deposit timah yang dapat ditambang secara legal, penambangan menjadi setengah legal dan setengah ilegal. Asosiasi penambang timah di tingkat lokal melakukan upaya-upaya politik untuk mengakomodasi perizinan pertambangan timah rakyat dalam peraturan perundang-undangan.

Gambar 16. Pertambangan timah raykat, Foto: Asbjørn Karlsen

Gambar 17. Penyaringan timah, Foto: Asbjørn Karlsen

Ketika masyarakat melanjutkan aktivitas pertambangan, mereka memanfaatkan keterampilan yang didapatkan saat menjadi pekerja PT Timah. Sikap mental dan kebiasaan penambang membuat mereka siap untuk melanjutkan aktivitas ini. Anggota keluarga penambang juga terpapar dengan praktik-praktik dan kebiasaan penambangan sejak kecil. Selama penambangan masih menguntungkan, termasuk bila dibandingkan dengan keuntungan dari pariwisata dan perkebunan, memilih jenis pekerjaan menjadi suatu hal yang mudah. Di sisi lain, sebagian orang yang menghasilkan cukup banyak keuntungan di sektor pertambangan dapat menginvestasikan uangnya untuk memiliki usaha di sektor lain seperti kelapa sawit maupun pariwisata.

Sementara itu, PT Timah juga memiliki rencana untuk melakukan penambangan lebih jauh di Belitung, khususnya tambang laut. Bagi perusahaan, perluasan usaha pertambangan ke laut menjadi sebuah peluang baru semenjak cadangan timah di darat semakin terbatas. Perusahaan sudah memiliki pengalaman dengan penambangan di dasar laut karena ini merupakan aktivitas utama mereka di Pulau Bangka.

Hingga saat ini, pertambangan timah laut belum diperbolehkan dan ada peraturan penggunaan zona laut untuk berbagai aktivitas/kegiatan lain.

Dewasa ini, Pemerintah Pusat memiliki otoritas untuk memberikan izin, sementara Pemerintah Daerah hanya memiliki pengaruh yang terbatas. Setiap inisiatif penambangan timah di laut akan meningkatkan intensitas konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan laut di sekitar pulau karena ide penambangan laut mendapatkan penolakan dari masyarakat lokal. Walau perusahaan dan pendukungnya menggunakan teknik penambangan yang ramah lingkungan, warga yang menolak percaya bahwa penambangan di laut akan mengotori laut, merusak terumbu karang dan habitat ikan, serta mengganggu ekosistem laut dan pantai. Demonstrasi besar terjadi pada 2012 yang kemudian diikuti dengan demonstrasi lain pada 2016-2019. Organisasi yang peduli dengan lingkungan bekerja untuk menentang tambang laut di sekitar Belitung dan mendorong pemerintah daerah untuk menolak jenis pertambangan ini. Penolakan tambang laut didukung oleh sebagian besar masyarakat Belitung dan tidak sedikit dukungan ini datang dari para nelayan serta orang yang bekerja di sektor pariwisata. Mereka belajar dari situasi Bangka yang cadangan timahnya telah dieksploitasi baik di darat maupun di laut. Di sana, ekosistem laut merasakan dampak negatif dan kualitas pantainya pun semakin buruk.

Sebagian besar orang, termasuk Pemerintah Kabupaten Belitung (terletak di bagian barat pulau) menolak tambang laut karena mereka percaya kegiatan ini akan mengganggu sektor pariwisata dan perikanan yang ada. Situasinya agak sedikit berbeda dengan Belitung Timur di mana sektor alternatif untuk penambangan masih sangat terbatas. Sejauh ini pariwisata belum terlalu berkembang di Belitung Timur. Di sini, pemerintah daerah yakin bahwa pertambangan bisa terus berlanjut dalam satu atau bentuk yang lain, seiring dengan perkembangan sektor-sektor lain.

Gambar 18. Kucai, salah seorang aktor film *Laskar Pelangi* di luar Museum Kata Andrea Hirata, Foto: Asbjørn Karlsen

Munculnya film “Laskar Pelangi” di tahun 2008 memperoleh sambutan yang sangat meriah di Indonesia. Film ini menarik perhatian banyak orang ke Belitung. Belitung menjadi tempat yang lekat tidak hanya dengan tambang timah, tapi juga dengan “Laskar Pelangi.” Saat popularitas film ini mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan, pemerintah kemudian menyadari potensi sektor pariwisata. Museum Kata didirikan penulis novel di tempat pembuatan film. Pemandangan pantai dan pulau-pulau kecil di sekitar Belitung menjadi latar yang memikat untuk berenang, *snorkeling*, menyelam, dan tur antar-pulau yang sejauh ini menjadi aktraksi utama bagi para turis.

Ketiga, pemerintah di berbagai tingkatan baru-baru ini menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan di Belitung. Rencana ini didukung dengan meningkatkan jumlah hotel, restoran, dan tempat tujuan wisata. Pemerintah pun berinvestasi cukup besar bagi pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan penerbangan langsung dari

Jakarta serta Kuala Lumpur. Pemerintah Pusat telah menjadikan Belitung sebagai salah satu dari sepuluh daerah yang merupakan prioritas tujuan wisata di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus telah dibentuk di bagian barat-laut Pulau Belitung untuk menarik investasi yang lebih besar dari luar negeri dengan insentif pengurangan pajak. Pengembangan sektor pariwisata akan menciptakan tambahan dan alternatif jenis pekerjaan lain untuk generasi yang akan memasuki pasar tenaga kerja.

Gambar 19. Pariwisata bawah laut, Foto: Asbjørn Karlsen

Pertanyaan lain yang dapat diajukan adalah apakah kebijakan ini akan semata-mata menguntungkan industri besar atau memberikan keuntungan bagi usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh orang lokal? Beberapa pihak di sektor pariwisata melihat adanya sinergi antara industri dalam skala besar dengan pihak lain yang bekerja dalam skala yang lebih kecil. Ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan paket wisata yang melibatkan kegiatan tambahan di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat. Paket seperti ini dapat

mengenalkan turis pada daya tarik lain seperti alam, laut, sejarah, budaya, dan seni yang ada di Belitung. Aktivitas-aktivitas lain yang terkait akan melibatkan usaha kecil dan menengah. Seiring dengan berkurangnya persediaan ikan, serta nelayan yang mesti mencari ikan lebih jauh lagi dari pantai, banyak nelayan yang melihat sektor perikanan menjadi tidak menarik dan berpindah ke pariwisata berbasis laut atau mengkombinasikan antara melaut dan pariwisata. Biasanya mereka mengubah perahu penangkap ikannya menjadi perahu bagi wisatawan dan menjadikan pariwisata sebagai usaha sambilan saat musim turis tiba. Penjualan ikan laut di restoran juga dapat menjadi sumber tambahan pendapatan mereka.

Penggiat ekowisata dan pariwisata dalam skala kecil meragukan apakah kebijakan pemerintah dapat mewujudkan transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang adil. Mereka melihat potensi konflik yang berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol atas tanah akan memengaruhi akses masyarakat terhadap pantai dan pulau-pulau kecil di sekitar Belitung. Ekowisata dan pariwisata berbasis budaya mewakili model yang berbeda dengan model pariwisata yang dipromosikan oleh pemerintah. Aktivitas-aktivitas skala kecil ini bertujuan untuk mengenalkan budaya makanan setempat dengan mengajak para turis untuk memanen tanaman, sayuran, dan buah-buahan secara langsung dari alam dan belajar mengenal kehidupan masyarakat lokal sehari-hari. Para aktor ini juga berniat mempromosikan aktivitas seni dan budaya lokal.

Gambar 20. Ekowisata, Foto: Asbjørn Karlsen

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dipayungi dengan konsep *heritage tourism*. Ini berarti berwisata untuk merasakan pengalaman tempat, situasi, dan kegiatan-kegiatan otentik yang mewakili cerita serta orang-orang pada masa lampau. Di Belitung, *heritage tourism* dapat dihubungkan dengan pertambangan dengan beragam cara. Wisatawan dapat dikenalkan dengan sejarah pertambangan, merasakan praktik dan kultur pertambangan, kemudian mempelajari geologi, bijih logam, dan mineral yang berkaitan dengan pertambangan. Geosite Nam Salu yang merupakan bagian dari Proyek Geopark telah menjadi salah satu lokasi wisata di mana pengunjung dapat menikmati tambang terbuka (*open pit*) sekaligus memperoleh penjelasan dan panduan untuk mempelajari geologi pertambangan. Banyak sekolah telah mengunjungi tempat ini untuk tujuan tersebut.

Ada potensi yang cukup besar untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai budaya dan sejarah pertambangan di Belitung. Pada tahun 2019, Geopark telah membangun sebuah pusat informasi bagi turis. Selain itu, ada pula museum di Tanjung Pandan yang memamerkan artefak, perlengkapan, model, dan sejarah pertambangan timah. Walau museum ini telah menyajikan sejarah penting Belitung, masih ada keterbatasan dalam melayani turis internasional. PT Timah berencana untuk merevitalisasi dan membangun kembali kantor lama mereka di Lenggang dan menjaga ingatan akan fungsi gedung tersebut. Gedung ini akan disulap menjadi museum khusus timah di Belitung Timur.

Kemungkinan pergeseran tenaga kerja dari pertambangan ke pariwisata tentu saja berhubungan dengan kualifikasi atau kecakapan. Pada umumnya, sektor pariwisata tidak dilihat sebagai sektor yang cocok untuk penambang karena rendahnya kualifikasi mereka. Mengingat jumlah orang yang memiliki kualifikasi terbatas, diperlukan sebuah program peningkatan kapasitas dan penambahan keterampilan untuk menunjang pengembangan pariwisata yang ditujukan bagi publik secara luas. Beberapa pihak beranggapan bahwa sikap mental penambang akan membuat mereka susah untuk bekerja di sektor pariwisata. Apabila mengikuti perspektif ini, transisi dari pertambangan ke pariwisata hanya dapat terjadi dalam jangka panjang dari satu generasi ke generasi yang lain. Seiring dengan pengalaman yang didapatkan oleh sebagian tenaga kerja dari pekerjaan di luar tambang, transisi secara bertahap akan lebih mungkin berlangsung. Beberapa kursus dan pelatihan telah diadakan di berbagai tingkat pendidikan hingga ke universitas. Ini ditujukan untuk mengisi beragam pekerjaan di sektor pariwisata seperti pelatihan pelayan, pelatihan keselamatan, pelatihan Bahasa Inggris, pelatihan membatik, dan lain-lain. Sebagian kegiatan ini diselenggarakan oleh asosiasi

pelaku pariwisata, sebagian yang lain oleh pemerintah daerah, dan kadang juga dilakukan bersama-sama. Meskipun demikian, sebuah program pendidikan yang secara menyeluruh mendukung transisi ekonomi menuju pariwisata masih belum ditemui.

Kesimpulan

Jalur perkembangan industri nampaknya berjalan secara paralel antara Pulau Belitung di Indonesia dengan Kota Verdal di Norwegia. Di kedua tempat tersebut, aktor industri cenderung mempertahankan aktivitas yang telah mapan dan menghasilkan keuntungan jangka pendek. Perusahaan, federasi perusahaan, serikat pekerja, pekerja, dan partai politik yang dominan memiliki kepentingan untuk terus menjaga aktivitas yang mapan ini. Hingga pada tahap tertentu, jalur ini didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Secara bersama-sama para pihak yang terlibat berkontribusi pada “perluasan jalur.” Meskipun demikian, ide dan visi mengenai masa depan yang berbeda masuk menjadi salah satu agenda politik pada saat terjadi krisis. Pemerintah kemudian dapat berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Pengaturan ulang struktur ekonomi di Belitung sepertinya berlangsung pada tingkat individu, rumah tangga, atau melalui usaha kecil menengah dan terlepas dari dukungan perusahaan besar maupun pemerintah. Ini merefleksikan sebuah tradisi di level rumah tangga yang mengkombinasikan beberapa mata pencaharian, khususnya ketika seseorang dapat berpindah pekerjaan antar-sektor secara mudah mengikuti peluang kerja yang ada dan harga komoditas yang naik turun. Walau demikian, tetap ada hambatan bagi para penambang untuk masuk ke sektor pariwisata.

Investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan pelatihan dapat berkontribusi bagi transisi menuju pariwisata. Namun, program

publik seperti ini di Belitung lebih terbatas bila dibandingkan dengan program restrukturisasi dan pelatihan komprehensif yang diterapkan di Kota Verdal. Program di Verdal nampak lebih tepat dan memiliki legitimasi yang kuat karena banyak pihak ikut ambil bagian dalam menyusun kebijakan tersebut. Pengaturan yang partisipatif ini merefleksikan model Norwegia yang menekankan kerjasama tripartit antara negara, (feredasi) perusahaan, dan (serikat) pekerja.

Sementara itu, politik industri di Indonesia lebih banyak berlangsung melalui perizinan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengalokasikan penggunaan lahan, dan bahkan laut. Izin merupakan alat untuk menakar akses masyarakat terhadap tanah dan sumberdaya alam yang tersedia karena izin menentukan siapa yang dapat memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam di tempat tertentu. Masyarakat khawatir bila aktivitas mereka akan dibatasi karena keterbatasan lahan yang ada. Ini dapat dilihat di berbagai sektor, tidak hanya di pertambangan timah, tapi juga di perkebunan sawit dan pariwisata. Sehingga, praktik perizinan memiliki dampak politik dan mencerminkan strategi dan visi pemerintah untuk pengembangan industri. Ini bukan hanya soal mana sektor ekonomi (lebih berkelanjutan atau tidak) yang akan diprioritaskan, tapi juga soal aktor mana yang akan didukung –masyarakat lokal, pemilik modal lokal atau pemilik modal dari luar (modal besar), di pertambangan, perkebunan sawit atau pariwisata. Untuk itu, praktik perizinan pada dasarnya merupakan isu transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang adil. Otoritas untuk memberikan izin baru-baru ini ditarik ke pusat. Pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap perizinan hanya melalui konsultasi dan lobi. Kesadaran mengenai transisi menuju pembangunan berkelanjutan masih merupakan isu penting bagi masyarakat umum, bukan hanya isu bagi para pemilih saat pemilihan umum. Bila masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam

proses politik untuk mengerangkai “pembaruan jalur”, mereka mampu memastikan transisi menuju pembangunan berkelanjutan juga dapat berlangsung secara adil.

Catatan

Saya mengucapkan terima kasih kepada Eko Bagus untuk bantuannya dalam mengumpulkan dan menerjemahkan data-data dari Belitung. Saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada yang menyiapkan dan mengatur kunjungan lapangan saya ke Belitung.

Indeks

A

Air 31, 117, 120, 124, 128, 164,
167

Alam 33, 131, 135, 164, 166, 167,
168

Alternatif 1, 112

Aplikasi 55, 57

Arisan 124

B

Bangka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 100, 114,
129, 133, 134, 148, 149,
165

Belitung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 35, 36, 59, 61,
62, 63, 64, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78,

79, 81, 85, 86, 87, 88, 89,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 102, 103, 105, 108,
110, 111, 113, 114, 115,
117, 119, 120, 127, 128,
129, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 139, 140,
144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 163, 164,
165, 167

Berkelanjutan 1, 10, 139

Bisnis 24, 29

Budaya 23

Bukit Peramun 20, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 88

D

Diversifikasi 10, 12

- E**
 Ekonomi 1, 6, 10, 15, 61, 79, 108, 117, 126, 128, 139
 Ekowisata 152, 153
- G**
 Global 96
- I**
 Identitas 65
 Industri 112, 115, 142, 143, 144
- K**
 Kafe 37
 Kawasan 61, 79, 100, 143, 151
 Keberlanjutan 103
 Kebijakan 15, 167
 Kedai 25, 27, 29, 30, 31
 Keluarga 117, 120
 Kepulauan 1, 4, 21, 93, 98, 100, 134
 Kewirausahaan sosial 106, 107
 Komoditas 68, 69
 Komunitas 23, 105, 108, 109, 110, 163
 Konservasi 54
- Kopi 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31
- L**
 Laskar Pelangi 6, 19, 20, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 132, 134, 136, 150
 Laut 131, 135
 Lingkungan 100, 108
- M**
 Masyarakat 1, 10, 97, 100, 101, 105, 126, 131, 133, 134, 137, 156, 166
 Museum 75, 114, 150
- N**
 Nam Salu 24, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 102, 145, 153
 Nelayan 135
- O**
 Open pit 73, 145
- P**
 Pantai 19, 21, 131, 132, 136

- Pariwisata 15, 61, 105, 108, 109, 110, 135, 151
- Pembangunan 108, 139, 166, 167
- Pemerintah 3, 4, 23, 103, 134, 142, 146, 149, 150, 155, 156
- Pendapatan 45, 99
- Pengelolaan 33
- Penghidupan 117
- Perekonomian 139, 140, 144
- Perempuan 117, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 129
- Perkembangan 5, 23
- Pertambangan 1, 5, 98, 141, 144, 147
- Pertanian 120
- Perusahaan 2, 15, 114, 133, 142, 144, 145, 148, 155
- Pesisir 134
- Potensi 8, 29, 33, 131
- Pulau 1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 68, 75, 76, 81, 89, 96, 97, 131, 132, 134, 144, 148, 151, 155
- S**
- Sektor 15, 143, 146, 168
- Spesies 26
- Sumber daya 112
- Sungai 22, 99
- T**
- Taman 33, 35, 88
- Tambang 2, 3, 15, 103, 131, 133, 135
- Tarsius 36, 81, 85, 86
- Teknologi 166
- Timah 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 76, 77, 78, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 114, 133, 135, 139, 144, 145, 147, 148, 154
- Transformasi 96
- Transisi 139, 141
- W**
- Wisata 19, 29, 33, 35, 36, 88, 110, 131, 132
- Wisatawan 59, 63, 153

Tentang Penulis

Agung Widiyantoro menyelesaikan pendidikan formal program sarjana di Jurusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada tahun 2018. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan magister di Departemen Politik & Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Minat kajian yang didalami berupa sejarah politik, serta isu-isu kebudayaan Jawa. Sejak tahun 2020, aktif di Komunitas Kretek sebagai salah satu divisi riset.

Asbjørn Karlsen adalah profesor dalam bidang geografi di Norwegian University of Science and Technology. Penelitian yang telah dilakukan mencakup topik-topik seperti *industrial restructuring*, *regional innovation* dan *cluster formation*. Penelitian terbaru berfokus pada jaringan produksi global dan transisi berkelanjutan khususnya di wilayah berbasis sumber daya alam. Ia mempelajari perkembangan regional, industri dan teknologi dari perspektif institusionalis historis. Ia terlibat dalam menjalankan proyek yang berkolaborasi dengan peneliti yang diakui di Newcastle University, Inggris dan Universitas Gadjah Mada, Indonesia sebagai peneliti dan supervisor untuk 3 mahasiswa program doktoral: (1) Center for Research-based Innovation (SFI) Manufacturing <http://www.sfimanufacturing.no/> (2) Norwegian Research Centre on Wind Energy (FME) NorthWind <https://www.northwindresearch.no/> (3) Citizens Participation in Resource Governance and Sustainable Transition. Ia pernah mengikuti beberapa workshop dan kunjungan

lapangan di Jawa dan Belitung yang diselenggarakan oleh mitra di Universitas Gadjah Mada.

Daniel Galih Irfan Yoga Aditama meraih gelar sarjana filsafat di Fakultas Filsafat UGM pada tahun 2017. Saat ini ia sedang menempuh studi Magister Politik dan Pemerintahan di Fisipol UGM dengan minat konsentrasi Politik Sumber Daya Alam. Ia mendapatkan beasiswa penelitian tesis terkait tata kelola air dari Konsorsium GroundUp (IHE Delft, UGM, Unika, UI, Amarta Institute for Water Literacy, dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) yang dibiayai oleh Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW, Lembaga Belanda untuk Riset dan Pengetahuan) dengan Ristekdikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Indonesia) dengan tema “Upaya pemenuhan hak atas air dalam tata kelola air di Semarang”. Minat kajian lain yang ia dalami terkait dengan isu aktivisme, korupsi, dan lingkungan. Ia juga pernah bekerja di perusahaan multinasional dalam bidang media advertising and marketing di Mindshare, GroupM PT. WPP pada tahun 2017-2019.

Diana Vela Almeida adalah peneliti senior di Departemen Geografi, Norwegian University of Science and Technology. Ia juga anggota the Community Economies Research Network dan *associate editor* di *Uneven Earth*. Publikasi yang ia lakukan selama ini berfokus pada *extractivism and social transformations, resource geography, austerity and political ecology, ecological struggles and territorial defense from feminism, dan local reproductive economies and a critique of the green capitalism of the new green transition proposals globally*. Ia telah melakukan penelitian di Kab. Belitung sejak Januari 2020 dan saat ini sedang mendalami isu pertambangan timah dalam proyek “Environmental Policy Instruments across Commodity Chains (EPICC): Comparing multi-level governance

for Biodiversity Protection and Climate Action in Brazil, Colombia, and Indonesia”.

Muhammad Djindan menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM pada tahun 2007. Setelah memperoleh gelar master dalam studi kebijakan lingkungan (environmental policy) dari Wageningen University di Belanda pada tahun 2016, ia mengelola proyek tata kelola sumberdaya alam (Resource Governance in Asia Pacific) di PolGov sebelum bekerja sebagai pengajar di DPP pada tahun 2018. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Departemen sejak tahun 2021. Topik studi yang kini ia dalami adalah politik sumberdaya alam, kebijakan lingkungan, keterkaitan antara pengetahuan dan kebijakan (science-policy interface), demokrasi, dan masyarakat sipil. Beberapa penelitian yang sedang ia kerjakan adalah “evidence to policy pathways in a contested policy” di Jakarta dengan dukungan dari International Network for Government Science Advice (INGSA) dan “Environmental Policy Instruments across Commodity Chains (EPICC)” di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Selain penelitian akademik, Muhammad Djindan juga melakukan beberapa assessment, evaluasi, serta studi yang bersifat praktis untuk berbagai organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah di Indonesia.

Nora Iman Hagesæther mendapatkan gelar magisternya dari program Entrepreneurship, Innovation, and Society di Norwegian University of Science and Technology. Ia pernah bergabung sebagai mahasiswa magang di Research Centre for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada, pada Agustus-November 2019. Ia tertarik untuk mendalami topik kewirausahaan sosial dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Selama melakukan magang, ia bertemu dengan perwakilan dari berbagai komunitas dan tokoh penting di Kab. Belitung dan sekitar daerah Merapi di Yogyakarta.

Ia juga berkesempatan mengunjungi lokasi wisata-wisata krusial di kedua daerah tersebut penting dan belajar mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi inspirasi untuk penulisan artikelnya pada buku ini.

Nanang Indra Kurniawan adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM. Minat risetnya meliputi Masyarakat Sipil, Politik lingkungan, Politik Sumber Daya Alam, dan Politik Teknologi. Sebelum menjadi seorang dosen di tahun 2006, ia terlibat sebagai peneliti dan aktivis NGO di Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM pada 2001, pendidikan Master dari Department of Political Science and Management, Study of Management, Agder University College, Norway (2006), dan menyelesaikan PhDnya di Asia Institute, Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia pada 2016. Salah satu karyanya yang dibukukan adalah *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan Norwegia (Globalisation and the Norwegian Welfare State)* (2009). Salah satu karya artikel jurnalnya adalah *Struggle to Gain Representation: Mixed Politics in Democratising Indonesia. Power Conflict and Democracy Journal*, Vol II No.2. (2010), “Claiming Indigenous Rights through Participatory Mapping and the Making of Citizenship”, ditulis bersama Ståle Angen Rye dan diterbitkan oleh *Political Geography*.

Susmriti Shrestha adalah mahasiswa program Ilmu Sosial dan Studi Pembangunan dari Nepal. Ia meraih gelar magisternya pada program Globalization and Sustainable Development di Norwegian University of Science and Technology, dan pada program Sosiologi di Tribhuvan University Nepal. Ia tertarik untuk memahami berbagai teori dan agenda pembangunan, serta menerjemahkan teori-teori

tersebut ke dalam praktik untuk tujuan transformasi, rekayasa sosial, pembangunan, dan kesejahteraan. Karya terbarunya mencakup tesisnya yang mengambil tema *Tourism in Belitung Island, Indonesia: Strategies and Approaches for Sustainable Development*; *Assessment of Sexual Abuses in Street Children of Kathmandu Nepal*; *Livelihood Analysis of People Involved in Lapsi (choerospondias axillaris) Fruit Related Profession in Kavre district Nepal*. Susmriti terpilih sebagai “Rising Star” oleh Wedu, sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kepemimpinan perempuan. Sebagai pemegang gelar tersebut, ia menjadikan advokasi terhadap perlindungan anak perempuan di seluruh dunia sebagai tujuan jangka panjang hidupnya.

Syahran Firdaus menyelesaikan jenjang Pendidikan sarjananya di Jurusan Politik dan Pemerintahan di Fisipol UGM pada tahun 2017. Saat ini sedang menempuh jenjang Pendidikan Magister Politik dan Pemerintahan di Fisipol UGM dengan minat konsentrasi yaitu Politik Sumber Daya Alam dengan mengangkat tema tesis terkait “Koperasi sebagai Gerakan Perlawanan terhadap Isu Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta”. Salah satu minat kajian yang didalami terkait dengan Politik lokal dan Otonomi Daerah, serta Kajian Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pada tahun 2019-2021 bekerja sebagai Asisten Tenaga Ahli bidang Kebijakan Pembangunan Daerah di PT.Sinergi Visi Utama yang fokus terhadap pendampingan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Sejak tahun 2021. bekerja sebagai Analis Kebijakan di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tadzki Nurshafira sedang menempuh pendidikan magister Politik dan Pemerintahan di Fisipol UGM sejak 2019 dengan minat konsentrasi Politik Sumber Daya Alam. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM pada

tahun 2017 dan program pertukaran satu semesternya di Departemen Geografi, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norwegia, pada bulan Juli 2021. Saat ini ia mengerjakan tesisnya yang berjudul “*The Making of Resource: Resource Nationalism in Indonesia’s Contemporary Upstream Oil and Gas Industry*” dan bekerja sebagai manajer program pertukaran mahasiswa antara Fisipol UGM dan NTNU berjudul ‘*Citizen Engagement and Natural Resource Governance Education*’. Minat topik riset Tadzkia mencakup tata kelola sumber daya alam ekstraktif dan privatisasi air bersih di Indonesia.

Wegik Prasetyo adalah mahasiswa pascasarjana di Departemen Politik dan Pemerintahan dan peneliti di Research Centre for Politics and Government (PolGov), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Fokus studi yang ia dalami adalah tata kelola sumber daya alam, demokrasi, pemilu, dan partai politik. Salah satu publikasi terbaru dalam isu ini diterbitkan dalam bentuk jurnal dengan judul *Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia (2020)*.

Zanjabil Al-Falah menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Politik Islam Ushuluddin UINSA pada tahun 2018. Saat menempuh strata satu, ia melakukan penelitian terkait etika politik Walikota Bandar Lampung sebagai skripsinya. Ia lalu pulang ke kampung halamannya di Lampung selama setengah tahun sembari menunggu pembukaan pascasarjana DPP UGM. Setelah menjadi mahasiswa pascasarjana DPP UGM pada tahun 2019, ia meneliti tentang kekuasaan tengkulak karet di Kabupaten Way Kanan yang mengantarkan ia lulus dari UGM. Setelah memperoleh gelar master dalam studi politik sumber daya alam dari UGM pada tahun 2021, ia pulang ke kampung halamannya dengan tujuan bisa berguna untuk daerahnya.

KELUAR DARI KETERGANTUNGAN TIMAH

Mencari Ekonomi Alternatif dan
Berkelanjutan di Belitung

Dalam buku ini pembaca akan menemukan dua segmen besar. Segmen pertama adalah tulisan-tulisan yang berupaya untuk menegaskan daya tarik Belitung sebagai sebuah pulau yang kaya akan sumberdaya alam. Tulisan-tulisan di segmen pertama ini disusun dalam rangka membantu para pihak di Belitung untuk mempromosikan beragam keunikan yang ada di pulau ini kepada khalayak luas serta menguraikan pelajaran-pelajaran penting yang didapat para penulis dari kunjungan mereka ke Belitung. Segmen kedua berisi tulisan-tulisan yang berupaya tidak hanya merefleksikan tapi juga menganalisis dinamika sosial dan politik di Belitung.

Kontribusi-kontribusi tulisan dalam buku ini diharapkan akan membawa diskusi baru untuk memahami diversifikasi ekonomi dan transisi ekonomi ekstraktif ke non-ekstraktif serta negosiasi dan tensi konflik didalamnya. Harapannya buku ini menjadi semacam *lesson learned* dan harapan baru bagi masyarakat yang saat ini tengah berjuang untuk memunculkan alternatif perekonomian di luar ekonomi ekstraktif.